

SEJARAH

Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di SULAWESI TENGAH

Direktorat
Kebudayaan

4

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL

1982/1983

Milik Dep. P dan K
Tidak diperdagangkan

**SEJARAH PERLAWANAN
TERHADAP
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME
DI DAERAH SULAWESI TENGAH**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
1982/1983**

TIM PENULIS:

- 1. Masyhuddin Masyhuda**
- 2. Ny. Nurhayati Nainggolan**
- 3. Zohra Mahmud**
- 4. Daeng Patiro Laintagoa**

PENYUNTING :

- 1. DRS. R.Z. LEIRIASA MA**
- 2. DRS. M. SOENJATA K**

Gambar kulit oleh :
Idham Palada

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1982

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1982

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional**

DAFTAR ISI

Sambutan

Kata Pengantar.

Daftar Isi.

P E N D A H U L U A N 1

BAB. I. SULAWESI TENGAH SELAYANG PANDANG ..

A.LETAK, IKLIM DAN KEADAAN GEOGRA-
FINYA 5

1. L e t a k 6

Iklim dan Keadaan Geografinya 6

—Potensi Mineral 9

B. PENDUDUK, BAHASA DAN ADAT-ISTIADAT

—Etnis dan Logat 11

1. Orang Kaili (Tokaili) 15

2. Orang Tomini (Totomini) 16

3. Orang Kulavi (Tokulavi) 16

4. Orang Lore (Tolore) 17

5. Orang Pamona (Topamona) 17

6. Orang Mori (Tomori) 18

7. Orang Bungku (Tobungku) 18

8. Orang Saluan (Tosaluan) 18

9. Orang Balantak (Tobalantak) 18

10. Orang Banggai (Tobanggai) 18

11. Orang Buol (Tobuol) 19

12. Orang Toli-Toli (Totoli-Toli) 19

—Perkembangan nama Toraja di daerah Sula-
wesi Tengah 19

—Adat-Istiadat 22

C. MASA SEBELUM DATANGNYA KONONIAL-
ISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH SU-
LAWESI TENGAH 25

1. Kabupaten Buol Toli-Toli 25

2. Kabupaten Donggala 26

3. Kabupaten Poso	29
4. Kabupaten Banggai	32
D. AWAL TIBANYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH SULAWESI TENGAH	33
E. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH	37
BAB. II. TIMBULNYA PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH SULAWESI TENGAH	40
A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN	45
1. Agama	45
2. <i>Perampasan Kekuasaan</i>	46
3. <i>Kerja Paksa (Rodi) dan Pajak (Belasting)</i>	47
4. <i>Kesadaran Nasional</i>	48
5. <i>Tindakan Kasar Penguasa</i>	50
B. WUJUD PERLAWANAN	51
1. <i>Perlawanan Bersenjata Secara Kelompok</i>	51
2. <i>Perlawanan Bersenjata Secara Pribadi</i>	52
3. <i>Perlawanan Secara diam-diam (Gerakan di bawah tanah)</i>	52
4. <i>Perlawanan yang dinyatakan dengan sikap</i>	53
5. <i>Tidak mengakui kontrak dan mengucapkan kata-kata (semboyan)</i>	54
6. <i>Rapat Umum dan Pawai Keliling Kota</i>	59
C. PERLAWANAN-PERLAWANAN YANG PERNAH TERJADI	74
BAB. III. PROSES DAN JALANNYA PERLAWANAN ..	74
A. PERLAWANAN DI KABUPATEN DONGGALA	
1. <i>Gerakan perlawanan di Kerajaan Moutong (1826 - 1904)</i>	74

2. <i>Perang Donggala</i> (\pm 1902)	78
3. <i>Perang Sigi</i> (1905—1908)	81
4. <i>Perang Kulavi</i> (1904—1908)	89
5. <i>Perlawanan sikap raja Parigi bernama Vinono bersama puteranya Hanusu</i>	92
6. <i>Peristiwa Dolago</i> (1936)	92
7. <i>Sikap Perlawanan Lasadindi</i>	93
B. PERLAWANAN DI KABUPATEN POSO	94
1. <i>Perlawanan Perorangan</i>	94
2. <i>Perang Pekurehua</i> (1907)	95
3. <i>Perang Mori, Kolonedace</i> (1907)	97
4. <i>Perlawanan Gerakan Merah Putih di Ampana</i> (1942)	100
C. PERLAWANAN DI KABUPATEN BANGGAI .	109
1. <i>Perlawanan Tonaas Janggo Pute dan kawan-kawannya</i> (1900)	109
2. <i>Perlawanan Laginda</i> (1905)	112
3. <i>Perlawanan Gerakan Merah Putih di Luwuk-Banggai</i> (1942)	115
D. PERLAWANAN DI KABUPATEN BUOL TOLI-TOLI	120
1. <i>Peristiwa Salumpaga</i> (1919)	120
2. <i>Perlawanan Gerakan Merah Putih di Toli-Toli</i> (1942)	132
E. PERLAWANAN TERHADAP JEPANG	135
BAB. IV. AKIBAT YANG TIMBUL KARENA ADANYA PERLAWANAN	143
A. DI BIDANG PEMERINTAHAN	147
B. AKIBAT BAGI PEMIMPIN-PEMIMPIN PERLAWANAN/ RAJA-RAJA	148
P E N U T U P	157

DAFTAR SUMBER/KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Kartu Anggota Serikat Islam Bunta tahun 1917.
 2. Relas Peristiwa Dolago tahun 1936.
 3. Peta Propinsi Sulawesi Tengah.
 4. Daftar Informan.
-

P E N D A H U L U A N

Sejak adanya kekuasaan kolonialisme dan imperialisme untuk menguasai serta menjajah rakyat dan tanah air Indonesia pada awal abad ke 16, sejak itu pula telah terjadi perlawanan-perlawanan terhadapnya baik dilakukan secara massal oleh penguasa setempat bersama rakyatnya maupun oleh tokoh-tokoh perorangan.

Seperti halnya di tempat-tempat lain di Indonesia, maka di daerah Sulawesi Tengah pun terjadi sekian banyak perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme baik yang datang dari Eropah (Belanda) maupun dari Asia (Jepang).

Tulisan ini merupakan hasil inventarisasi dan dokumentasi sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah yang data-datanya dapat dikumpulkan dan disusun dalam bentuk naskah tulisan oleh Tim Penulis.

Sulawesi Tengah yang secara administratif meliputi 4 (empat) wilayah Kabupaten masing-masing Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli semuanya pernah menjadi arena tempat terjadinya perlawanan oleh penguasa setempat bersama rakyatnya, dalam usaha menolak kekuasaan kolonialisme dan imperialisme yang pernah datang di Sulawesi Tengah.

1. *Pembatasan Masalah.*

Yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme di sini adalah paham atau sistem yang dianut oleh semua pendatang asing yang mau menjajah, menguasai dan mengeksploitasi rakyat serta kekayaan alam dan kebudayaan bangsa/rakyat yang didatanginya, untuk kepentingannya sehingga rakyat menjadi hilang kemerdekaannya atau dijajah oleh bangsa pendatang tersebut.

Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme adalah segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat bersama pemimpinnya terhadap penjajah baik dalam bentuk perlawanan bersenjata maupun perlawanan sikap yang ditujukan pada kekuasaan

penjajah yang datang tersebut, untuk membebaskan diri dari keadaan yang menekan dari kekuasaan penjajah.

Oleh sebab itu tulisan ini berisikan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan-perlawanan yang pernah terjadi di daerah Sulawesi Tengah terhadap penjajah baik itu berbentuk perlawanan bersenjata maupun berbentuk perlawanan sikap, membangkang pada pemerintah, aturan-aturan yang dijalankan oleh pihak penjajah yang berakibat menimbulkan beban berat bagi rakyat untuk mengikuti atau mematuhi.

2. Tujuan Penelitian.

- a. Tujuan penulisan naskah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah adalah supaya data-data sejarah perlawanan daerah dapat diinventarisasi dan didokumentasikan sebelum dilupakan mengingat buku-buku tentang hal ini masih langka dan para orang tua yang dapat memberikan informasi tentang hal ini yang langsung dan pernah terlibat atau mengalami dan berperan dalam perlawanan tersebut karena usia tua banyak yang telah meninggal dunia.
- b. Tujuan lainnya adalah untuk menginformasikan perlawanan daerah Sulawesi Tengah terhadap kekuasaan kolonialis dan imperialis agar dapat dijadikan pelengkap penulisan sejarah perlawanan nasional pada masa-masa mendatang.
- c. Diharapkan kiranya tulisan ini dapat dimanfaatkan dalam pembentukan jiwa kepahlawanan mempertebal rasa kebangsaan dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa bagi generasi sekarang dan yang akan datang, yang membuktikan bahwa di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tengah perlawanan rakyat telah terjadi sejak mula datangnya penjajah ke tanah air malah berkelanjutan sampai pada saat diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup.

- a. Ruang lingkup tulisan ini meliputi segala bentuk perlawanan

yang pernah terjadi pada 4 wilayah Kabupaten di daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Baik perlawanan bersenjata (fisik) maupun perlawanan sikap pada kolonialisme dan imperialisme di Sulawesi Tengah. Bentuk perlawanan ada yang berbentuk perlawanan massal yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang pernah ada, ada berwujud perlawanan perorangan maupun kelompok-kelompok suku.

- b. Dari data-data yang diperoleh diketahui bangsa asing yang pernah datang menjajah daerah Sulawesi Tengah adalah bangsa Belanda dan bangsa Jepang.

Oleh sebab itu perlawanan yang ditulis adalah perlawanan yang pernah dilakukan oleh rakyat Sulawesi Tengah bersama para pimpinannya melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda dan Jepang.

- c. Ruang lingkup waktu yang membatasi penulisan ini adalah sejak datangnya penjajah Belanda di daerah Sulawesi Tengah pada akhir abad ke 19 sampai saat diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

3. Metode Penelitian dan Penulisan.

Data-data yang dijadikan bahan penulisan naskah ini diperoleh baik melalui hasil bacaan maupun dari hasil wawancara dengan para informan yang dianggap mengetahui karena pernah terlibat langsung atau berperan dalam perlawanan tersebut maupun dari mereka yang mengetahui karena mendengar langsung ceritanya dari keluarga dekat atau sahabat dari tokoh-tokoh yang berperan tersebut.

Hasil wawancara kemudian dicek dengan bahan pembanding dari tulisan-tulisan yang telah ada. Demikian pula data yang berasal dari catatan tertulis diuji kebenarannya dengan hasil wawancara atau penelitian ke lapangan.

Naskah ini disusun bersama oleh Tim Penulis yang terdiri dari 4 (empat) orang masing-masing bertugas menulis satu bab kemudian diedit ketua Tim Penulis.

Ke 4 anggota Tim Penulis adalah:

1. Dra.Ny.N:Nainggolan sebagai ketua merangkap anggota.
2. Masyhudi Masyhuda. BA sebagai anggota.
3. Dra. Zohra Mahmud. sebagai anggota.
4. Daeng Patiro Laintagoa.BA sebagai anggota.

Koordinator Tim Penulis adalah Drs. Soedarsono, Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah.

Konsultan adalah Prof. Dr. A. Mattulada, Rektor Universitas Tadulako Palu.

Dalam kegiatan penelitian/penulisan, Tim ini mengikuti jadwal kegiatan sebagai berikut:

a. Tanggal 11 s/d 16 Juni 1981, Tim Penulis daerah Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Pekan Pengarahan Penulis yang diadakan oleh Proyek IDSN di Cibogo.

b. Tanggal 17 s/d 22 Juni 1981 mengadakan studi kepustakaan di Museum Pusat Jakarta.

c. Awal bulan Juli 1981 melanjutkan studi kepustakaan di daerah Sulawesi Tengah.

Tanggal 15 Juli 1981, Tim mengadakan pertemuan untuk pembagian tugas pencarian data dilanjutkan dengan penulisan naskah, serta menyusun kerangka karangan naskah Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sulawesi Tengah.

d. Bulan Agustus — September 1981;

Pencarian data ke lapangan dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Kabupaten Poso dan Luwuk oleh Daeng Patiro Laintagoa.BA.
- Kabupaten Buol Toli-Toli oleh Dra. Zohra Mahmud.
- Kabupaten Donggala oleh Masyhudi Masyhuda.BA dan Dra. Ny.N.Nainggolan.

e. Oktober — Nopember 1981.

Penulisan Naskah Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Daerah Sulawesi Tengah oleh Tim Penulis.

f. Desember 1981 mengedit dan memperbanyak naskah untuk selanjutnya dikirim ke Proyek Inventarisasi, Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) Jakarta untuk dievaluasi.

Akhirnya Tim Penulis menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki maka apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini maka kiranya kelak akan dapat lebih disempurnakan pada penelitian-penelitian yang akan datang.

B A B. I

SULAWESI TENGAH SELAYANG PANDANG.

A. LETAK, IKLIM DAN KEADAAN GEOGRAFINYA.

1. *Letak.*

Propinsi Sulawesi Tengah sebagai propinsi yang ke 23 dari 27 Propinsi yang ada di Wilayah Republik Indonesia ini terletak dengan batas wilayahnya sebagai berikut :

- 2° Lintang Utara,
- 3° 48' Lintang Selatan,
- 119° 22' Bujur Timur,
- 124° 20' Bujur Timur.

Di sebelah Utara berbatas dengan Laut Sulawesi dan Propinsi Dati I Sulawesi Utara.

Di sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Di sebelah Timur berbatas dengan Laut Maluku (pulau (Sonit) dan di sebelah Barat berbatas dengan Selat Makassar.

2. *Iklm dan keadaan geografinya.*

Pada umumnya iklim di wilayah ini hanya dipengaruhi dua musim secara tetap, yaitu musim Barat yang kering dan musim Timur yang banyak mengandung uap air.

Musim Barat biasanya berlangsung dari Oktober sampai dengan April sedangkan musim Timur dari bulan April sampai dengan Oktober yang ditandai dengan banyaknya turun hujan sehingga dalam satu tahun curah hujan di Sulawesi Tengah bervariasi antara 800 — 3000 mm kecuali Lembah Palu, yang karena curah hujan sangat kurang hanya bervariasi antara 400 — 1000 mm setahun.

Suhu udara di Sulawesi Tengah untuk dataran tinggi berkisar antara 2° — 30° Celcius dan di daerah dataran rendah berkisar antara 25° — 31° Celcius dengan kelembaban rata-rata bu-

lanan berkisar antara 71% — 76%.

Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah memiliki luas kira-kira Karena wilayah ini terdiri dari 4 (empat) Kabupaten maka tiap-tiap Kabupaten masing-masing memiliki luas sebagai berikut :

Kabupaten Donggala	23.497 km ²
Kabupaten Poso	24.112 km ²
Kabupaten Banggai	13.163 km ²
Kabupaten Buol Toli-Toli	7.261 km ² .

Wilayah Sulawesi Tengah ini kurang lebih 65% masih merupakan daerah yang berhutan lebat, sedangkan 35 % terdiri dari dataran rendah yang relatif sempit sepanjang pantai dan secara sporadis dijumpai juga dataran tinggi di antara pegunungan yang curam dan terjal.

Dapat dikatakan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah yang bergunung-gunung, hanya sebagian kecil saja merupakan tanah rendah yang umumnya terdapat di sekitar pantai diselingi oleh bagian-bagian yang meninggi.

Barisan gunung-gunungnya yang tinggi antara lain Pegunungan Takolekaju, Pegunungan Melengraf, Pegunungan Fenema dan Pegunungan Verbeek di Kabupaten Poso, serta gunung Nokilalaki (2355 m), G. Sojol (2525 m), G. Malino (2443 m) dan G. Tinombala (2183 m) di Kabupaten Donggala. Ada pula yang merupakan pegunungan yang kecil seperti Pegunungan Peleru, Pegunungan Pompangeo dan gunung Katoposo (2835 m) semuanya di Kabupaten Poso.

Di Kabupaten Banggai diketemukan pegunungan-pegunungan Balingara, Batui dan Balantak serta gunung Tompotika (1590 m).

Di Toli-Toli terdapat barisan pegunungan Ogoamas dan gunung Daka (2304).

Gunung berapi di Propinsi ini pada umumnya sudah tidak aktif lagi. Hanya di beberapa tempat terdapat sumber air panas yang berbau belerang.

Satu-satunya gunung berapi yang masih aktif terdapat di pulau

Kegiatan tektonis berupa gempa bumi ringan dan sedang sering terasa di daerah ini. Maklumlah ada patahan (fault) Palu—Koro sepanjang 1000 km yang terentang dari Palu sampai Teluk Bone, hampir sejajar dengan barisan pegunungan Takolekaju.

Tahun 1938 terjadi gempa yang hebat menyebabkan air laut naik menyapu rumah-rumah dan pohon kelapa rakyat di sepanjang pantai Kampung Mamboro, di tepi pantai Barat Kabupaten Donggala.

Pada bulan Agustus 1968 sebuah kampung bernama Mapaga, terletak di pantai Barat Kabupaten Donggala jatuh/longsor lenyap ke dalam laut sebagai akibat gempa bumi yang cukup kuat.

Pada tahun 1977 orang-orang Besoa mengalami gempa yang merusakkan dua buah lumbung padi di kampung Doda (Kabupaten Poso), merontokkan lampu-lampu petromax dari gantungannya dan menjatuhkan radio dan salonnya milik petugas Camat Besoa.

Beberapa bulan kemudian, kota Palu yang lebih dari 150 km jaraknya dari Besoa digelitik gempa yang berkekuatan 5,9 pada skala Richter. ¹⁾

Tipe iklim tropis dengan curah hujannya yang bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya dibuktikan dengan adanya daerah yang bercurah hujan tinggi ada pula yang paling rendah (Lembah Palu) dengan distribusi hujan yang hampir merata setiap tahun.

Ibu kota Propinsi ini yaitu Palu terletak persis di bawah garis khatulistiwa sehingga udaranya pada waktu siang amat panas.

Sumber air (danau dan sungai) cukup banyak terdapat di wilayah Sulawesi Tengah ini. Danaunya ada 3 (tiga) masing-masing D. Dampelas, D. Lindu dan D. Poso (Tentena).

Hubungan komunikasi darat antara daerah Kabupaten satu

). S.J. Adicondro, *Prisma* No. 2 tahun 1979, hal.

dengan daerah Kabupaten lainnya masih amat sukar (baru dalam tarap penggarapan).

Faktor komunikasi yang sulit ini menyebabkan masih banyak desa terpencil yang sukar dijangkau dengan kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2, terutama yang terletak di daerah pegunungan.

Tentang flora dan fauna, daerah ini memiliki jenis fauna yang khas hanya diketemukan di sini seperti umpamanya anoa (sapi hutan) dan burung meleo. Disamping itu ditemukan pula binatang-binatang lainnya rusa, babi, sapi, kerbau serta berbagai bahan pangan, tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat-obatan ataupun untuk racun. Juga bermacam kayu seperti kayu hitam (ulin) yang merupakan komoditi ekspor sumber devisa.

Karena wilayah ini memiliki banyak gunung maka kawasan hutannyapun cukup luas. Dari luas arealnya yang meliputi 6.803.300 Ha maka areal hutannya meliputi 3.588.276 Ha. Kawasan hutan tersebut terdiri dari :

Hutan lindung	1.589.603 Ha
Hutan suaka alam	140.109 Ha
Hutan wisata	31.000 Ha
Hutan produksi	1.862.564 Ha. ²⁾

Hasil hutan Sulawesi Tengah yang diolah sejak lama dan dieksport adalah kayu hitam, rotan dan damar.

Potensi Mineral.

Sejak Pelita I, Sulawesi Tengah telah mengadakan Inventarisasi potensi mineral. Hasil-hasil pengamatan secara umum ini perlu dilanjutkan dalam bentuk servey tehnik untuk dapat me-

2). *Gambaran Umum Pelaksanaan Pelita I, II sampai Th. ke II Pelita III Sulawesi Tengah, Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Dati I Sulawesi Tengah 1981, hal.*

mastikan potensi dan deposito sumber mineral yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan di masa depan.

Perkiraan lokasi mineral Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

Jenis logam	L o k a s i	Kab./Dati II
Mas dan perak	Paleleh, Lintidu, Panasakan Bada, Basin Besoa, Tojo	Buol Toli-Toli P o s o
Tembaga	Timbulan, Bokat Pantoloan, Tawaeli, Tompe	Buol Toli-Toli Donggala
Timah hitam dan seng	Paleleh, Lintidu, Panasakan	Buol Toli-Toli
N i k e l	Kolonodale, Lapasau, Tanjung Solani	P o s o
B e s i	Awu, Kulawi Kolonodale	Donggala Poso

Lokasi bahan galian bukan logam daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

J e n i s Logam	L o k a s i	Kab./Dati II
Minyak dan gas bumi	Kintom, Pagimana	Banggai
Batu bara	Lamadang, Lona Tataba, Kintom	Buol Toli-Toli Banggai
Mika,	Lelengan, Mamulusan, Mansalean, Ngeilai	Banggai

Gibs	Mamboro, Awu, Kulawi	Donggala
Asbes	Awu, Kulawi	Donggala
Belerang	Una-Una	P o s o
G a r a m	Moutong, Talise, Panto- loan, Lembo	Donggala ³⁾

B. PENDUDUK, BAHASA DAN ADAT-ISTIADAT.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1971 jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tengah sebesar 920.044 jiwa. Dari hasil hasil pendaftaran Pemilu tahun 1976 diketahui berjumlah 1.070.822 jiwa. ⁴⁾

Berarti tingkat perkembangan penduduk 3,5 % setahun. Selanjutnya pada tahun 1980 sensus penduduk yang dikumpulkan dari tiap desa menghasilkan jumlah penduduk 1.289.226 (angka sementara) terdiri dari 664.666 jiwa laki-laki dan 624.560 jiwa wanita.

Dari jumlah ini tercatat Kabupaten Donggala dihuni 584.499 jiwa, Kabupaten Poso 264.581 jiwa, Banggai 267.016 jiwa dan Kabupaten Buol Toli-Toli 173.130 jiwa.

Dengan demikian tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,9 % pertahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1971.

⁵⁾

Terjadinya kenaikan pertambahan penduduk ini disebabkan karena bertambahnya jumlah migrasi penduduk ke Sulawesi Tengah setiap tahun. Migrasi tersebut terdiri dari perpindahan pegawai negeri maupun swasta serta ABRI dari luar ke Sulawesi

- 3). *Bidang Pengendalian BAPPEDA Dati I Sulawesi Tengah*, Op. Cit. hal. 12, 14, 15, 16, 17, 21, 28, 30.
- 4). Kantor Sensus dan Statistik Dati I Sulawesi Tengah, *Sulawesi Tengah Dalam Angka 1976*, Palu 1977, hal. 47.
- 5). *Bidang Pengendalian BAPPEDA Dati I Sulawesi Tengah*, Ibid., Hal. 8.

Tengah disamping transmigrasi yang khusus dilaksanakan oleh pemerintah dari pulau Jawa dan Bali.

Selain itu penambahan penduduk juga disebabkan adanya angka kelahiran yang besar jumlahnya dibandingkan dengan angka kematian.

Bila dibandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah Sulawesi Tengah rata-rata kepadatan penduduk sebesar 18,95 jiwa per kilometer persegi.

Pemukiman penduduk sebagian besar terpusat disepanjang pantai (71,21 %) tersebar di pedalaman (17,15 %) termasuk pula suku terasing sekitar 30.000 jiwa dan selebihnya di daerah kepulauan (11,64 %).⁶⁾

Penduduk Sulawesi Tengah ini selain terdiri dari penduduk asli juga terdapat penduduk pendatang yang terdiri dari segala macam suku. Dari suku-suku pendatang ini terbanyak adalah suku Bugis, Makassar dan Mandar.

Selain itu terdapat juga suku Toraja, Gorontalo, Manado, Padang, Aceh, Ambon, Jawa, Sunda dan suku-suku lainnya dari wilayah Indonesia ini. Juga terdapat orang Cina, Arab dan lain-lain yang kebanyakan pedagang.

Khusus pendatang suku Bugis, Makassar dan Mandar merupakan kira-kira 80 % dari jumlah pendatang.

Sesungguhnya mereka itu sudah mendatangi daerah ini jauh sebelum agama Islam memasuki daerah Sulawesi Tengah dan masih berlangsung hingga saat ini.

Penduduk pendatang tersebut pada umumnya sudah berintegrasi baik dengan penduduk asli setempat, bahkan ada yang sudah kawin-mawin dengan penduduk asli dan sudah beranak-pinak. Bahkan kalau kita mengelilingi pesisir pantai Sulawesi Tengah di mana-mana penduduk dapat mempergunakan bahasa Bugis dan bahasa-bahasa di daerah ini banyak mempunyai persamaan dengan bahasa Bugis dan Mandar.

6). *Bidang Pengendalian BAPPEDA Dati I Sulawesi Tengah*, Op.

Cit, hal. 9

Suku Bugis, Makassar dan Mandar serta suku bangsa lain yang mendatangi daerah ini pada umumnya tertarik untuk hidup menetap justeru keadaan penghidupan, keadaan alam dan lingkungan terbuka lebar serta memudahkan mengembangkan usaha-usaha baik di bidang pertanian, dagang kecil-kecilan maupun sebagai tenaga kerja. \cong)

Selain dari penduduk pendatang tadi maka Sulawesi Tengah memiliki penduduk asli yang terdiri dari banyak suku dengan bahasa dan dialeknya masing-masing. Ada kurang lebih 22 suku asli yang ada di Sulawesi Tengah ini, di dalamnya terdapat suku-suku terasing yang terdiri pula dari kurang lebih 10 suku dan tersebar di 4 Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Suku-suku terasing itu adalah sebagai berikut :

1. Suku Lauje.
2. Suku Tajio.
3. Suku Pendau.
4. Suku Tolare.
5. Suku Raranggonau.
6. Suku Wana.
7. Suku Kohumama'on (Suku Kayumarangka).
8. Suku Loon.
9. Suku Sea-Sea.
10. Suku Daya.

Dari 22 jumlah bahasa daerah di Sulawesi Tengah yang paling banyak pendukungnya adalah bahasa Kaili yaitu 45 % dari penduduk Sulawesi Tengah. Asal bahasa ini dipakai oleh penduduk yang bertempat tinggal di daerah Lembah Palu dan sekitarnya sehingga biasa pula disebut Bahasa Palu. Dari 18 dialek dan sub dialek bahasa ini, dialek Palu pula yang menjadi bahasa pengantar bila mereka bertemu dan berbicara atau berkomunikasi antara dialek tersebut. Jadi sebagai bahasa pengantar di antara dialek

7). *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah*, Proyek P3KD tahun 1977/1978, hal. 41.

bahasa Kaili yang lain bahkan dengan bahasa-bahasa yang lain yang sekelompok, seperti bahasa Pamona yang disebut pula bahasa Poso. Hal ini ditambah pula oleh posisi dan peranan kota Palu selain sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah juga sebagai ibu kota Kabupaten Donggala dan Kota Administrasi Palu, penduduknya padat bila dibanding dengan tempat lain di Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1895 bahasa Palu hanya mempunyai 25.000 jumlah pemakainya dengan lokasi di pantai Selat Makassar sampai ke daerah Toli-Toli dan sekitar Teluk Tomini. Kalau dibanding dengan keadaan bahasa tersebut sekarang maka ternyata mempunyai perkembangan agak pesat dalam jumlah pemakai dan daerah persebarannya. Pada saat ini di lokasi kota Palu saja sudah memiliki \pm 70.000 pemakai yang terdapat pada Kecamatan Palu Barat dan Palu Timur serta daerah sekitarnya.

Jumlah pendukung bahasa Kaili ini yang terdiri dari 18 dialek sebanyak 335.075 orang belum termasuk lokasi pemakaian di luar daerah asal bahasa ini meluas sampai ke Una-Una, Tavallia, Ampana, Tojo, Poso Pesisir di Kabupaten Poso dan melebar sampai ke Kabupaten Buol Toli-Toli dan pada batas bahasa Gorontalo di Sulawesi Utara, kemudian bahasa yang ke dua ialah bahasa Pamona atau Poso. Bahasa-bahasa lain ialah bahasa Mori, Bungku, Saluan, Banggai, Balantak, Tomini, Toli-Toli, Buol, Pipikoro, Badan dan Napu. ⁸⁾

Suku bangsa dan logat.

Sejak tahun 1899 sampai tahun 1970 orang masih mengelompokkan Sulawesi Tengah ke dalam kelompok Toraja. Hal ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Albertus Chriatian Kruyt dan Adriani.

Sekarang ini apabila kita berbicara mengenai Toraja, otomatis pikiran orang akan melayang ke suatu lokasi di daerah Sulawesi

8). Masyhuddin Masyhuda. BA, *Perkembangan Kebudayaan di Sulawesi Tengah* 1981, hal. 29.

Selatan, yang di tahun-tahun akhir ini sering dipromosikan sebagai obyek wisata oleh Badan Kepariwisataaan dalam maupun luar negeri melalui media massa, majalah, surat kabar, brosur dan sebagainya.

Tulisan-tulisan dalam majalah maupun surat kabar tersebut menuntun pembacanya pada kesimpulan bahwa Toraja identik dengan Tanah Toraja di Sulawesi Selatan.

Dengan adanya dua pandangan seperti yang dinyatakan di atas yang sering kali membingungkan orang awam maupun cendekiawan yang berminat mengetahui lebih jauh mengenai Toraja.

Di Sulawesi Tengah terdapat bermacam-macam adat-istiadat rakyat. Perbedaan-perbedaan itu meliputi antara lain :

1. Pakaian.
2. Makanan khas.
3. Upacara sejak lahir hingga meninggal dunia.
4. Perumahan.
5. Sebagian dibedakan pula oleh bahasa (logat).

Berdasarkan perbedaan tersebut maka pembagian kelompok etnis adalah sebagai berikut :

1. *Orang Kaili. (Tokaili).*

Orang Kaili (Tokaili) mendiami sebagian besar daerah Kabupaten Donggala dan beberapa daerah di Kabupaten Poso dan Banggai.

Menilik bahasa yang mereka pergunakan maka orang Kaili terbagi atas :

- a. Orang Kaili yang berbahasa Kaili.
- b. Orang Kaili yang berbahasa Tomini.
- c. Orang Kaili yang berbahasa Dampelas.
- d. Orang Kaili yang berbahasa Balaesang.

Orang Kaili yang berbahasa Kaili mendiami wilayah-wilayah di Kabupaten Donggala terdapat pada Kecamatan-Kecamatan :

- Kecamatan Balaesang.
- Kecamatan Sindue.

- Kecamatan Sirenja.
- Kecamatan Tawaeli.
- Kecamatan Palu.
- Kecamatan Biromaru.
- Kecamatan Dolo.
- Kecamatan Maravola.
- Kecamatan Banava.
- Kecamatan Parigi.
- Kecamatan Ampibabo.

Orang Kaili yang mendiami daerah-daerah di Kabupaten Poso terdapat di Kecamatan :

- Una-Una.
- Poso Pesisir.
- Lage.
- T o j o.
- Ampana Kota.

Di Kabupaten Banggai terdapat sebagian orang Kaili yang berbahasa Kaili di Kecamatan Bunta. Mereka pada umumnya berasal dari Wani Mamboro, Kayumalue dan Tawaeli.

2. b. Orang Kaili yang berbahasa Tomini sehingga disebut pula Orang Tomini (Totomini), mendiami wilayah-wilayah di Kabupaten Donggala di :

- Kecamatan Moutong.
- Kecamatan Tomini.
- Kecamatan Tinombo.
- Kecamatan Ampibabo.

c. Orang Kaili yang menggunakan bahasa Dampelas terdapat di Kabupaten Donggala di Kecamatan Dampelas.

d. Orang Kaili yang mempergunakan bahasa Balaesang terdapat di Kecamatan Balaesang (Tanjung Manimbaya).

3. *Orang Kulavi (Tokulavi).*

Orang Kulavi mendiami wilayah Kabupaten Donggala. Menilik jenis bahasa yang mereka pergunakan maka kelompok

Kulavi di bagi atas:

- Orang Kulavi yang berbahasa Kaili Dialek Kulavi-Lindu.
- Orang Kulavi yang berbahasa Pipikoro.

Orang Kulavi yang berbahasa Kaili dialek Kulavi-Lindu mendiami wilayah Kabupaten Donggala di Kecamatan Kulavi sebelah Utara.

Orang Kulavi yang berbahasa Pipikoro mendiami wilayah Kabupaten Donggala di Kecamatan Kulavi sebelah Selatan.

4. *Orang Lore (Tolore).*

Orang Lore (Tolore) mendiami daerah Kabupaten Poso pada Kecamatan Lore Selatan. Menilik akan bahasa yang mereka pergunakan maka orang Lore terbagi atas:

- a. Orang Lore yang berbahasa Kaili dialek Tavailia.
- b. Orang Lore berbahasa Napu.
- c. Orang Lore berbahasa Bada.

Orang Lore yang berbahasa Kaili dialek Tavailia mendiami daerah Kecamatan Lore Utara sebelah Utara.

Orang Lore yang berbahasa Napu, mendiami sebagian besar daerah Kecamatan Lore Utara.

Orang Lore yang berbahasa Bada, mendiami daerah Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Utara bagian Selatan (Distrik Besoa).

5. *Orang Pamona (Topamora).*

Orang Pamona mendiami sebagian wilayah Kabupaten Poso. Bahasa mereka dinamai bahasa Pamona. Orang Pamona tersebut mendiami wilayah:

- Kecamatan Poso Kota.
- Kecamatan Poso Pesisir.
- Kecamatan Una-Una.
- Kecamatan Walea Kepulauan.
- Kecamatan Lage.
- Kecamatan Pamona Utara.
- Kecamatan Pamona Selatan.

- Kecamatan Ampana Kota.
- Kecamatan Ulubongka.
- Kecamatan Tojo.

6. *Orang Mori.*

Orang Mori ini mendiami daerah Kabupaten Poso di Kecamatan-Kecamatan Mori Atas, Lembo dan Petasia. Mereka menggunakan bahasa Mori.

7. *Orang Bungku (Tobungku).*

Orang Bungku adalah salah satu suku yang mendiami daerah Kabupaten Poso di Kecamatan-Kecamatan Bungku Utara, Bungku Selatan, Bungku Tengah, Menui Kepulauan. Mereka menggunakan bahasa Bungku.

8. *Orang Saluan.*

Orang Saluan mendiami daerah Kabupaten Banggai di Kecamatan-Kecamatan:

- Luwuk.
- Kintom.
- Batui.
- Lamala.
- Pagimana.
- Bunta.

Mereka mempergunakan bahasa Saluan.

9. *Orang Balantak.*

Orang Balantak mendiami daerah Kabupaten Banggai di Kecamatan-Kecamatan Balantak dan Lamala. Mereka pendukung bahasa Balantak.

10. *Orang Banggai.*

Umumnya orang Banggai mendiami daerah-daerah Kepulauan di Kabupaten Banggai. Tempat-tempat tersebut terdapat di Kecamatan-Kecamatan:

- Banggai.

- Liang.
- Bangkurung.
- B u l a g i.
- Tinangkung.
- B u k o.
- Totikum.

11. *Orang Buol.*

Orang Buol mendiami daerah Kabupaten Buol Toli-Toli, mereka mendiami Kecamatan-Kecamatan:

- Paleleh.
- Bunobogu.
- Momunu.
- Bokat.
- Biau.

Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Buol.

12. *Orang Toli-Toli.*

Orang Toli-Toli mendiami daerah-daerah Kecamatan:

- Toli-Toli Utara.
- G a l a n g.
- Baolan.
- D o n d o.
- Dampal Utara.
- Dampal Selatan.

Pada daerah Kabupaten Buol Toli-Toli, dan bahasa yang mereka gunakan bahasa Toli-Toli dan bahasa Buol.

13. Yang disebut suku-suku terasing ialah suku-suku yang menggunakan dialek dan sub dialek di antara bahasa (etnis) di atas yang terpercil karena sulitnya perhubungan. Suku-suku terasing yang dimaksud sebanyak 10 suku. (Lihat halaman).

Dalam pembagian tersebut kita tidak menemukan lagi kelompok Etnis yang disebut Toraja oleh sarjana-sarjana Barat pada akhir abad ke 19.

Apabila kita melihat peta konsifikasi penduduk Toraja yang dibuat oleh Dr. N.Adriani dan A.C.Kruyt dalam bukunya *De Barea Sprekende Toradja deel III tahun 1913* maka kelompok yang disebutnya kelompok Toraja Parigi-Kaili sekarang ini disebut kelompok Kaili saja, sedangkan yang disebut Toraja Barea sekarang ini disebut kelompok Pamona, yang lebih menarik lagi adalah kelompok yang disebutnya dengan Suku Sa'dang sekarang ini dikenal dengan nama Toraja.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penggunaan nama Toraja ini telah mengalami pergeseran. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani, menangkap ikan disamping berdagang dan mengumpulkan hasil hutan.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan bagi kehidupan rakyat Sulawesi Tengah, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian tercatat 75,03 % dari seluruh angkatan kerja.

Luas tanah pertanian menurut hasil sensus pertanian tahun 1973 menunjukkan sebesar 2.858,5 Km² (285.850 Ha) atau 4,2 % dari luas tanah keseluruhan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu itu berarti kepadatan sekitar 340 jiwa per Km² tanah pertanian yang masih sedikit dibandingkan dengan angka Jawa Barat (1.230 jiwa per Km²).

Pada tahun 1971 tercatat banyaknya penduduk yang bekerja di bidang pertanian untuk setiap kilometer persegi tanah pertanian rata-rata 85 orang dengan distribusi pemilikan tanah yang lebih merata jika dibandingkan dengan Propinsi lainnya (kini ratio tanah sawah 0,35 dan tanah kering 0,50). Prosentase petani menggarap yang kurang dari 0,5 Ha sebanyak 10 % antara 0,5 sampai 1 Ha sebesar 25 %, dan yang terbanyak antara 1 — 5 Ha sebanyak 57 % dari keseluruhan Petani, sedangkan yang lebih dari 5 Ha sebanyak 8 %.

Dari ke 4 (empat) Kabupaten, maka Dati II Donggala merupakan daerah yang memiliki luas areal persawahan yang terbe-

sar 52,57 % dari seluruh sawah se Sulawesi Tengah dengan potensi irigasi 59,27 % dari seluruh areal irigasi yang tersedia, dengan jumlah intensifikasi sebesar 66,67 % yang dilaksanakan di Dati II Donggala.

Peranan intensifikasi dalam menunjang produksi padi Sulawesi Tengah sangat besar, terlihat dengan adanya pertambahan jumlah produksi padi setiap tahunnya, disamping peranan pembaharuan/rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi serta penyebar luasan penggunaan bibit unggul baru. Semua usaha tersebut menunjukkan perkembangan yang berarti, namun masih memerlukan peningkatan untuk menunjang pula tujuan pembangunan. Kios sarana produksi yang menurut catatan tahun 1977/1978 berjumlah 98 buah antara lain 95 buah berada di Dati II Donggala dan 3 buah berlokasi di Dati II Poso.

Dari tabel-tabel yang disajikan mengenai tanaman bahan makanan penting secara keseluruhan menunjukkan peningkatan, baik areal luas panen maupun produksinya. Padi yang merupakan bahan makanan utama bagi masyarakat menunjukkan kenaikan sebesar 266.912,84 ton atau 3,2 % pada tahun 1977 dibanding dengan keadaan tahun 1966 dengan ketambahan luas areal sebesar 9,94 %. Sedangkan menurut angka sementara tahun 1978 menunjukkan bahwa produksi padi menurun sebesar 0,69 %, tetapi rata-rata produksi Kwintal/Ha padi tahun 1977 menjadi 24, 63 Kw/Ha atau sebesar 6,9 % dibanding tahun 1976. Untuk tanaman bahan makanan lainnya secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 8,13 % pada tahun 1977 dibanding tahun sebelumnya, sedangkan menurut angka sementara tahun 1978 produksi menurun sebesar 26,90 %.

Usaha sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah selain sebagai petani sawah/ladang, juga sebagai petani kelapa. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokultura yang banyak dimiliki oleh penduduk sebagai penghasilan utama Daerah Sulawesi Tengah, yang setiap tahunnya menunjukkan perkembangannya, maupun peningkatan jumlah produksinya.

Dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1978 rata-rata jumlah produksi meningkat sebesar 1,20 % dengan perkembangan luas areal sebesar 2,28 % setiap tahunnya.

Akhir-akhir ini masyarakat luas mulai pula berorientasi dalam penanaman cengkeh secara besar-besaran yang meliputi Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli, Daerah Tingkat II Donggala dan Daerah Tingkat II Poso. Yang paling menonjol di antaranya adalah Dati II Buol Toli-Toli baik areal perkebunannya maupun jumlah produksinya. Sedangkan di Dati II Donggala dan Poso selain arealnya masih kurang juga masih merupakan tanaman muda yang belum banyak berproduksi.

Adat-istiadat.

Oleh karena Sulawesi Tengah dihuni demikian banyak suku, maka dalam pelaksanaan adat-istiadatnya terdapat pula keaneka ragaman.

Namun terdapat perbedaan tapi pada umumnya pelaksanaan adat itu dapat ditemukan kesamaan dalam waktu-waktu pelaksanaannya.

Umumnya upacara pelaksanaan adat itu dilaksanakan dalam hubungannya dengan :

a. Upacara yang berhubungan dengan hidup, mulai dari masa hamil sampai melahirkan, upacara inisiasi sampai dewasa, peminangan, perkawinan, penyembuhan orang sakit dan upacara kematian (penguburan).

b. Upacara dalam bidang pertanian/pengolahan tanah sampai pada pemetikan hasil (panen).

Ada beberapa tempat yang menyambut masa panen ini dengan melakukan upacara sukuran (pesta kampung) di mana penghasilan rakyat kampung tersebut dipersiapkan untuk menyambut pesta panen kampung (secara masal oleh masyarakat kampung). Adakalanya pada masa-masa inilah banyak yang melangsungkan pesta perkawinan, khitanan (sunat) dan sebagainya.

Di daerah Lembah Palu dan sekitarnya pesta panen (sukur-

an) ini disebut *vunja*.

c. Dalam pelaksanaan pemerintahanpun ditemui tata pemerintahan secara adat di mana Baligau (istilah pada suku Kaili) berperan sebagai pemangku adat yang memahami seluk-beluk adat dalam pemerintahan.

Karena pada masa dahulu banyak kerajaan di Sulawesi Tengah ini, maka semua kerajaan itu diperintah oleh raja dengan bantuan Dewan Hadatnya masing-masing.

d. Dalam tata pergaulan hidup baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat luas berlaku yang muda harus menghormati pada yang lebih tua.

Adalah merupakan pantangan besar anak menyebut nama orang tua, menantu menyebut nama mertua. Sehingga yang lazim dipergunakan adalah panggilan atau gelaran *Mangge si Dei* (Upik) atau *si Olo* (Buyung) atau *Toma Dei* (ayah si Upik) atau *Toma Olo* (ayah si Buyung), *Tina Dei* (ibu si Upik) atau *Tina Olo* (ibu si Buyung).

Sopan santun pergaulan kekerabatan diatur oleh tatakrama sosial yang diadatkan dalam rangka saling menghargai, memelihara norma-norma sosial dan menyangkut kepercayaan. Dalam pergaulan muda-mudipun adat mengatur dengan ketat dan apabila terjadi pelanggaran adat maka pihak laki-laki akan dikenakan denda adat, umpamanya didenda dengan seekor domba, kambing, sapi atau kerbau dan sebagainya tergantung pada besar kecilnya pelanggaran yang diperbuat. Istilah yang dipakai di Lembah Palu dan sekitarnya denda dengan memberikan hewan seperti tersebut di atas disebut *Nigivu*.

Disamping itu juga dalam memulai segala kerja selalu ada upacara-upacara adatnya seperti membangun rumah, menaiki rumah baru, membuka perladangan dan sebagainya.

Sesuai dengan maksud dan tujuan serta suasana pelaksanaan upacara adat yang dilakukan maka masing-masing suku inipun mempunyai pakaian adat dan alat-alat upacara adatnya masing-masing.

Pada umumnya alat upacara yang pokok (inti) adalah dupa/ke-
menyan, tempat sesajen dan bermacam-macam bahan sajian
yang selalu digunakan pada setiap upacara.

C. MASA SEBELUM KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI SULAWESI TENGAH.

Pada umumnya pemerintahan di daerah Sulawesi Tengah sebelum Belanda masuk dan berkuasa, berbentuk kerajaan yang demokratis berdasarkan musyawarah/mufakat. Para raja sebagai pejabat/penguasa tertinggi dalam melaksanakan tugas pemerintahan di daerahnya masing-masing didampingi/dibantu oleh Dewan Hadat yang berwenang memilih, menobatkan dan memakzulkan raja apabila raja melanggar ketentuan hukum adat atau raja tersebut tidak sanggup menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Adapun sebutan raja dan nama Dewan Hadat pendampingnya di tiap-tiap daerah kerajaan yang ada di daerah Sulawesi Tengah sebelum Belanda masuk berbeda satu dengan lainnya.

Sebagai contoh hanya disebutkan beberapa kerajaan yang ada pada masing-masing Kabupaten yang datanya ditemukan di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah sekarang ini.

1. Kabupaten Buol Toli-Toli.

Kerajaan Buol, dengan penguasa tertinggi disebut raja, disebut Turungku. Pendampingnya merupakan suatu Dewan Menteri disebut *Bokid*, terdiri dari 4 (empat) orang berasal dari 4 (empat) kota/distrik yang mula-mula membentuk kerajaan Buol pertama, masing-masing disebut :

- a. Raja juga disebut Mufti (pengaruh Islam) dari Distrik Biau.
- b. Jogugu juga disebut Kadhi (pengaruh Islam) dari Distrik Tongon.
- c. Kapitan Laut juga disebut Hakim (pengaruh Islam) dari Distrik Bunobogu.
- d. Wukum atau Tau Doka juga disebut Naib (pengaruh Islam) dari Distrik Talaki.

Musyawarah Dewan Menteri (*Bokid*) untuk melahirkan suatu peraturan hukum adat yang berlaku dalam negeri/kerajaan

disebut *Bokidu*.¹⁰⁾

2. Kabupaten Donggala.

Kerajaan Banawa dengan penguasa tertinggi disebut raja, disebut Makagili alias Pui Mpudu bertempat tinggal di Pantoloan. Pendampingnya disebut Dewan Hadat Pitunggota (tujuh kota) terdiri dari 7 (tujuh) orang, berasal dari 7 (tujuh) kota/kampung yang mula-mula membentuk kerajaan Banawa masing-masing disebut :

- a. Madika Malolo (Wakil Raja).
- b. Madika, atua (Perdana Menteri).
- c. Punggawa (Menteri Dalam Negeri).
- d. Galara (Menteri Kehakiman).
- e. Tadulako (Menteri Pertahanan dan Keamanan).
- f. Pabicara (Menteri Penerangan).
- g. Sabandara (Menteri Perhubungan Laut).

Adapun kota-kota dari Pitunggota kerajaan Banawa adalah:

- a. Ganti.
- b. Lero.
- c. Kabonga.
- d. Toaya.
- e. Kola-kola.
- f. Fowale.
- g. Gunung Bale.

Kerajaan Sigi, penguasa tertinggi disebut Magau. Magau yang memerintah pada waktu itu adalah Karanja Lembah (Toma I Dampo). Pendampingnya juga disebut Dewan Hadat Pitunggota yang susunannya sama dengan apa yang terdapat di kerajaan Banawa tersebut di atas, hanya kota-kotanya adalah :

10). Hasil wawancara dengan Bapak T.Kawandaud di Kampung Besusu, Kecamatan Palu, Kabupaten Donggala tgl. 7 September 1977.

- a. Dolo.
- b. Bangga
- c. Biromaru
- d. Kulawi
- e. Sibalaya.
- f. Sidondo.
- g. Pakuli.

Kerajaan Palu dengan penguasa tertinggi yang disebut Magau.

Magau yang memerintah pada waktu itu adalah Yojokodi. Pendampingnya disebut Dewan Hadat Patanggota (empat kota) yang terdiri dari 4 (empat) kota/kapung yang mula-mula membentuk kerajaan Palu yang masing-masing disebut :

- a. Punggawa (Menteri Dalam Negeri).
- b. Pabicara (Menteri Penerangan).
- c. Baligau (Menteri Luar Negeri).
- d. Galara (Menteri Kehakiman).

Adapun kota-kota Patanggota kerajaan Palu adalah:

- a. Kampung Baru.
- b. Kampung Siranindi (sekarang disebut Kamonji).
- c. Kampung Lere.
- d. Kampung Besusu.

Kerajaan-kerajaan lain yang penguasa tertingginya disebut Magau dan pendampingnya disebut Dewan Hadat Patanggota adalah :

Kerajaan Tawaeli. Magau yang memerintah pada waktu itu bernama Jaenglangkara. Kota-kotanya ialah:

- a. Kampung Nupabomba.
- b. Kampung Lambara.
- c. Kampung Mpanau.
- d. Kampung Baiya.

Kerajaan Parigi. Magau yang memerintah pada waktu itu bernama Ijengi Ntonambaru (Raja Perempuan). Kota Patanggotanya adalah :

- a. Kampung Parigi Mpuu.

- b. Kampung Masigi.
- c. Kampung Toboli.
- d. Kampung Dolago. ¹¹⁾

Kerajaan Kulawi. Magau yang memerintah pada waktu itu bernama Intovoa Langi (Toma I Torengke). Kota Patanggotanya adalah :

- a. Kampung Bolapapu.
- b. Kampung Mataue.
- c. Kampung Sungku (Hungku).
- d. Kampung Boladangko. ¹²⁾

Untuk menentukan peraturan hukum adat yang berlaku dalam pemerintahan kerajaan, raja atau magau bersama-sama dengan anggota Dewan Hadatnya Pitunggota atau Patanggota berkumpul dan bermusyawarah di suatu tempat yang disebut *Baruga* (Balai Adat) atau *Bantaya*.

Biasanya selain raja/magau dan anggota Dewan Hadatnya diundang juga para orang tua yang dianggap banyak mengetahui peraturan-peraturan hukum adat yang telah ada sebelumnya dan telah ditaati turun-temurun di suatu daerah tertentu dan telah melembaga.

Di Baruga atau Bantaya itulah mereka bermusyawarah membicarakan *Ada Nungata* atau *Kagaua Ringata* (peraturan hukum dalam negeri/kerajaan), sampai berhari-hari lamanya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan hasil musyawarah yang telah disepakati (nisintuvui) tersebut dinamakan *Sintuvu Nungata* (bersetujuan bersamanegeri).

Peraturan hukum adat negeri (Sintuvu Nungata) yang telah disepakati bersama inilah yang dijadikan peraturan/undang-undang/pedoman menjalankan pemerintahan kerajaan, yang mengatur

-
- 11). Hasil wawancara dengan Mpongisi Podo di Parigi, Kabupaten Donggala pada tanggal 7 Oktober 1978.
 - 12). Hasil wawancara dengan H.Ngenta Djiloi di Kulawi, Kabupaten Donggala tgl. 5 Nopember 1978.

segala aspek hidup dan kehidupan masyarakat pada umumnya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Peraturan hukum adat negeri/kerajaan ini meskipun tidak tertulis seluruh anggota masyarakat mengetahui dan mematuhi-nya. Sangsi-sangsi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok kecil dari anggota masyarakat telah ditentukan pula menurut kadar besar kecilnya pelanggaran dan tingkatan/golongan orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

3. Kabupaten Poso.

Kerajaan Pamona dengan penguasa tertinggi disebut *Karaja*. Pembantu *Karaja* (*Datu*) adalah:

- a. *Mokole*.
- b. *Kabose*.
- c. *Palili*.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Bapak S.Tobogu, kerajaan Pamona ini terdiri dari daerah-daerah yang didiami oleh kelompok-kelompok suku, di antaranya yang dapat disebutkan di sini adalah:

- | | | |
|--------------|----------------|---------------------|
| 1. Lamusa. | 7. Wingkemposo | 12. Torau |
| 2. Palande | (Poso Pesisir) | 13. Tolalao |
| 3. Ondae | 8. Pebato | 14. Tovavondoda |
| 4. Pada | 9. Longkea | 15. Totino'e |
| 5. Lage | 10. Tobuyu | 16. Torompu |
| 6. Kadombuku | 11. Topayapi | 17. Totamungkurede. |

Karena kerajaan Pamona ini mendapat pengaruh dari kerajaan Luwu (Palopo) di Sulawesi Selatan, maka menurut keterangan dari Bapak Wongko di Lembah Talasa hanya 3 (tiga) kelompok suku yang diakui oleh *Datu Luwu* dengan pusat pemerintahannya di Waibunta, dan bentuk pemerintahannya yang disebut *Karaja* serta penguasa tertinggi juga disebut *Karaja* atau *Mokole*.

Tiga kelompok suku dengan bentuk pemerintahan *Karaja* tersebut adalah :

1. Karaja Palande di Landeandopo bernama Tangkotee.
2. Karaja Onda'e di Tandombeaga bernama Lateka.
3. Karaja Pebato di Tamungku bernama Tanambo. ¹³)

Susunan pemerintahan kelompok-kelompok suku tersebut di atas menurut keterangan dari Bapak S.Walenta adalah sebagai berikut:

1. Karaja (Mokole).
2. Witi Mokole.
3. Pasule.
4. Palakati.

Mokole ini laki-laki disebut *Mokole Langkai*, dan kalau dia seorang wanita disebut *Jouboki*.

Datu Pamona terakhir dinobatkan secara hukum adat di Landeandopo dihadiri oleh Datu Luwu dan juga oleh 3 (tiga) orang Mokole bersama stafnya dari 3 karaja tersebut di atas ini namanya Balongka di Pamona Selatan. ¹⁴)

Kerajaan Mori dengan penguasa tertinggi disebut Mokole (Datu). Pendamping Mokole disebut:

1. Bonto (sebagai Perdana Menteri).
2. Karua (sebagai Penghubung).
3. Mokole Mpalili (Orang tua kampung).

Mokole yang memerintah pada waktu itu adalah Marundu II yang mendapat gelar dari rakyat/orang banyak *Daturitana*.

Kerajaan Mori ini juga terdiri dari sejumlah kelompok-kelompok suku yang tadinya sering berperang satu sama lainnya. Nanti pada masa pemerintahan Marundu II ini mereka dapat dipersatukan menjadi kuat dan dapat mengadakan perlawanan terhadap Belanda pada waktu masuk pertama kali di daerah ini pada ta-

3). Hasil wawancara dengan Bapak ;S.Tobogu bersama Bp. W.L. Talasa di Poso Kota, Kabupaten Poso tgl. 15 Nopember 1977.

4). Hasil wawancara dengan Bp. S.Walenta di Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tgl. 14 Nopember 1977.

hun 1907. ¹⁵⁾

Kerajaan Lore dengan penguasa tertinggi disebut Magau. Magau yang memerintah pada waktu itu bernama Sandota (Umana Mpolite).

Pendamping/pembantu Magau adalah:

1. Biti Magau.
2. Kapal.
3. Pasule.

Kerajaan Lore ini dahulu disebut Pekurehua (Napu) yang terdiri dari 4 (empat) daerah Lembah, masing-masing lembah Tawailia (Sedoa), lembah Pekurehua (Napu), lembah Besoa dan lembah Bada. Kelompok suku yang mendiami 4 (empat) daerah lembah inilah yang membentuk kerajaan Lore yang kita kenal kemudian. ¹⁶⁾

Yang menjadi peraturan, undang-undang dan pedoman menyelenggarakan pemerintahan kerajaan di daerah Poso sebelum Belanda masuk adalah *Adantana* (Adat Negeri = peraturan negeri). Sama halnya dengan apa yang berlaku di dalam kerajaan-kerajaan di daerah Buol Toli-Toli dan daerah Donggala pada waktu itu. *Adantana* ini adalah hasil keputusan Musyawarah para Datu/Magau dengan para pembantunya dan juga oleh para pemimpin kelompok suku yang mula-mula membentuk sebuah kerajaan tertentu pada waktu itu yang telah disepakati menjadi sintuvu (hidup bersama atas dasar kesamaan kehidupan). ¹⁷⁾

Adantana ini meskipun tidak tertulis, diketahui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat turun-temurun dan telah me-

-
- 5). Hasil wawancara dengan Bp. Pirau Marundu di Palu, Kabupaten Donggala tgl. 8 Nopember 1977.
 - 6). Hasil wawancara dengan Bp. Ishak Tokare di Kampung Lawangan, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso tgl. 14 Nopember 1977.
 - 7). Kruyt, Jan: *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1977, hal.71

lembaga, yang mengatur segala aspek hidup dan kehidupan pada umumnya baik sebagai orang seorang maupun sebagai anggota masyarakat.

4. *Kabupaten Banggai.*

Penguasa tertinggi di kerajaan Banggai sebelum Belanda masuk dan berkuasa disebut raja. Para pendamping/pembantu raja disebut Basalo Sangkap (Basalo = Besar, Sangkap = Empat). Basalo Sangkap (Empat Besar) selaku Dewan Hadat pembantu raja di ambil dari pimpinan/kepala 4 (empat) buah kampung yang mula-mula membentuk kerajaan Banggai lama.

Empat buah kampung tersebut adalah :

1. Kampung Tanobonunungan.
2. Kampung Doduung.
3. Kampung Mongsongan.
4. Kampung Gong-gong.

Basalo Sangkap ini mempunyai wewenang memilih, menobatkan dan menurunkan raja dari tahtanya bila raja menyeleweng dari ketentuan Hukum Adat yang telah menjadi peraturan/undang-undang dalam negeri/kerajaan atau apabila raja tersebut tidak sanggup lagi melaksanakan tugas dengan baik.

Menurut Drs. Abdul Aziz Larekeng dalam bukunya berjudul "*Memori Bupati Kepala Daerah Banggai*" tahun 1973, halaman 2 dan 3, bahwa struktur Pemerintahan kerajaan Banggai setelah mendapat pengaruh dari ke Sultanate Ternate adalah sebagai berikut :

1. Penguasa tertinggi disebut raja.
2. Pembantu raja untuk menjalankan pemerintahan kerajaan ditunjuk langsung oleh raja disebut Komisi Empat (sebagai Badan Eksekutif) dengan urutan pangkatnya sebagai berikut:
 1. Mayor Ngofa.
 2. Kapitan Laut.
 3. Hukum Tua.
3. Basalo Sangkap (sebagai Badan Legislatif) dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Basalo Mongsongan.

- b. Basalo Gong-gong.
- c. Basalo Tanobonunungan.
- d. Basalo Doduung.

Struktur pemerintahan kerajaan Banggai terdiri dari:

1. Raja.
2. Komisi Empat.
3. Basalo Sangkap.

Seperti tersebut di atas, struktur sudah ada sejak masa pemerintahan raja Mandapar (\pm 1600 – 1630) sampai dengan masa pemerintahan raja Abdul Azis Haji (\pm 1880 – 1900) yang merupakan raja terakhir di kerajaan Banggai sebelum Belanda masuk.

Menurut keterangan dari Bapak Sulaeman Amir Haji, Belanda masuk wilayah kerajaan Banggai pertama kali pada hari Senin pagi tanggal 1 Juli 1908 disertai dengan 2 (dua) brigade Marsose (tentara Belanda) di bawah pimpinan Komandan Bag.¹⁸⁾

D. AWAL KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH SULAWESI TENGAH

Menurut riwayat/sejarah pada awal abad ke 17 bangsa Spanyol dan bangsa Portugis telah datang ke daerah Sulawesi Tengah sebelum datangnya bangsa Belanda (VOC).

Kedatangan bangsa Spanyol dan bangsa Portugis ke daerah ini dibuktikan dengan adanya beberapa benda peninggalan seperti bekas bangunan (benteng), meriam, topi perang dan lain-lain sebagainya pada beberapa tempat di Sulawesi Tengah.

Sepeninggal bangsa Spanyol dan bangsa Portugis sekitar tahun 1663, pada tahun 1667 bangsa Belanda (VOC) mulai datang dan mengadakan kontak dengan raja-raja yang ber-

18). Hasil wawancara dengan Bp. Sulaeman Amir Haji di Kecamatan Luwuk Kota, Kabupaten Banggai tgl. 22 September 1978.

kuasa di kerajaan Donggala Tawaeli dan Parigi dengan maksud mencari emas. ¹⁹⁾

Pada tahun 1850 ekspedisi Belanda yang terdiri dari 2 (dua) buah kapal bernama *Argo* dan *Bromo* dipimpin oleh Kapten C. Van den Hart datang di Parigi dan menyodorkan Plakat Panjang pada Magau Parigi Iskandar Abd. Muhammad untuk ditanda tangani.

Sesudah itu utusan Gubernur dari Makassar (Ujung Pandang) datang ke Sulawesi Tengah membawa dan menyodorkan kontrak pengakuan kepada kekuasaan pemerintah Belanda pada raja Kaili (Banawa, Palu dan Tawaeli).

Raja-raja yang berkuasa di daerah-daerah tersebut di atas, meskipun telah menanda tangani kontrak pengakuan, tidak menghiraukannya dan bahkan tak mau mematuhi.

Akibatnya pada tahun 1888 Gubernur dari Makassar datang membawa pasukan tentara Belanda dengan tiga buah kapal perang.

Tekanan *tembakan* dan tiga buah kapal perang di pantai Kayumalue yang memakan banyak korban manusia, memaksa raja (magau) Tawaeli Yangge Bodu (Toma I Tanggu) menanda tangani Penyerang Panjang baru pada tanggal 26 Juni 1888.

Mulai saat itulah para raja yang membangkang dan tak mau mengakui kekuasaan Belanda atas wilayahnya disuruh menanda tangani kontrak-kontrak pengakuan kekuasaan tersebut.

Para raja yang tetap mematuhi perjanjian/kontrak pengakuan kekuasaan Belanda atas wilayahnya tidak diadakan pembaharuan/penanda tanganan kembali kontrak-kontrak pengakuan kekuasaan itu.

Di bawah ini secara berturut-turut disebut raja-raja yang menanda tangani kontrak/perjanjian pengakuan kekuasaan Be-

19). Drs.J.Visser dan Ny.S.Kadoawu.BA, *Sejarah Kebudayaan Suku-suku di Sulawesi Tengah*, Lembaga Penelitian Studi GKST, Tentena 1978, hal. 1

landa atas wilayah-wilayah kerajaan di daerah Sulawesi Tengah yang dikutip dari buku *Midedeelingen van de Afdeeling Bestuurs Zaken der Buiten Gewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuurs Serie A* nomor 3.

Tanggal 5 Juli 1858, Bantilan Syafiuddin Raja Toli-Toli menanda tangani Plakat Panjang.

Tanggal 15 Agustus 1858, Muhammad Nur Aladin, Raja Buol menanda tangani Plakat Panjang.

Tanggal 31 Agustus 1864, Sirajuddin, Raja Buol, menanda tangani Plakat Panjang.

Tanggal 31 Agustus 1864, Sirajuddin, Raja Buol, menanda tangani perjanjian pengakuan kekuasaan kerajaan Belanda.

Tanggal 14 Desember 1867, Abdul Hamid, Raja Toli-Toli, menanda tangani pengakuan kekuasaan kerajaan Belanda.

Tanggal 11 Desember 1887, La Riau, raja Tojo, menanda tangani Plakat Panjang. Karena membangkang diulangi lagi penanda tanganannya pada tanggal 25 Mei 1897.

Tanggal 1 Mei 1888, Yojokodi (Toma I Sema), Magau Palu, menanda tangani Plakat Panjang dengan akte pengakuan pada kekuasaan Belanda.

Tanggal 2 Mei 1888, Makkagili, Raja Banawa, menanda tangani Plakat Panjang.

Tanggal 26 Juni 1888, Yangge Bodu (Toma I Tanggu), Magau Tawaeli, menanda tangani Plakat Panjang.

Tanggal 4 Agustus 1888, Gaweda, Raja Poso Bawah, Ulite Bunga Sawak dan Bengka ke duanya raja yang berkuasa di daerah Poso disuruh menanda tangani kontrak pengakuan kekuasaan Belanda.

Tanggal 13 Desember 1890, Patrah Turungku, Raja Buol. menanda tangani Plakat Panjang dan akte pengakuan pada kekuasaan Belanda.

Tanggal 8 Agustus 1891, Magau Biromaru bersama Dewan Hadatnya disuruh menanda tangani perjanjian pengakuan kekuasaan pemerintah Belanda.

Tanggal 9 Agustus 1891, Magau Sigi bersama Dewan Hadatnya disuruh menanda tangani perjanjian pengakuan kekuasaan pemerintah Belanda.

Tanggal 14 Agustus 1891, Madika (Magau) Dolo bersama Dewan Hadatnya disuruh menanda tangani perjanjian pengakuan kekuasaan pemerintah Belanda.

Tanggal 27 Agustus 1895, Patrah Turungku, Raja Buol, menanda tangani Plakat Panjang.

Tanggal 29 Mei 1897, Ijengi Ntonambaru, Magau Parigi, disuruh menanda tangani Plakat Panjang dengan perjanjian mengadakan hubungan dan pengakuan kedaulatan Belanda sehingga dengan perjanjian ini raja/magau Parigi makin dikuasai lagi.

Tanggal 27 Pebruari 1899, Garuda alias Ta'urungi (Papa I Tapulu) sebagai Kabose Poso, menanda tangani kontrak pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.

Penanda tangan perjanjian/kontrak pengakuan terhadap kekuasaan Belanda atas wilayah-wilayah kerajaan oleh raja/magau masing-masing tersebut di atas, tak lama kemudian disusul dengan penempatan aparat/pejabat pemerintah Hindia Belanda di tempat-tempat itu yang disebut kontrolieur atau gezaghebber.

Untuk menjaga keamanannya para kontrolieur atau gezaghebber yang ditempatkan itu diikuti oleh sejumlah pasukan tentara Belanda yang disebut Marsose, terutama di daerah-daerah kerajaan yang rajanya melawan/membanggang terhadap pemerintah Belanda.

E. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PROPINSI DATI I SULAWESI TENGAH.

Sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai seluruh wilayah Sulawesi Tengah pada tahun 1908, daerah ini terdiri dari daerah-daerah kerajaan, masing-masing berada di bawah pemerintahan seorang raja atau magau.

Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang Asisten Residen pertama di Donggala bernama M. J.H. Engelenberg.

Setelah pemerintahan Hindia Belanda menguasai seluruh daerah ini maka kekuasaan Belanda atas daerah Sulawesi Tengah dikendalikan dari 3 tempat dan daerah Sulawesi Tengah dibagi tiga bagian pula yaitu :

1. Sulawesi Tengah Bagian Barat, masuk wilayah kekuasaan pemerintahan Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar (Ujung Pandang).
2. Sulawesi Tengah bagian Tengah/Teluk Tomini, masuk wilayah kekuasaan pemerintah Residen Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado.
3. Sulawesi Tengah bagian Timur/Teluk Tolo, masuk wilayah kekuasaan Residen Sulawesi Timur yang berkedudukan di Dau-Dau.

Pada tahun 1919 daerah Sulawesi Tengah yang diperintah dari tiga tempat tersebut di atas disatukan pusat pemerintahannya yaitu masuk wilayah kekuasaan pemerintahan Residen Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado.

Pada saat itu daerah Sulawesi Tengah dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Afdeeling Donggala dengan ibu kota Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kota Poso. Asisten Residen pertama di Poso ialah Egobe, bekas Asprant Kontrolieur di Tentena.

Afdeeling Donggala terdiri dari 4 Onder Afdeeling, 9 daerah kerajaan (Landschep) dan Afdeeling Poso terdiri dari 3 Onder Afdeeling, 7 daerah kerajaan (Landschap).

Jadi Sulawesi Tengah sejak dari tahun 1919 sampai dengan awal

tahun 1942 (sebelum Jepang datang berkuasa) terdiri dari 2 Afdeeling, 7 Onder Afdeeling dan 16 daerah kerajaan otonom (Zelfbestuur Landschepen). Kerajaan Buol masuk wilayah kekuasaan Afdeeling Gorontalo.

Tahun 1948 daerah Sulawesi Tengah menjadi satu daerah otonom dengan kedudukan Kepala Daerah R.M.Poesadan di ibu kota Poso.

Pada tahun 1951 daerah Sulawesi Tengah dibagi lagi menjadi 2 daerah otonom, yaitu Kabupaten Poso ibu kota Poso dan Kabupaten Donggala ibu kota Donggala.

Berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1959, daerah Sulawesi Tengah dibagi lagi menjadi 4 Kabupaten masing-masing :

1. Kabupaten Donggala dengan ibu kota Palu.
2. Kabupaten Buol Toli-Toli dengan ibu kota Toli-Toli.
3. Kabupaten Poso ibu kota Poso.
4. Kabupaten Banggai dengan ibu kota Luwuk.

Pada tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 47 tanggal 13 Desember 1960 Lembaran Negara 151/1960 lahirlah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dengan ibu kota Manado. Di daerah Sulawesi Tengah ditempatkan seorang Residen Koordinator yang dijabat oleh R.M. Kusnodhanupoyo.

Tahun 1964. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 47 tersebut di atas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1964 tanggal 13 Pebruari 1964, Lembaran Negara 7/64 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi ke 4 wilayah Kabupaten yang ada.

Dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1964 tanggal 13 April 1964 secara resmi berdasarkan Undang-Undang tersebut berdirilah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Tanggal 13 April 1964 itulah dinyatakan sebagai hari lahirnya Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang telah ke 17 kalinya diperingati oleh rakyat dan pemerintah daerah

Sulawesi Tengah pada tanggal 13 April 1981.

Adapun para Gubernur dan pejabat Gubernur yang pernah memimpin daerah Sulawesi Tengah sejak mulai didirikan pada tanggal 13 April 1964 hingga sekarang ini ialah:

1. Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning, 13 April 1964 sampai dengan tanggal 13 April 1968.
2. Kolonel Muhammad Yasin, 13 April 1968 sampai dengan tanggal 25 April 1973.
3. Brigadir Jenderal A.M. Tambunan, 25 April 1973 sampai dengan tanggal 28 September 1978.
4. Brigadir Jenderal Moenafri. SH, 28 September 1978 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1979.
5. Kolonel Eddy Djadjang Djajaatmadja (Pejabat Gubernur), 22 Oktober 1979 sampai dengan tanggal 25 Nopember 1980.
6. Mayor Jenderal Haji Eddy Sabara (Pejabat Gubernur), 25 Nopember 1980 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 1981.
7. Drs. Haji Galib Lasahido, 19 Pebruari 1981 sampai sekarang.
20).

20) *Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah*, 17 tahun Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 1981, hal. 19, 21, 22, 25, 26, 29.

BAB. II

TIMBULNYA PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI DAERAH SULAWESI TENGAH

Untuk membicarakan sejarah timbulnya perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu lebih dahulu diketahui bangsa-bangsa asing mana saja yang pernah datang dan menjajah bangsa Indonesia, khususnya mereka yang datang ke daerah Sulawesi Tengah.

Menurut riwayat/sejarah yang diceriterakan oleh para orang tua dahulu, bangsa Portugis dan Spanyol pernah datang ke daerah Sulawesi Tengah sebelum datangnya bangsa Belanda.

Bangsa Spanyol diduga datang ke daerah Sulawesi Tengah pada awal abad ke 17 dan sempat mendirikan sebuah faktori di Parigi. Pada tahun 1663 mereka meninggalkan Parigi karena tidak mendapatkan beras lagi dari Ternate. 1)

Juga disebut bahwa bangsa Spanyol ini membangun sebuah benteng di Parigi. Tahun berapa dan di mana benteng tersebut didirikan tidak begitu diketahui lagi oleh orang-orang yang hidup sekarang ini. Diperkirakan benteng tersebut dibangun pada suatu tempat yang sekarang ini disebut kampung Loji di dekat pelabuhan Parigi.

Di wilayah Kabupaten Banggai banyak diketemukan topi yang pernah dipakai oleh tentara Spanyol berperang zaman dahulu yaitu di daerah Banggai kepulauan dan di Lengketeng. Topi perang ini sekarang dapat kita saksikan di rumah keluarga Drs. Lahmadi Mangas di Luwuk atau di gedung Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (PSK) Palu.

1) Drs. J. Visser dan Ny. S. Kadoawu BA, Sejarah Kebudayaan Suku-suku Sulawesi Tengah, Lembaga Penelitian Studi GKST, Tentena 1978, hal. 3.

Benda-benda peninggalan bangsa Portugis di daerah Sulawesi Tengah berupa meriam-meriam yang dibuat dari tembaga dan besi dalam bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Benda-benda serupa terdapat di Donggala, Buol, Toli-Toli, Taweli, Parigi, Luwuk, Banggai, Lingketeng dan beberapa kota lainnya.

Di Banggai kepulauan sekarang ini masih dapat kita saksikan bekas sebuah benteng Portugis di tepi pantai yang di dalamnya oleh penduduk setempat telah dibangun rumah-rumah tempat tinggal mereka.

Apa maksud dan tujuan utama kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke daerah Sulawesi Tengah tidak banyak diketahui orang.

Menurut informasi dari Cornelis Sapa, Penilik Kebudayaan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bunta (Kabupaten Banggai) suku terasing di hutan kayu marangka (suku Kohumama'on di hutan kuhumama) yang mendiami daerah pegunungan Lingketeng adalah keturunan Portugis. Ciri-ciri badan mereka adalah tinggi, besar hidung mancung, kulit putih, sebagian rambutnya pirang, pelipis menonjol dan mukanya memanjang (lonjong).

Pada tahun 1667 bangsa Belanda (VOC) sudah mulai mengadakan kontak dengan penduduk yang menempati daerah Lembah Palu dan sekitarnya seperti Donggala, Tawaeli dan juga di Parigi. Mereka berusaha mendekati raja-raja yang berkuasa di daerah-daerah tersebut di atas. Sebagai suatu organisasi dagang yang semata-mata mencari keuntungan materi maka VOC menurut riwayat datang ke daerah Sulawesi Tengah untuk mencari emas sebanyak-banyaknya dari daerah ini. 2).

Sampai berapa tahun lamanya VOC beroperasi melaksanakan misi dagangnya mencari emas di daerah Sulawesi Tengah tidak diketahui. Yang jelas ialah mata uang logam VOC banyak diketemukan dan pernah dipergunakan sebagai alat tukar-menukar (jual beli) di daerah ini.

2) Drs. J. Visser dan Ny. S. Kadoawu. BA, *Op. Cit.*, hal 1.

Rakyat Sulawesi Tengah yang sebagian besar bertani, berburu dan menangkap ikan. Pada waktu VOC datang berdagang mencari emas di daerah ini merekapun berusaha mencari emas atas perintah raja/magau atau kepala kelompok di bagian hulu sungai-sungai besar. Alat yang mereka pakai untuk mendulang emas tersebut adalah sejenis ayakan (tapis) dibuat dari rotan atau kulit bambu. Biji emas yang diperoleh tadi disimpan di dalam tabung-tabung buluh ayam atau buluh burung bangau lalu diserahkan kepada raja atau kepala kelompok. VOC membeli emas tadi dari mereka.

Dewasa ini masih banyak diketemukan tempat-tempat bekas orang-orang dahulu mencari emas di bagian hulu sungai-sungai besar seperti sungai Mountong, sungai Raopa/Tuladenggi, sungai Lambuno, sungai Ongka/Malino, sungai Tinombo, sungai Tada dan sebagainya. Tempat mencari emas itu dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk kotak (benteng) yang terbuat dari susunan batu-batu (batu susun).

Rupanya usaha rakyat mencari emas itu tidak berlangsung lama sehingga VOC pun merasa tidak perlu tinggal berlama-lama di daerah Sulawesi Tengah. Karena tidak mendapatkan emas lagi maka mereka pun (VOC) meninggalkan daerah ini.

Bangsa Belanda berikutnya yang datang ke daerah Sulawesi Tengah sesudah VOC pergi, masing-masing ialah J.C.W.D.A. Van der Wijk. Ia mengunjungi danau Poso (Tentena) dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Oktober 1865, disusul oleh W.J.M. Michielsen pada tanggal 12 Juli 1869. Keduanya datang hanya untuk meninjau dan menyaksikan dari dekat keindahan alam danau Tentena yang mereka dengar sebelumnya ketika ke dua-duanya berada di Gorontalo (Sulawesi Utara). J.C.W.D.A. Van der Wijk adalah seorang pegawai yang diperbantukan pada kantor Asisten Residen Gorontalo yang pada waktu itu dijabat oleh A.R.K. Ridel.

Sesudah itu pada tanggal 18 Februari 1892 tibalah di pelabuhan Poso (Mapane) kapal Belanda "*De Raaf*" dari Gorontalo membawa Albertus Christian Kruyt dengan tugas utamanya se-

bagai utusan *Nederlandsche Zendelingen Genootschap* (NZG) untuk menyebar luaskan agama Kristen di Sulawesi Tengah.

Tanggal 5 September 1894 pemerintah Belanda untuk pertama kalinya menempatkan seorang kontrolieur untuk wilayah Teluk Tomini bagian selatan berkedudukan di Mapane. Ia disertai sejumlah tentara (kompania) untuk menjaga keamanannya.

Pada tanggal 1 Maret 1895 tempat kedudukan kontrolieur dipindahkan dari Mapane ke Poso.

Pada tanggal 19 Maret 1895 Dr. N. Adriani, seorang ahli bahasa, tiba di Poso dan disambut meriah oleh A.C. Kruyt bersama teman-temannya.

Dengan penempatan aparat pemerintahan Hindia Belanda di daerah Sulawesi Tengah yang disebut kontrolieur atau gezaggeber pada tempat-tempat penting di tahun-tahun berikutnya, mulailah Belanda menjalankan politik kolonialnya di daerah ini.

Pada tahun 1903 pemerintah Hindia Belanda menempatkan seorang Asisten Residen pertama di Donggala bernama M.J.H. Engelenberg. Sebelum menjadi Asisten Residen di Donggala beliau menjabat sebagai seorang kontrolieur di Poso. Dengan demikian makin kuatlah kedudukan pemerintah Hindia Belanda di daerah Sulawesi Tengah untuk melaksanakan dan mengembangkan kekuasaannya.

Tentu saja kedatangan bangsa Belanda itu tidak disambut baik oleh para raja yang berkuasa di daerah-daerah yang telah mempunyai sistim pemerintahan adat yang teratur dan mendapat dukungan kuat dari penduduk setempat. Raja-raja/pimpinan kelompok suku yang disebutkan di atas inilah kelak banyak mengadakan perlawanan pada saat-saat pertama sekali bangsa Belanda datang hendak berkuasa di daerah Sulawesi Tengah ini.

Karena yang dimaksud dengan perkataan kolonialisme dan imperialisme adalah semua bangsa asing yang datang dari Eropah maupun Asia menjajah di daerah Sulawesi Tengah maka dalam uraian selanjutnya perlawanan-perlawanan yang dimaksud ialah perlawanan rakyat Sulawesi Tengah kekuasaan penjajah bangsa Belanda dan bangsa Jepang.

Jika dihitung saat ditempatkannya seorang kontrolieur pertama di Mapane (Poso) pada tahun 1894 hingga tahun 1942 pada saat tentara militer Jepang datang di daerah ini, maka bangsa Belanda berkuasa di Sulawesi Tengah selama kurang lebih 48 tahun. Bangsa Jepang hanya berkuasa selama tiga setengah tahun jika dihitung waktu masuknya di daerah ini pada awal bulan Maret 1942 hingga pertengahan bulan Agustus 1945.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 1908 itulah seluruh wilayah daerah Sulawesi Tengah telah dikuasai oleh Belanda karena hari itu raja Banggai (Abdul Rahman) menanda tangani Perjanjian Pendek di atas kapal *Konstantijn* di mana secara resmi Belanda menyatakan kerajaan Banggai lepas dari kekuasaan sultan Ternate. Dikatakan demikian karena sudah hampir semuanya daerah kerajaan yang mengadakan perlawanan menentang masuknya Belanda hendak berkuasa di daerahnya telah ditaklukkan oleh pasukan tentara Belanda.

Kedatangan Belanda ke daerah Banggai itu membawa serta pasukan-pasukan tentaranya yang disebut Marsose untuk menjaga keamanan, karena meskipun raja telah bersedia menerima Belanda masuk ke Banggai tetapi rakyat suku Loon di bawah pimpinan Laginda di daerah Balantak menentang dan mengadakan perlawanan sengit tidak mau menerima Belanda yang hendak berkuasa di daerahnya. Perlawanan Laginda dan kawan-kawannya ini, mendapatkan pengikut yang cukup banyak pula dari rakyat Banggai di daerah kepulauan.

Sekarang ini bekas tangsi Marsose yang terletak di bagian belakang keraton raja Banggai dahulu masih ada di Kecamatan Banggai. Sebagian dari tanah tempat membangun tangsi itu sudah dijadikan kebun cengkeh anggota Koramil Kecamatan Banggai.

Jadi kalau dihitung waktunya dari tahun 1908 itu, maka Belanda hanya sempat berkuasa di daerah Sulawesi Tengah selama tiga puluh empat tahun saja. Karena ternyata sejak mulai ditempatkannya seorang kontrolieur pertama di Mapane (Poso) pada tanggal 5 September 1894 hingga tanggal 14 Juli 1908 pada bebe-

rapa tempat/daerah kerajaan yang didatangi Belanda selalu ada saja perlawanan-perlawanan terjadi. Kecuali pada daerah-daerah kerajaan yang dapat dibujuk dan dirayu oleh pemerintah Belanda supaya mau dan bersedia bekerja sama dengannya sambil memberikan janji-janji dengan pengharapan mereka akan diberikan penghidupan lebih baik di masa-masa mendatang jika Belanda telah berkuasa. Raja-raja/para magau atau kepala kelompok suku yang termakan bujukan tersebut dengan tangan terbuka mau menerima bangsa Belanda berkuasa di daerahnya.

A. LATAR BELAKANG PERLAWANAN.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah adalah perlawanan rakyat Sulawesi Tengah menentang penjajahan bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Disebut demikian karena hanya ke dua bangsa tersebut selama masa pendudukannya di daerah ini banyak mendapat tantangan dari rakyat Sulawesi Tengah pada umumnya.

Meskipun sebelumnya telah datang di daerah ini dua golongan bangsa Eropa lainnya yaitu Portugis dan Spanyol, tidak ada riwayat/ceritera yang melukiskan kisah perlawanan rakyat terhadap mereka maka tak perlulah kiranya kita banyak menyinggungnya.

Marilah kita mencoba menelaah hal-hal yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Sulawesi Tengah terhadap bangsa Belanda dan Jepang selama pendudukan/kekuasaan kolonialnya di daerah ini.

1. Agama.

Kerajaan-kerajaan setempat yang terdapat di daerah tepi pantai pada umumnya adalah kerajaan-kerajaan yang para pimpinan dan rakyat bagian terbesar memeluk agama Islam. Tentu saja kedatangan bangsa Belanda yang tidak seagama, ditentang dengan keras dengan menggunakan kekuatan senjata yang mereka

miliki, karena pemerintah Belanda pun datang hendak berkuasa di tempat-tempat tersebut dengan menggunakan kekuatan tentara yang bersenjata pula.

Karena keadaan persenjataan yang tidak seimbang, (parang, tombak) melawan senjata api modern perlawanan para raja bersama rakyatnya di tempat-tempat itu dengan mudah dapat dipatahkan. Selain itu senjata ampuh Belanda dengan politik *divide et impera*nya berhasil membujuk saudara-saudara para raja yang berkuasa supaya mau bekerja sama dengannya, maka kekuatan perlawanan rakyat menjadi pecah. Sebagian mengikuti raja-raja yang sedang berkuasa mengadakan perlawanan menentang Belanda, sebagian lagi mengikuti saudara-saudara raja yang termakan bujuk rayu Belanda dan membantu Belanda melawan saudaranya sendiri.

Kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Tombolotutu, Malonda, Karanjalembah (Toma I Dampo), Intovoalangi (Toma I Torengke) dan lain-lain pada perlawanan-perlawanan terhadap Belanda, disebabkan karena di antara bangsa kita sendiri banyak yang menjadi pengkhianat membantu Belanda memerangi bangsanya sendiri.

2. Perampasan Kekuasaan.

Para raja, magau, karaja atau datu yang berkuasa di daerah-daerah kerajaan merdeka yang ada di daerah Sulawesi Tengah berpendapat bahwa jika Belanda telah masuk dan berkuasa di daerahnya maka kekuasaan dan kemerdekaannya akan hilang dirampas oleh Belanda.

Sebelum bangsa-bangsa asing baik dari Eropah maupun Asia datang ke daerah Sulawesi Tengah sekitar pertengahan abad ke 17, di daerah ini sudah ada daerah-daerah/negeri-negeri yang berpemerintahan sendiri-sendiri sesuai dengan peraturan adat setempat. Sistem pemerintahan negeri yang diatur menurut adat-istiadat setempat ini telah berdiri kokoh dan berjalan lama di daerah-daerah tepi pantai ataupun di daerah pedalaman (pegu-

nungan). Gelar pejabat tertinggi dari kepala pemerintahan adat di daerah-daerah tersebut di atas berbeda satu dengan lainnya.

Pada umumnya wilayah-wilayah kerajaan/kemagauan yang ada di daerah Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dan Ternate. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipergunakannya istilah-istilah yang dipakai menyebutkan jabatan-jabatan kepangkatan dalam pemerintahan. Daerah-daerah kerajaan tersebut di atas merupakan suatu daerah merdeka di mana para raja, magau, karaja (mokole) dan datu pemerintah dibantu oleh para majelis dewan hadatnya masing-masing. Jumlah anggota dewan hadat yang membantu raja/magau pada setiap kerajaan tidak sama. Demikian pula gelar/sebutan masing-masing pejabat dalam keanggotaan dewan hadat itu antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda pula.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya masing-masing para anggota dewan hadat dapat menjalin kerja sama yang baik sekali, setiap petugas melakukan tugasnya dengan patuh dan penuh tanggung jawab sehingga rakyat yang berada di bawah pemerintahannya merasa hidup tenteram dan damai. Setiap anggota masyarakat yang melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku dikenakan hukuman adat sesuai berat ringannya kesalahan yang diperbuat.

3. Kerja paksa (rodi) dan pajak (belasting).

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Sulawesi Tengah terhadap pemerintah Hindia Belanda sesudah tahun 1908 kebanyakan disebabkan oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah penjajah dan perlakuan-perlakuan yang tidak wajar oleh aparat pemerintah Belanda terhadap rakyat setempat. Peraturan-peraturan seperti kerja paksa (rodi) di jalan-jalan raya dan kewajiban membayar pajak (belasting) dan sebagainya oleh rakyat dirasakan sangat berat karena selama pemerintahan raja dan dewan hadat peraturan-peraturan seperti itu tidak ada. Mereka telah biasa hidup bebas bekerja di kebun atau ladang menurut kehendak mereka sendiri sesuai dengan musim yang mereka ke-

tahui sepanjang tahun.

Berburu dan menangkap ikan setiap waktu dapat dilakukan. Yang penting hasil pertanian, perburuan dan penangkapan ikan yang mereka peroleh sebagian harus diserahkan kepada raja beserta stafnya sebagai salah satu pengabdian.

4. Kesadaran nasional.

Perlawanan-perlawanan yang timbul kemudian baik perlawanan terhadap Belanda maupun perlawanan terhadap pemerintah militer Jepang terbanyak disebabkan oleh adanya kesadaran nasional, kesadaran berbangsa dan bernegara sendiri yang bebas dari kekuasaan bangsa lain yang menjajah.

Faham nasionalisme ini timbul di kalangan rakyat Sulawesi Tengah pada umumnya disebabkan karena adanya interaksi dengan organisasi-organisasi politik seperti SI (PSII), PNI dan Partindo serta Parindra di luar daerah Sulawesi Tengah antara lain di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa dan Sumatera.

Selain itu berdirinya organisasi Alkhairat pada tahun 1930 dan masuknya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1932 di daerah ini yang terutama bergerak di bidang dakwah agama Islam dan pendidikan juga mempengaruhi timbulnya rasa kesadaran untuk berbangsa dan bernegara merdeka di kalangan rakyat Sulawesi Tengah terutama mereka yang beragama Islam.

Rakyat Sulawesi Tengah yang telah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda maupun yang didirikan oleh organisasi politik seperti PSII dan organisasi sosial/agama Alkhairat dan Muhammadiyah, mengetahui adanya gerakan-gerakan melawan penjajah di luar daerah melalui bacaan-bacaan dalam surat kabar atau majalah.

Mereka secara berkelompok berlangganan surat kabar/majalah yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi pergerakan di Jawa dan Sumatera. Melalui bacaan dalam majalah/surat kabar itulah mereka dapat mengetahui kegiatan-kegiatan pergerakan pemuda Indonesia menentang penjajahan Belanda di tanah air

baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.

Dalam hal ini perlu diketahui kegiatan para pemuda terpelajar PSII dan Muhammadiyah Sulawesi Tengah yang mendirikan taman bacaan umum (perpustakaan) di Parigi (Kabupaten Donggala) dan di Bunta (Kabupaten Banggai). Di Parigi taman bacaan umum para anggota PSII dan Muhammadiyah terdapat di rumah Abdul Wahid Toana (ayah dari Drs. Rusdi Toana) dan di rumah Marjun Habie (ayah dari Muhammad Habie). Di rumah ke dua orang tokoh inilah sering datang para anggota PSII dan Muhammadiyah dari Parigi, Wani, Pantoloan, Labuan dan sekitarnya silih berganti mendengarkan berita yang dibacakan seseorang dari surat kabar atau majalah. Biasanya yang disuruh membaca surat kabar/majalah itu adalah putera Marjun Habie bernama Muhammad Habie. Setelah selesai mendengarkan bacaan tersebut mereka berdiskusi membahas isi berita yang mereka telah dengarkan tadi.

Di Bunta para pemuda terpelajar anggota PSII juga dirikan sebuah taman bacaan (perpustakaan) pada tahun 1923. Untuk mengisi taman bacaan (perpustakaan) itu mereka berlangganan surat kabar/majalah yang terbit di Jawa dan Sumatera, bahkan ada juga majalah yang diterbitkan di luar negeri, antara lain :

1. Harian *Bendera Islam* dari Bandung yang pimpinan redaksinya Bung Karno dan hoofd redaktornya Ir. Anwari. Pemuda A.R. Onge sering pula mengisi berita/menulis dalam harian ini.
2. *Suara PSII* dari Jawa.
3. *Panji Islam* dari Sumatera.
4. Harian *Bintang Timur* dari Sumatera.
5. Majalah *Alazhar* dari Kairo yang diterbitkan dalam huruf Arab bahasa Melayu. Majalah ini diterbitkan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di Kairo (Mesir). Di dalam majalah ini tercantum nama-nama pelajar Indonesia antara lain Abdul Kahar Muzakir, Janan Thayeb dan lain-lain. 3)

3) Hasil wawancara dengan A.R. Onge di Luwuk tgl. 24 September 1978.

Berita-berita mengenai pergerakan pemuda Indonesia di negeri Belanda yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawannya mereka baca melalui majalah *Alazhar* dari Kairo itu.

Untuk mendapatkan uang pembayar langganan surat kabar/majalah yang disebutkan di atas para pemuda anggota perpustakaan (taman bacaan) itu secara gotong-royong memungut uang langganan dari para anggotanya. Sering pula mereka memberi sumbangan uang ala kadarnya kepada pelajar-pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Kairo waktu itu. Uang tersebut diperoleh sebagai sumbangan sukarela secara gotong-royong pula dari para anggota PSII yang ada di Bunta dan sekitarnya. Kota Bunta inilah sebagai kota pertama di Kabupaten Banggai yang menerima datangnya partai SI (PSII) pada tahun 1917.

5. Tindakan kasar Penguasa.

Selain apa yang telah disebutkan sebelumnya juga yang menjadi latar belakang timbulnya gerakan perlawanan rakyat Sulawesi Tengah terhadap penjajah Belanda dan Jepang adalah tindakan kasar yang bersifat paksaan yang kadang-kadang di luar batas peri kemanusiaan. Kerja paksa (rodi) di jalan-jalan raya di bulan puasa Ramadhan yang dikenakan kepada umat Islam di Salumpaga, Toli-Toli, menyebabkan timbulnya pemberontakan rakyat Salumpaga menentang aparat kekuasaan Belanda pada tanggal 5 Juni 1919. Peristiwa ini menyebabkan terbunuhnya seorang kontrolir Toli-Toli bernama De Kat Angelino. Kerja rodi inilah yang paling banyak menyebabkan timbulnya perlawanan terhadap penjajah Belanda waktu itu selain keharusan membayar pajak (belasting) bagi setiap penanggungnya.

Peraturan Belanda pada waktu itu adalah mereka yang tak mau melakukan kerja rodi dimasukkan penjara selama kurang lebih 10 hari dan mereka yang tidak mau membayar pajak dipenjarakan selama 5 hari.

Di zaman pendudukan Jepang tindakan kasar memukul bahkan sampai memancung, memperkosa wanita dan kerja paksa membuat benteng pertahanan, menggali lobang persembunyian

dan penyimpanan barang-barang berharga serta pembuatan jalan-jalan baru, merupakan sebab utama perlawanan rakyat terhadap pemerintah Jepang di daerah Sulawesi Tengah. Hal ini terjadi pada saat-saat terakhir kekuasaan militer Jepang di daerah ini.

Pemberontakan rakyat Kampung Malomba di Toli-Toli menyebabkan terbunuhnya Ken Kanrikan Imaki tanggal 18 Juli 1945 di desa tersebut. Para pemuda Indonesia yang melakukan kerja paksa membuat benteng pertahanan, lobang persembunyi-an dan tempat menyimpan benda berharga serta membuat jalan-jalan raya itu dalam bahasa Jepang disebut *Romusha*. Karena beratnya pekerjaan itu banyak di antara mereka meninggal dunia di tempat pekerjaan. Seringkali kematian itu tidak disampaikan beritanya kepada keluarga yang bersangkutan. Mereka yang melakukan kerja paksa membuat lobang tempat menyimpan benda berharga itu, bila telah selesai melakukan pekerjaan mereka di bawa ke tempat lain dan dihabiskan nyawanya semua agar supaya rahasia Jepang itu jangan sampai terbongkar atau ketahuan orang lain. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan banyak keluarga tidak mengetahui di mana kuburan anak/saudaranya yang dijadikan romusha oleh Jepang selama mereka berkuasa.

B. WUJUD PERLAWANAN.

Gerakan perlawanan rakyat menentang kekuasaan kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah, baik perlawanan terhadap bangsa Belanda maupun perlawanan terhadap bangsa Jepang, muncul dalam berbagai bentuk, antara lain;

1. *Perlawanan Bersenjata Secara Kelompok.*

Perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat di bawah pimpinan raja/magau atau ketua kelompok suku yang terjadi di beberapa tempat pada saat-saat pertama sekali Belanda hendak menanamkan kekuasaannya di daerah Sulawesi Tengah; para raja serta rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya serempak mengadakan perlawanan terhadap Belanda, karena mereka tidak

mau dijajah oleh bangsa asing/pendatang dari manapun mereka berasal. (Lihat perlawanan Karanjalembah di Sigi, Malonda di Gunung Bale-Donggala, Tombolotutu di Moutong, Intovoalangi di Kulawi, Kilomboi di Buyumboyo-Poso, Laginda di Balantak dan sebagainya.).

2. *Perlawanan Bersenjata Secara Pribadi.*

Perlawanan bersenjata secara pribadi dilakukan oleh seorang yang bernama Rusulemba atau Tabatoki di Tentena, Pamona Utara. Rusulemba alias Tabatoki ini terkenal keberaniannya dan tidak mau mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya. Akhirnya dia dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan meninggal di tempat tahanannya.

3. *Perlawanan Secara diam-diam (Gerakan di bawah tanah).*

Perlawanan semacam ini muncul pada saat kekuasaan kolonialisme dan imperialisme telah berjalan lama di daerah Sulawesi Tengah. Para raja/magau yang berkuasa pada umumnya para raja/magau yang diangkat oleh Belanda dan telah menandatangani perjanjian atau kontrak bekerja sama dengan penjajah. Para raja/magau yang menjadi alat pemerintah penjajah ini tidak lagi mengikuti sistim pemerintahan kerajaan yang berdasarkan hukum adat setempat yang telah melembaga, tetapi melakukan pemerintahan menurut peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah penjajah (Belanda) sesuai dengan cita-cita kolonialnya ingin memperoleh kekayaan dari daerah jajahannya. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) membuat jalan raya dan jembatan-jembatan serta diwajibkan membayar pajak (belasting) pada suatu jangka waktu tertentu yaitu setahun sekali. Bagi rakyat, kerja paksa (rodi) dan membayar pajak (belasting) dirasakan sangat berat sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya perlawanan bersenjata terhadap aparat penguasa.

Yang menjadi pimpinan gerakan perlawanan secara diam-diam ini adalah para pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan

an di sekolah desa (*Bestuur Volksschool* = BVS) yang didalam dirinya telah timbul rasa kebangsaan (nasionalisme) akibat adanya hubungan dengan luar melalui media massa seperti surat kabar atau majalah.

Perlawanan ini dilakukan melalui suatu wadah organisasi baik politik maupun sosial yang sifatnya non-koperasi dengan pemerintah yang berkuasa. (Lihat timbulnya peristiwa pemberontakan rakyat Salumpaga di Toli-Toli tahun 1919 dan peristiwa Dolago di Parigi tahun 1936).

Gerakan perlawanan rakyat di bawah tanah ini terbanyak dilakukan pada zaman pendudukan Jepang di daerah Sulawesi Tengah. Gerakan-gerakan semacam ini kelak muncul sebagai perlawanan bersenjata pada masa-masa terakhir kekuasaannya di daerah ini. (Lihat peristiwa Malomba bulan Juli 1945 di Toli-Toli yang menyebabkan terbunuhnya Ken Kanrikan Imaki di desa itu).

4. Perlawanan yang dinyatakan dengan sikap.

Gerakan perlawanan yang dinyatakan dengan sikap tidak mau mematuhi peraturan yang berlaku buatan pemerintah penjajah. Para pelawan ingin bebas tidak mau terikat dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Mereka tidak mau melakukan kerja paksa (*rodi*) dan enggan membayar pajak (*belasting*) pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sikap membangkang rakyat seperti disebutkan di atas ini, menyebabkan pemerintah Belanda mengambil tindakan keras. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama 5 sampai 10 hari atau mengucilkan mereka dari lingkungannya dengan jalan mengasingkannya ke luar daerah seperti ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa dan Irian Jaya (*Boven Digul*). Tindakan keras yang dilakukan oleh aparat pemerintah Hindia Belanda terhadap sikap membangkang rakyat tersebut di atas dibalas pula oleh rakyat dengan tindakan kekerasan. (Lihat pecahnya Perang Peore di kerajaan Lore (Napu) yang dipimpin oleh Ama (*Umana Soli*) dan kawan-kawan-

nya pada tahun 1907).

5. *Tidak mengakui kontrak dan mengucapkan kata-kata (semboyan).*

Selain bentuk-bentuk perlawanan yang telah disebutkan terdahulu, masih ada lagi suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh beberapa tokoh/pemimpin masyarakat ataupun raja/magau yang tidak menyetujui sikap saudara-saudaranya menerima Belanda berkuasa di daerahnya dengan menandatangani perjanjian kerja sama atau kontrak. Para tokoh/pemimpin yang dimaksud tidak mengakui adanya kontrak-kontrak atau perjanjian kerja sama yang telah ada dan bahkan berusaha membatalkannya.

Ada pula raja atau pemimpin yang mengeluarkan kata-kata atau semboyan yang dapat membakar semangat rakyat untuk melawan. Raja Vinono di Parigi terkenal dengan semboynannya yang bunyinya sebagai berikut: "Mabula boga ri vana pade meta'a mbaeva Balanda", artinya "Nanti bila kera hitam yang terdapat di hutan berubah menjadi putih warnanya, baru kita berhenti melawan Belanda".

Raja Vinono bersama puteranya (Hanusu) sangat membenci Belanda yang berkuasa di Parigi pada waktu itu. Sikap menentang raja Vinono bersama puteranya tersebut menyebabkan Belanda mengambil tindakan membuang Hanusu ke Tondano (Manado), dan baru dikembalikan ke Parigi menjadi raja pada tahun 1917 setelah bersedia menandatangani korteveklaring pada tanggal 5 Pebruari 1917.

Rajamaili yang lebih dikenal dengan sebutan Mangge Risa adalah orang yang sangat membenci kepada Belanda. Beliau adalah seorang turunan raja yang berpengaruh di Palu dan sekitarnya serta mempunyai pengikut yang cukup banyak. Beliau sangat tidak senang terhadap saudaranya Yojokodi sebagai magau Palu mau menerima dan bekerja sama dengan Belanda. Rajamaili (Mangge Risa) menyindir saudaranya Yojokodi, magau Palu, yang bertempat tinggal di kampung Lere, setelah magau tersebut menandatangani

korteverklaring berbunyi sebagai berikut: "Kapuna ri bamba nantana lelona, notuturukua kava ri Goa", artinya "Buaya yang ada di muara sungai (Palu) menanam ekornya, berkokok hingga sampai di Goa". Maksud sindiran ini ialah bahwa Mangge Risa bersama para pengikutnya menentang pemerintahan raja/magau Palu Yojokodi, karena beliau mau menerima Belanda hendak berkuasa di daerahnya. Yojokodi bersama pengikut-pengikutnya tak mampu memadamkan perlawanan Rajamaili (Mangge Risa) bersama kawan-kawannya. Oleh sebab itu Yojokodi terpaksa pergi ke Goa (Sulawesi Selatan) meminta bantuan Belanda di sana.

Pada waktu itu sebagian besar rakyat di kota Palu dan sekitarnya tidak menyetujui Yojokodi menjadi magau Palu karena dia mau bekerja sama bahkan meminta bantuan Belanda supaya beliau diangkat menjadi raja. Jadi secara jelasnya Yojokodi dapat menduduki jabatan sebagai raja/magau Palu atas penunjukkan/pengangkatan Belanda. ⁴⁾

Bentuk perlawanan yang disebutkan terakhir ini, yaitu adanya tokoh-tokoh/pimpinan rakyat yang tidak mengakui adanya perjanjian kerja sama/kontrak, bahkan berusaha untuk membatalkannya atau dengan mengeluarkan kata-kata/semboyan membakar semangat rakyat itu, tak sampai menyebabkan timbulnya perlawanan bersenjata di antara ke dua belah pihak yang bertentangan yang masih sekeluarga.

Hingga dewasa ini belum ditemukan ceritera yang hidup di dalam masyarakat setempat mengenai pertempuran-pertempuran bersenjata yang sengit (perang saudara) sehingga menyebabkan timbulnya korban manusia yang cukup banyak antara ke dua belah pihak yang bermusuhan. Karena begitu muncul hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah Belanda dengan secepat mung-

4). Hasil wawancara dengan Bp. Yoto Larini di Binangga, Kecamatan Maravola, Kabupaten Donggala tanggal 2 Nopember 1978.

kin mengambil tindakan pengamanan, menangkap tokoh-tokoh penghasut tersebut dan mengucilkan/mengasingkan mereka dari masyarakat ramai, bahkan membuang mereka ke luar daerah Sulawesi Tengah. Magau Dolo, Datupamusu, selaku Ketua SI dikerjakan Dolo dan sekitarnya (bertempat tinggal di Kaleke) menunjukkan sikap menentang terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda yang ada di Palu. Beliau menghasut para pengikutnya supaya jangan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh Belanda dan yang diberlakukan di daerahnya, yaitu melakukan kerja paksa (rodi) dan membayar pajak (belasting). Rakyat di kerajaan Dolo pada waktu itu hampir seluruhnya menjadi anggota partai SI dan mereka sangat mematuhi apa yang diperintahkan rajanya.

Karena sikap raja dan rakyat Dolo yang tidak pernah mematuhi perintah Belanda tersebut, Magau Dolo, Datupamusu, dipanggil oleh aparat penguasa Belanda di Palu (Gezaghebber Palu) untuk menghadap dan dibujuk supaya meninggalkan akhirnya Belanda memberikan ultimatum berbunyi sebagai berikut: "Magau dan kerajaan tetap ada tetapi harus keluar dari partai SI atau tetap dalam SI tetapi magau dan kerajaan musnah". Magau Datupamusu dengan tenang dan ikhlas disertai dengan tekad yang bulat menjawab: "Lebih baik aku dan kerajaan tumbang asalkan aku tetap dalam partai SI yang menegakkan persatuan dan persaudaraan". Karena pendiriannya tersebut Magau Dolo, Datupamusu, ditangkap dan diasingkan ke Ternate bersama seorang puteranya bernama Tagunu. Mereka tinggal di tanah perasingan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 1917 sampai dengan tahun 1926. Saudara sepupunya Gagaramusu di asingkan ke Sangir-Talaud dan dua orang sepupunya yang lain masing-masing bernama Datupalinge dan Lapasere dipenjarakan di Palu karena beliau-beliau ini adalah pembantu utama dalam staf kantor kerajaan Dolo.

Di Bunta, Kabupaten Banggai, terjadi pula gerakan menentang kekuasaan pemerintah Belanda yang dilakukan oleh para anggota SI Merah di bawah pimpinan Haji Sunusi Manganco dan kawan-kawannya pada tahun 1926. Tetapi sebelum pemberontakan terjadi para pimpinan/tokoh gerakan perlawanan tersebut te-

lah ditangkap oleh pemerintah Belanda. Banyak di antara mereka dimasukkan ke dalam penjara dan ada pula yang diasingkan/dibuang ke luar daerah antara lain ke Jawa dan ke Digul (Irian Jaya). Mereka yang diasingkan/dibuang ke luar itu nanti dikembalikan ke daerah masing-masing pada saat-saat terakhir Belanda berkuasa di daerah Sulawesi Tengah sekitar tahun 1941.

Sikap menentang terhadap kekuasaan pemerintah penjajahan Belanda dengan kata-kata menghasut para pengikut-pengikutnya yang setia terjadi pula di Sindue daerah pantai barat Kabupaten Donggala dan di Pevunu. Di Sindue seorang anggauta SI yang berpengaruh, bernama Lasadindi alias Mangge Rante, bertempat tinggal di kampung Enu, menghasut para pengikutnya suku terasing Tajio dan Pendau di pegunungan Sindue agar mereka tidak melakukan kerja paksa (*rodi*) di jalan-jalan raya dan tidak pula mau membayar pajak (*belasting*). Hal ini oleh pengikut-pengikutnya yang setia itu benar-benar dimatuhi sehingga setiap ada petugas aparat pemerintah Belanda datang memerintahkan mereka bekerja memperbaiki jalan dan jembatan sepanjang jalan Palu — Sirenja serta melakukan penagihan pajak selalu gagal dan tak pernah berhasil.

Pemerintah Belanda tak berani mengambil tindakan tegas terhadap mereka (suku Tajio dan Pendau) itu karena mereka masih tergolong suku-suku bangsa yang masih liar pada saat itu, dan belum mempunyai tempat tinggal yang menetap. Tetapi mereka telah sering dan banyak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang berdiam di daerah-daerah pantai pada waktu mereka datang berbelanja di pasar-pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sikap mereka yang tidak mau melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka itu, menyebabkan pemerintah Belanda mengambil tindakan menangkap Lasadindi (Mangge Rante) dan memasukkan beliau ke dalam penjara di Palu.

Selama kekuasaan pemerintah Belanda di daerah Sulawesi Tengah Lasadindi berulang-ulang kali dimasukkan ke dalam penjara tanpa diketahui dengan jelas kesalahannya. Kalau ada tindakan su-

ku Tajio dan Pendau yang berbuat sesuatu yang menyakitkan hati para petugas aparat pemerintah Belanda yang bertugas di daerahnya, maka laporan tentang hal tersebut dengan segera disampaikan kepada pemerintah atasannya raja atau magau, maka petugas keamanan/polisi datang mengambil Lasadindi dan memasukkannya lagi ke dalam penjara.

Lasadindi atau Mangge Rante ini berpengaruh bukan saja terhadap suku-suku Tajio dan Pendau di daerah Sindue tetapi juga pada suku-suku terasing yang ada mendiami daerah pegunungan pantai timur dan pantai barat Kabupaten Donggala.

Di Pevunu seorang tokoh selain berpengaruh terhadap suku Kaili yang berdiam di tempat itu beliaupun berpengaruh pula terhadap suku-suku terasing, Tolare, yang mendiami daerah pegunungan bagian barat Lembah Palu. Namanya ialah Haji M. Yoto Daeng Pawindu. DS. Beliau mula-mula adalah seorang tokoh Serikat Islam (SI) di kota Palu, kemudian mendirikan PNI di Palu setelah kembali dari pembuangannya di Bandung. Haji M. Yoto Daeng Pawindu.DS., pada waktu diasingkan dan dimasukkan ke dalam penjara Sukamiskin di Bandung, berkenalan dengan Bung Karno. Beliau mendirikan PNI di Palu dan meninggalkan partainya semula PSII karena mendapat pengaruh dari Bung Karno selama dalam di penjara Sukamiskin itu.

Haji M. Yoto Daeng Pawindu. DS. menghasut para pengikutnya suku-suku Kaili yang ada di Pevunu dan suku-suku terasing Tolare yang ada di daerah pegunungan pantai barat Lembah Palu itu supaya jangan mau melakukan kerja paksa (rodi) dan jangan pula mau membayar pajak (*belasting*) bila petugas pajak datang menagihnya. Perintah ini benar-benar ditaati oleh para pengikutnya baik suku Kaili yang ada di Pevunu maupun suku Tolare yang berada di daerah pegunungan. Setiap ada petugas yang datang untuk memerintahkan mereka untuk bekerja di jalan-jalan dan memerintahkan supaya membayar pajak selalu mereka menghindarinya. Akhirnya para petugas selalu mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Hingga akhir hayat beliau (Haji M. Yoto

Daeng Pawindu. DS.) suku-suku terasing Tolare di daerah pegunungan itu tak mengetahui nama partai yang mereka masuki itu tetapi mereka mengenal dan mengetahuinya sebagai Partai Daeng Pawindu. ⁵⁾

6. *Rapat umum dan pawai keliling kota.*

Suatu bentuk perlawanan yang dilakukan sebagian rakyat Sulawesi Tengah dengan cara mengganggu keamanan dan ketertiban di kota-kota ialah dengan menyelenggarakan rapat umum/rapat akbar di lapangan dengan mengundang para pembicara dari tokoh-partai/organisasi untuk menyampaikan pidato yang bernafaskan perjuangan menuju kemerdekaan bangsa dan tanah air. Rapat itu kemudian disusul dengan pawai keliling kota yang diikuti oleh semua anggota/peserta yang menghadiri rapat umum itu. Rapat-rapat umum seperti ini banyak sekali dilakukan di tempat-tempat di mana terdapat anggota-anggota partai/organisasi Islam cukup banyak, dan kurang mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda.

Dalam tulisan ini hanya akan dikemukakan aksi yang dilakukan oleh Komite Umat Islam Pagimana di Kabupaten Banggai yang anggota-anggotanya terdiri dari organisasi Islam PSII, Muhammadiyah, Yong Islamiten Bond dan Nahdatussyafi'iyah yang kemudian berubah menjadi Nahdatul Ulama. Mereka mengadakan rapat umum menyambut hari raya Idul Qurban di Lapangan Pagimana — Luwuk, pada bulan Maret 1933.

Sebenarnya kegiatan itu telah mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda di Luwuk berdasarkan surat permohonan di atas kertas bermaterai (segel). Tetapi karena rapat umum itu Panitia mengubah acara yang telah ditentukan semula, dan para pembicara semuanya menyampaikan pidato yang bernafaskan perjuangan, ditambah lagi dengan dikumandangkannya lagu kebangsa-

5). Hasil wawancara dengan Bp. Haji Djaruddin Abdullah di Palu pada tanggal 29 Desember 1978.

an Indonesia Raya, maka aparat pemerintah Belanda yang mengahdirinya selaku wakil pemerintah di Luwuk menjadi kaget. Jaksa F. Saraun yang mewakili pemerintah dalam rapat umum itu melaporkan peristiwa tersebut kepada penguasa setempat di Luwuk. Akhirnya semua anggota Panitia kegiatan itu dipanggil ke Luwuk dan diajukan ke depan pengadilan Hadat Kerajaan Banggai yang diketuai oleh Raja Haji Awaluddin. Mereka dipersalahkan/dituduh melanggar adat kerajaan, yaitu melakukan Salat Idul Qurban di lapangan, hal mana belum pernah terjadi di daerah wilayah kerajaan Banggai.

Yang menjadi anggota Panitia penyelenggara rapat umum menyambut hari raya Idul Qurban di lapangan Pagimana bulan Maret 1933 itu ialah:

1. K e t u a : Basyir Maksum (guru Muhammadiyah).
2. Wakil Ketua : T.S. Bullah (Ketua PSII).
3. Sekretaris I : A. Lagonah (anggota PSII).
4. Sekretaris II : M. Tapo (anggota Muhammadiyah).
5. Pembantu Urusan Pemuda/Pandu: Yusuf Monoarfa (anggota PSII).
6. Pembantu : M.A. Makarao (anggota Muhammadiyah).
7. Pembantu : S.P. Makarao (anggota Muhammadiyah).
8. Pembantu : A. Thaha (anggota Muhammadiyah).
9. Penasihat : S.A. Amir (Anggota PSII).
10. Penasihat : T.D. Zaman (anggota Muhammadiyah).
11. Penasihat : Abdau Masulili (anggota Muhammadiyah).

Sidang pengadilan para anggota Dewan Hadat Kerajaan Banggai memutuskan memberikan vonis/hukuman kepada masing-masing anggota Panitia tersebut di atas sebagai berikut:

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| 1. Basyir Maksom | dihukum denda | f 10,- | atau masuk penjara
3 hari. |
| 2. S.A. Amir | sda | f 10,- | atau masuk penjara
3 hari. |
| 3. T.D.Zaman | sda | f 10,- | atau masuk penjara
3 hari. |
| 4. T.S. Bullah | sda | f 25,- | atau masuk penjara
7 hari. |
| 5. M.A. Makarao | sda | f 25,- | atau masuk penjara
7 hari. |
| 6. Abdau Masulili | sda | f 25,- | atau masuk penjara
7 hari. |
| 7. A. Thaha | sda | f 25,- | atau masuk penjara
7 hari. |
| 8. M. Tapo | sda | f 25,- | atau masuk penjara
7 hari. |
| 9. S.P. Makarao | sda | f 25,- | atau masuk penjara
7 hari. |

A.Lagonah dan Yusuf Monoarfa diadili tersendiri karena dituduh merubah acara yang telah ditentukan dan telah disetujui oleh pemerintah.

Yusuf Monoarfa dihukum penjara selama 6 (enam) bulan dan A. Lagonah dihukum penjara selama 4 (empat) bulan.

C. PERLAWANAN-PERLAWANAN YANG PERNAH TERJADI.

Dalam sub bab ini hanya akan dikemukakan perlawanan-perlawanan yang terjadi dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Gerakan-gerakan yang tidak sampai menimbulkan perlawanan bersenjata terhadap bangsa-bangsa yang menjajah tidak perlu diuraikan di sini.

Di dalam sub bab A telah dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah.

Di dalam sub bab ini secara garis besar dikemukakan lagi bahwa timbulnya perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda sejak mula pertama berkuasa di daerah Sulawesi Tengah hingga saat tibanya pemerintahan militer Jepang awal tahun 1942 disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Para raja/magau atau kepala suku yang memerintah suatu wilayah merdeka dibantu oleh para anggota majelis dewan hadatnya masing-masing juga telah mendapat kepercayaan sepenuhnya dari para penduduk setempat, tak mau menerima Belanda untuk berkuasa di daerahnya.
2. Belanda memaksakan keinginannya membawa serta pasukan-pasukan tentaranya menumpas dengan kejam kelompok-kelompok suku yang melawan di bawah pimpinan raja atau ketua kelompok sukunya masing-masing.
3. Kerajaan-kerajaan merdeka yang dikepalai seorang raja/magau yang rakyatnya beragama Islam menolak dengan keras kedatangan Belanda yang beragama Kristen itu hendak berkuasa di daerahnya.
4. Tidak mau melaksanakan perintah untuk melakukan kerja paksa (rodi) di jalan-jalan raya, membuat jembatan dan sebagainya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Rakyat menganggap pekerjaan itu terlalu berat dan mengikat kebebasan mereka.
5. Tidak mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda membayar pajak (*belasting*) setiap tahun yang dibebankan kepada setiap orang dewasa.

Sering pemerintah Belanda memasukkan seseorang ke dalam penjara untuk beberapa hari lamanya (5 sampai 10 hari) jika seseorang itu tidak melaksanakan pekerjaan rodi atau peraturan yang disebutkan nomor 4 dan 5 di atas.

6. Kesadaran nasional yang mulai timbul di dalam dada sebagian besar rakyat, pemuda terpelajar di daerah Sulawesi Tengah yaitu mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah (*Bestuur Volksschool* atau *Vervolgschool*). Sekolah-sekolah yang dimaksud ialah sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda maupun sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi politik seperti PSII ataupun oleh organisasi sosial agama seperti Alkhairat dan Muhammadiyah.

Gerakan-gerakan pemuda menentang kekuasaan Belanda yang terjadi di Jawa, Sumatera, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lainnya di seluruh tanah air mereka dapat mengikutinya dan berusaha memahami maksud dan tujuannya melalui bacaan-bacaan dalam surat kabar atau majalah.

Melalui wadah-wadah organisasi politik maupun sosial-agama yang ada di daerah mulailah para pemuda mengadakan gerakan-gerakan menentang kekuasaan Belanda. Gerakan-gerakan menentang kekuasaan Belanda itu ada yang dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, ada pula dengan secara diam-diam, mengadakan sabotase dan gangguan keamanan menyelenggarakan rapat-rapat umum (rapat akbar) sambil mengadakan pawai keliling kota.

Secara berturut-turut di bawah ini akan dikemukakan gerakan-gerakan perlawanan yang pernah terjadi menentang kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah mulai dari tahun 1900 hingga saat diproklamasikannya kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tahun 1900 Belanda mencampuri perkelahian-perkelahian kelompok suku Saluan di daerah kerajaan Banggai bagian darat, Lingketeng. Maksud Belanda menumpas kelompok-kelompok suku yang saling berperang satu sama lain itu sambil berusaha

membujuk para pimpinannya supaya mau bekerja sama dengan-nya. Tetapi kelompok suku yang dipimpin oleh Tonaas Janggo Pute dari Baloa, Tonaas Janggo Itom dari Doda dan Tunggol Tambunan yang bernama Gulunsing bersepakat melawan pasukan Marsose Belanda sampai tetes darah yang penghabisan. Tetapi karena keadaan persenjataan yang tidak seimbang (senjata api moderen melawan tombak, parang dan sumpit) akhirnya kelompok suku yang mengadakan perlawanan tadi menyerah kalah dengan membawa *Tonda*. *Tonda* adalah penyerahan secara adat suku Saluan-Loinang berupa seekor sapi hutan (anoa) yang diikat lehernya dengan secarik kain putih pada sepotong kayu yang disebut *mandapolang*. Akhirnya mereka yang menyerah itu ditembak mati di Monongi oleh pasukan tentara Belanda (Marsose) lainnya.

Perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh rakyat Moutong di bawah pimpinan raja Moutong, Tombolotutu, yang mendapat bantuan rakyat dari kerajaan Lambuno. Peperangan ini terjadi sekitar tahun 1900 itu juga dan berakhir dengan kemenangan di pihak tentara Belanda pada tahun 1904. Pada saat itu seluruh wilayah kerajaan Moutong dan Lambuno dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda.

Perlawanan rakyat Kaili di Gunung Bale — Donggala, yang dipimpin oleh rajanya bernama Malonda yang mulai meletus pada tahun 1902. Sebelum perlawanan terjadi, Malonda terlebih dahulu menghubungi keluarga-keluarganya yang ada di Toaya, Lero, Kabonga, Limboro, Kola-Kola dan Tovale supaya membantunya bila terjadi peperangan melawan Belanda. Selain meminta bantuan tenaga manusia, Malonda juga meminta bantuan pangan karena daerah-daerah tersebut merupakan lumbung padi dari kerajaan Banawa waktu itu. Perlawanan rakyat Kaili di bawah pimpinan Malonda itu hanya berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya dan berakhir dengan kemenangan di pihak Belanda pada tahun 1904.

Setelah Belanda berhasil mematahkan perlawanan Malonda, Belanda mengalihkan lagi perhatiannya ke kerajaan Sigi di Bora dan kerajaan Kulawi di Kulawi.

Perlawanan rakyat Sigi menentang masuknya Belanda di daerah ini, dipimpin oleh seorang putera raja bernama Karanjalembah yang lebih dikenal dengan sebutan Toma I Dampo (= ayahnya Dampo) Rakyat Sigi di bawah pimpinan Toma I Dampo ini melawan pasukan tentara Belanda di daerahnya dengan menggunakan taktik perang gerilya. Mereka memancing agar pasukan tentara Belanda masuk di daerah Sigi dengan aman tanpa perlawanan. Kota dikosongkan, rakyat pada menyingkir ke daerah-daerah pinggiran kota, dan yang ada di kota sebagian kecil saja dari penduduknya. Mereka ini menerima pasukan tentara Belanda dengan baik masuk kota, tetapi yang lainnya menjadi mata-mata dari rakyat yang menyingkir ke pinggir kota tadi yang kesemuanya dalam keadaan siap tempur.

Setelah Belanda berada di dalam kota, mereka merasakan bahwa tidak ada perlawanan, mereka pun bersenang-senang dan beristirahat. Dalam keadaan lengah sedemikian ini, rakyat Sigi tiba-tiba menyerang pasukan tentara Belanda sehingga menyebabkan banyak di antara mereka menjadi korban. Penyerangan pertama ini menyebabkan Belanda tidak berhasil menguasai dan menduduki wilayah kerajaan Sigi. Penyerangan-penyerangan tentara Belanda berikutnya yang diperlengkapi lebih baik dengan jumlah pasukan lebih banyak dari pada sebelumnya, menyebabkan perlawanan rakyat Sigi dapat dipatahkan Karanjalembah (Toma I Dampo) ditangkap, dibuang ke Sukabumi dan meninggal dunia di tempat pembuangannya.

Perlawanan rakyat Kulawi menentang masuknya Belanda di tempat tersebut dipimpin oleh rajanya bernama Intovoalangi yang lebih dikenal dengan sebutan Toma I Torengke. Perlawanan sengit rakyat Kulawi ini dengan mudah dipatahkan oleh Belanda. Dengan tipu muslihatnya yang licik menggunakan tenaga bangsa sendiri untuk melumpukannya, Belanda memperoleh kemenangan dengan mudah. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1904, hampir bersamaan waktunya dengan penyerangan tentara Belanda ke daerah kerajaan Sigi.

Sesudah Belanda berhasil melumpuhkan satu-persatu perla-

wanan-perlawanan yang terjadi di Kabupaten Donggala itu, pemerintah Hindia Belanda mulai memerangi rakyat di bawah pimpinan raja/ketua kelompok suku yang tidak bersedia menerima Belanda berkuasa di daerahnya di wilayah Kabupaten Poso.

Raja Tojo, Kolomboi, pada tahun 1905 melakukan perlawanan terhadap Belanda yang hendak berkuasa di daerahnya. Pada waktu itu raja Kolomboi baru saja kembali menghadiri perundingan dengan raja Sigi, Karanjalembah (Toma I Dampo) bersama beberapa orang raja lainnya yang seide dengannya yaitu menentang kedatangan Belanda di daerah Lembah Palu dan sekitarnya. Raja Kolomboi ini kawin dengan seorang puteri bangsawan Tawaeli bernama Daeng Manota, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan raja-raja yang ada di wilayah kerajaan Sigi. Dari perkawinan ini beliau memperoleh seorang putera bernama Tanjumbulu yang pada tahun 1928 diangkat menjadi raja Tojo menggantikan ayahnya yang telah dibuang oleh Belanda ke Makassar (Ujung Pandang).

Kolomboi dalam gerakan perlawanannya terhadap Belanda mendapat bantuan dari rakyat Buyumboyo di bawah pimpinan Kabosenya bernama Ta'urungi. Karena persenjataan yang tak seimbang, akhirnya perlawanan tersebut dapat dipatahkan Belanda. Kolomboi ditangkap dibuang ke Ujung Pandang dan meninggal di tempat pembuangannya. Perlawanan kemudian diteruskan oleh puteranya Tanjumbulu pada saat-saat terakhir Belanda berkuasa di daerah Sulawesi Tengah pada tahun 1941/1942.

Pada tanggal 23 Januari 1904 orang-orang Napu menyerang Tambarana (Sausu) tempat para saudagar kakitangan Belanda berdagang hasil hutan seperti rotan dan damar. Penyerangan di lakukan atas perintah raja Sigi, Karanjalembah. Mereka berhasil membunuh dua orang saudagar dari Minahasa (Manado). Akibat dari pada peristiwa penyerangan orang-orang Napu ke daerah Tambarana ini, Belanda mengirinkan pasukan tentaranya ke Napu untuk menaklukkan dan berusaha menguasai daerah kerajaan Lore tersebut. Mula-mula pasukan tentara Belanda itu tidak mendapatkan

perlawanan dari rakyat Napu. Mereka mulai mengatur dan menyusun pemerintahan di daerah ini dan menerapkan semua peraturan yang dibuatnya, seperti bekerja rodi di jalan-jalan raya dan membayar pajak (*belasting*) kepada rakyat Napu. Pada waktu itu kerajaan Lore terdiri dari empat daerah lembah yaitu Lembah Tawaelia (Lembah Sedoa), Lembah Pekurehua (Napu), Lembah Bada, dan Lembah Besoa. Masing-masing daerah lembah ini mempunyai pemerintahan sendiri-sendiri. Untuk mempersatukan ke empat daerah lembah itu pemerintah Belanda merencanakan mengangkat seorang raja yang dapat dijadikannya alat untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuatnya. Tetapi sebelum Belanda berhasil mengangkat raja yang dapat dijadikan alat untuk mempersatukan ke empat daerah lembah itu, tiga tahun kemudian pecahlah Perang Peore tahun 1907, dipimpin oleh Ama (Umana Soli) bersama kawan-kawannya di wilayah kerajaan Lore itu.

Selama kekuasaan pemerintah Belanda berjalan kurang lebih tiga tahun itu, tak satu pun perintah atau peraturan pemerintah Belanda yang dipatuhi Ama dan kawan2nya. Mereka tak mau menjalankan kerja paksa (rodi) dan menolak membayar pajak (*belasting*) yang dibebankan kepada mereka. Sifat membangkang Ama bersama beberapa orang temannya itulah menyebabkan Belanda mulai mengambil tindakan kekerasan dengan maksud membuang/mengasingkannya ke luar daerah. Sebelum niat pemerintah Belanda untuk mengasingkan mereka, Ama bersama teman-temannya mengadakan perlawanan bersenjata.

Pada tahun 1907 itu terjadi beberapa perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang dilakukan oleh penduduk setempat di wilayah Kabupaten Poso antara lain:

Perlawanan rakyat Mori yang dipimpin oleh raja Marundu II (gelar Daturitana) di daerah kerajaan Mori. Perlawanan ini memakan banyak korban di pihak tentara Belanda karena Marundu II dapat menipu Belanda. Siasat perang yang dilakukan oleh raja Marundu II sama dengan siasat yang dilakukan oleh raja Sigi, Karanjalembah, pada waktu pasukan tentara Belanda mulai pertama se-

kali masuk di daerah tersebut. Pasukan tentara (rakyat) dari kerajaan Mori yang dipimpin oleh raja Marundu II pura-pura tidak melakukan perlawanan pada waktu pasukan tentara Belanda memasuki wilayah kekuasaannya.

Setelah pasukan tentara Belanda dalam keadaan istirahat berenang-senang dengan minuman tuak sampai mabuk, pasukan raja Marundu II membabat satu-persatu tentara Belanda tersebut. Yang tidak mereka bunuh hanyalah seorang penunjuk jalan dan juru bahasa pasukan tentara Belanda itu bernama Maradi. Maradi inilah kelak mereka jadikan pelatih pasukan rakyat Mori di bawah pimpinan raja Marundu II itu untuk menggunakan senjata api yang mereka rebut/ambil dari pasukan tentara Belanda yang telah mereka bunuh.

Perlawanan berikutnya ialah perlawanan rakyat Pamona dipimpin oleh Tantogia alias Movote dan Endera di Tamungkudena (Tentena) serta perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tancigi dan Tampaya'u (nama aslinya Palalo) di Kandela (Pamona).

Semua perlawanan bersenjata yang disebutkan di atas baik yang dilakukan oleh orang-orang Napu di kerajaan Lore, orang-orang Mori di daerah kerajaan Moridan orang-orang Pamona di Tamungkudena dan Kandela, berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan tentara Belanda. Hal ini disebabkan terutama karena keadaan persenjataan yang tidak seimbang (parang, tombak dan sumpit melawan senjata api yang moderen). Selain itu pada umumnya pasukan tentara Belanda yang dimasukkan ke daerah Sulawesi Tengah pada waktu itu adalah tentara yang telah terlatih dan berpengalaman menumpas pemberontakan-pemberontakan rakyat melawan Belanda di daerah Indonesia lainnya seperti di Jawa, Sumatera, Ambon, Sulawesi Selatan dan lain-lainnya.

Setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Kabupaten Poso pada akhir tahun 1907 itu, pemerintah Belanda mengalihkan perhatiannya untuk menguasai kerajaan Banggai. Pada waktu itu kerajaan Banggai merupakan bagian dari kesultanan Ternate. Para calon raja yang telah dipilih oleh Basalo Sangkap, bila

hendak dilantik mereka harus pergi ke Ternate. Raja Banggai yang terakhir dilantik di Ternate pada tahun 1901 adalah raja Abdul Rahman. Pada tanggal 14 Juli 1908 beliau menandatangani korte-verklaring di atas kapal Belanda (*Konstantijn*). Pada saat itulah Belanda menyatakan kerajaan Banggai lepas dari kekuasaan Sultan Ternate.

Belanda bergembira bahwa dengan menggunakan wibawa raja yang dapat diajaknya bekerja sama itu, dengan mudah wilayah-wilayah yang ada di kerajaan Banggai, baik yang ada di darat maupun yang di daerah kepulauan, dapat dikuasainya. Tetapi dugaan Belanda ini meleset sama sekali, karena suku Loon yang ada di Balantak (Banggai darat) di bawah pimpinan Laginda dengan kawan-kawannya menentang keras masuknya Belanda hendak berkuasa di wilayah kerajaan Banggai. Pada tahun 1908 itu juga terjadi pemberontakan-permberontakan bersenjata rakyat Banggai menentang kekuasaan Belanda. Meskipun rajanya telah bersedia menerima kedatangan Belanda di daerahnya, tetap sebagian rakyat ada yang tidak mau menerimanya.

Selain suku Loon di Balantak pimpinan Laginda dan kawan-kawannya, di Banggai kepulauan pun terjadi perlawanan bersenjata suku Sea-Sea menentang masuknya Belanda di daerahnya.

Di distrik Bulagi suku Sea-Sea yang mengadakan perlawanan tersebut dipimpin oleh Sakuta (Pangkeali Sakuta), di distrik Liang dipimpin oleh empat orang bersaudara yaitu Potong, Lapadi, Daresa dan Yama'a. Potong, Lapadi dan Daresa mati tertembak dalam pertempuran itu, tetapi Yama'a dapat melarikan diri sehingga dia selamat. ⁶⁾

Pada akhirnya semua perlawanan tersebut dapat dipatahkan oleh pasukan tentara Belanda dan mulai saat itulah (tahun 1908) hampir seluruh daerah Sulawesi Tengah telah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.

6). Hasil wawancara dengan Drs. Lahmadi Mangas di Palu, tgl. 29-10-1981.

Antara tahun 1908 hingga awal tahun 1942, meskipun boleh dikatakan seluruh daerah Sulawesi Tengah telah dikuasai oleh Belanda, perlawanan-perlawanan masih tetap ada. Perlawanan-perlawanan rakyat pada waktu itu terutama ditujukan kepada aparat-aparat pemerintah Belanda yang memaksakan diberlakukannya peraturan-peraturan buatan pemerintah kolonial melalui raja-raja yang telah diangkatnya. Raja-raja yang naik tahta semata-mata karena penunjukan/pengangkatan Belanda, bukan karena dukungan rakyat setempat, memerintah dengan kejam, kadang-kadang/sering berlaku lebih kejam dari pada penjajah sendiri. Mereka menggunakan kekerasan menjalankan pemerintahannya, sehingga mereka banyak mendapat tantangan dari rakyatnya sendiri. Pada bulan puasa Ramadhan mereka memaksa rakyat beragama Islam yang sedang menjalankan puasa melakukan kerja paksa (rodi) di jalan-jalan raya. Selain itu juga memaksakan mereka membayar pajak (*belasting*). Siapa yang tidak mau melakukan kerja paksa (rodi) dan enggan membayar pajak (*belasting*) dikenakan hukuman penjara antara lima sampai sepuluh hari lamanya.

Tindakan-tindakan aparat pemerintah penjajah yang demikian inilah membuat rakyat bertindak nekad menentang raja-raja yang menjadi alat pemerintah Belanda pada waktu itu. Pemberontakan rakyat Salumpaga di Toli-Toli tahun 1919 dan pemberontakan rakyat Dolago di Parigi tahun 1936 adalah contoh-contoh nyata dari gerakan rakyat menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di daerah Sulawesi Tengah, di mana raja-raja yang memerintah pada saat itu adalah raja-raja yang diangkat oleh Belanda.

Pada akhir tahun 1941 hingga awal tahun 1942 rakyat Ampana di kerajaan Tojo mengadakan perlawanan bersenjata menentang pemerintah Belanda. Perlawanan ini dipimpin langsung oleh raja Tojo, Tanjumbulu. Beliau diangkat oleh Belanda menjadi raja di Tojo pada tahun 1928 menggantikan ayahnya (Kolomboi) yang dibuang oleh Belanda ke Makassar (Ujung Pandang) pada tahun 1905. Beliau dibuang karena menentang masuknya Belanda di daerah kekuasaannya. Kolomboi sampai akhir hayatnya tak per-

nah lagi kembali ke Tojo dan meninggal dunia di tempat pembuangannya.

Meskipun raja Tenjumbulu diangkat oleh Belanda menjadi raja di Tojo tahun 1928, dendamnya terhadap pemerintah Belanda yang mengasingkan ayahnya sampai meninggal dunia di tempat pembuangannya, tak pernah hilang dari dalam hatinya. Perasaan dendam inilah yang menjadi sebab utama perlawanannya menentang Belanda di wilayah kerajaan Tojo pada akhir tahun 1941 itu.

Yang menjadi pendorong utama bagi raja Tanjumbulu untuk meneruskan perlawanannya menentang kekuasaan pemerintah Belanda di Ampana pada awal tahun 1942 itu, ialah datangnya utusan Nani Wartabone dari Gorontalo, masing-masing bernama Day Wartabone dan Ismail Kamba. Ke dua orang utusan tersebut menemui raja Tanumbulu di rumahnya, menyampaikan pesan dari Nani Wartabone supaya segera mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda. Bangsa Belanda pada waktu itu telah terdesak menjadi apa yang disebut "the sick men" karena negerinya telah diduduki Jerman dalam perang dunia ke dua di Eropah dan negeri-negeri jajahannya di Asia dan Timur Jauh telah banyak jatuh ke tangan bangsa Jepang.

Pemberontakan bersenjata rakyat Sulawesi Tengah mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda sebagai akibat dari pengaruh gerakan Nani Wartabone dan kawan-kawannya di Gorontalo itu, terjadi pada tiga kota penting di daerah Sulawesi Tengah. Ke tiga kota yang dimaksud adalah kota Toli-Toli di Kabupaten Buol Toli-Toli, kota Luwuk di Kabupaten Banggai dan kota Ampana di Kabupaten Poso.

Perebutan kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda di kota Toli-Toli dipimpin oleh Awuy dan kawan-kawannya pada tanggal 1 Pebruari 1942, di kota Luwuk dipimpin oleh T.S.Bullah dan kawan-kawannya pada tanggal 12 Pebruari 1942, dan di kota Ampana dipimpin oleh raja Tanjumbulu pada tanggal 20 Pebruari 1942.

Perebutan kekuasaan di tiga kota tersebut berlangsung dalam waktu yang tidak begitu lama, karena kekuatan tentara Belanda

yang bertugas menjaga keamanan telah terbagi dan boleh dikatakan para pimpinannya bangsa Belanda sudah sebagian meninggalkan posnya di daerah Sulawesi Tengah. Kecuali di kota Poso dan Kolonodale tentara Belanda masih banyak terdapat di sana. Di kota Poso pimpinan tentara Belanda adalah Letnan II Van Dalen dan di kota Kolonodale pimpinannya adalah bekas kontroliur di kota itu ialah Letnan I De Yong. Kota2 Poso dan Kolodale inilah menjadi pusat pertahanan tentara Belanda terakhir sebelum tentara Jepang masuk dan berkuasa di daerah ini pada awal tahun 1942.

Kota Poso dan kota Kolonodale adalah kota-kota yang terakhir direbut oleh Jepang dari tangan pemerintah Belanda, yaitu sekitar pertengahan bulan Juni 1942 setelah melakukan pertempuran sengit yang memakan korban manusia cukup banyak di antara ke duanya.

Setelah rakyat Sulawesi Tengah berhasil merebut kekuasaan dari tangan pemerintah Belanda di tiga kota tersebut di atas pada bulan Pebruari 1942, maka mereka segera menaikkan bendera kebangsaan Merah Putih di atas tiang sambil diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilagukan para pemuda perebut kekuasaan itu.

Di kota Toli-Toli bendera Merah Putih dinaikkan di atas tiang di muka kantor PSII di kampung Lonti pada tanggal 1 Pebruari 1942. Di kota Luwuk mereka menaikkan bendera Merah Putih di depan kantor Gezagebber setelah mereka berhasil menawan/menangkap gezagebber bernama Walrabbe pada tanggal 12 Pebruari 1942. Di kota Ampana mereka menaikkan bendera Merah Putih di atas tiang di depan kantor swapraja kerajaan Tojo pada tanggal 20 Pebruari 1942.

Pada masa penjajahan militer Jepang di daerah Sulawesi Tengah perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat di daerah ini terjadi pada bulan Juli 1945 di desa Malomba, Kabupaten Buol Toli-Toli. Perlawanan ini mengakibatkan terbunuhnya seorang pejabat pemerintah Jepang di tempat itu, yaitu Ken Kanrikan Imaki.

Sebelum terjadi peristiwa Malomba di Toli-Toli, pada tahun

1944 terjadi perlawanan rakyat Salinggoha di Walea kepulauan, (Kabupaten Poso) menentang kekuasaan militer Jepang dipimpin oleh Talhata Darise dan kawan-kawannya. Perlawanan ini mengakibatkan banyak rakyat terbunuh karena diberondong dengan senapan mesin dari jarak jauh. Sedangkan pasukan rakyat yang mengadakan perlawanan tersebut hanya menggunakan parang, tombak dan keris sambil mengharapkan kepercayaan takhayul dengan mengandalkan kemampuan dan kesaktian benda-benda ajaib yang mereka gunakan itu.

Perlawanan rakyat terhadap Jepang lainnya terjadi pula di Balantak dan Ranga-Ranga, Kabupaten Banggai, dipimpin oleh Mantide dan di Wuasa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dipimpin oleh Abe Pande, Tarico Hio dan kawan-kawannya, menyebabkan sisa pasukan tentara Jepang di daerah itu menyingkir ke desa Tawaelia.

B A B III

PROSES DAN JALANNYA PERLAWANAN

Sebagaimana telah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya bahwa Wilayah Sulawesi Tengah terdiri dari 4 Wilayah Kabupaten dan pada setiap Kabupaten tsb. mempunyai sejarah perlawanannya sendiri-sendiri. Dikatakan demikian karena pada zaman penjajahan Wilayah-wilayah tersebut dihadapi oleh masing-masing raja pada setiap Wilayah kerajaan. Akan tetapi tidak semua kerajaan-kerajaan tersebut mengadakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, karena ada raja-raja yang terpengaruh oleh bujukan-bujukan dan rayuan penjajah dan akhirnya bekerja sama dengan penjajah. Dan yang mengadakan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme itu selain dari pada raja-raja yang menentang penjajahan ada pula rakyat yang tidak mau menerima perlakuan dari si penjajah, karena merasa hak dan kebebasan mereka di tindas oleh kaum penjajah tersebut, sehingga mereka mengadakan perlawanan sampai ke titik darah yang penghabisan demi mempertahankan tanah air. Untuk itu dalam uraian ini akan dikemukakan proses dan jalannya perlawanan pada setiap Kabupaten secara berturut-turut.

A. PERLAWANAN DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA.

1. *Gerakan perlawanan di Kerajaan Moutong (1896 — 1904)*

Perlawanan ini terjadi ± pada tahun 1896 — 1904. Menurut silsilah, raja Moutong yang pertama bernama Magalatung yang berasal dari turunan Mandar. Magalatung menjadi raja di Moutong karena mengawini raja puteri dari Moutong yang bernama Minarang. Dari perkawinan tersebut di karuniai 3 orang anak laki-laki, masing-masing bernama Pondatu, Paubi dan Massu. Pondatu kemudian menurunkan Borman, Paubi menurunkan Lamakaranu dan Massu menurunkan Tombolotutu. Ibu Tombolotutu bernama Lara sebelum ka-

win dengan Massu pernah kawin dengan Lakaiang, sehingga Tombolotutu mempunyai kakak tiri bernama Pawajoi dan Makarau, keduanya laki-laki.

Pengganti ~~Magalatung adalah anaknya yang bernama Pondatu~~. Pada masa Pondatu memerintah Belanda telah menyodorkan kontrak untuk ditanda tangani tetapi di tolak oleh Pondatu. ~~Untuk kedua kalinya Belanda menghubungi Pondatu~~ ketika beliau sakit, tetapi tetap di tolak sampai beliau wafat. ~~Setelah Pondatu wafat beliau diganti oleh Tombolotutu~~. Sikap Pondatu terhadap Belanda diwarisi pula oleh Tombolotutu. Pada saat Tombolotutu memegang tampuk pemerintahan sebagai raja Moutong, maka diangkatnyalah Daeng Malino menjadi Punggawa (Daeng Malino adalah keluarga Tombolotutu dari pihak ibunya). Daeng Malino di beri Wilayah mengatur pemerintahan di Tinombo sebagai wakil dari Tombolotutu.

Akan tetapi karena ambisi untuk menduduki takhta kerajaan di Moutong, maka Belanda memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan hubungan dengan Daeng Malino untuk menanda tangani kontrak pengakuan kepada Belanda pada tgl. 1 Mei 1896 dimana Belanda mengakui Daeng Malino sebagai raja di Moutong. Daeng Malino menanda tangani Lang Kontrak pada 16 — 9 — 1896. Daeng Malino kemudian tak mau membayar upeti pada raja Moutong yang berarti membangkang pada raja. Sikap Daeng Malino ini menyebabkan Tombolotutu sangat marah sehingga Daeng Malino ke Gorontalo meminta bantuan kepada Belanda (waktu itu Gorontalo telah dikuasai oleh Belanda). Untuk itu maka diadakan pertemuan dibawah pimpinan Ulea Wabu Jogugu Gorontalo yang bertindak sebagai penengah dalam pertikaian tersebut. Dan sebagai penutup pertemuan Ulea Wabu keduanya saling berjabat tangan. Tetapi uluran tangan Daeng Malino disambut oleh Tombolotutu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tetap di hulu kerisnya, pertanda ia sebagai

raja tetap memandang Daeng Malino selaku bawahannya dan tak mengakui Daeng Malino sebagai raja Moutong yang diangkat oleh Belanda. Kemudian Ulea Wabu dan Daeng Malino berjanji akan kembali ke Moutong tiga hari lagi untuk urusan perdamaian selanjutnya.

Tiga hari kemudian datang pasukan tentara Belanda dari Gorontalo langsung menyerang Moutong. Dalam pertempuran gugur dua anggota pasukan Tombolotutu bernama Laringgi dan Moloagu. Tetapi karena perlengkapan senjata Belanda lebih maju, terpaksa Tombolotutu bersama pengikut-pengikutnya menuju kegugusan pulau-pulau Walean (Togian), tempat saudara tirinya. Dalam pelayaran itu Tombolotutu diburu terus oleh Belanda dan terjadilah pertempuran di pulau tersebut. Tidak lama berada di pulau Walean, Tombolotutu kembali lagi ke Moutong.

Di Moutong datang lagi serangan tentara Belanda. Terpaksa Tombolotutu bersama pasukannya mundur ke Gunung Labu dan Gunung Taopa. Akhirnya beliau membuat pertahanan di Bolano Sauh (Kerajaan Lambunu), karena sebelumnya ada perjanjian antara raja Lambunu dengan raja Moutong, bahwa jika salah seorang diantara mereka di serang dari luar maka yang lainnya akan membantu.

Di Bolano Sauh inilah terjadi perlawanan yang paling hebat sehingga banyak perlengkapan perang Belanda hancur, seperti tenggelamnya kapal pendarat dan korbannya tentara. Bolano Sauh terletak di suatu dataran tinggi (gunung) yang menghadap ke laut dan tempatnya agak menjorok ke dalam (teluk) sehingga tentara Belanda yang berusaha memasukinya dengan mudah dapat di hantam dari atas dengan sumpitan, batu-batu besar dan senjata lainnya. Namun karena Belanda memakai senjata api, maka di pihak Bolanopun (Tombolotutu) banyak pula yang gugur sebagai pahlawan. Akibatnya pertahanan di tempat ini makin lama makin lemah hingga terpaksa Tombolotutu bersama sisa-sisa pasukannya mundur

lebih jauh ke atas gunung. Setelah Bolano di kuasai Belanda maka Wilayah tersebut di babat habis-habisan oleh Belanda. Dari Bolano raja Tombolotutu dan pasukannya mundur menyusuri deretan pegunungan ke arah barat ke Toli-Toli. Dari Toli-Toli terus ke selatan ke pegunungan Tinombo (Wilayah Daeng Malino) Pasukan ini diikuti terus oleh pasukan Belanda.

Di Gunung Tinombo, Belanda mengirim kembali kurir untuk membujuk supaya Tombolotutu menyerah saja, namun tetap di tolak oleh beliau. Sambil mengadakan perlawanan pasukan tersebut bergerak terus menerus dari gunung ke gunung hingga keselatan dan akhirnya tiba di Sojol. Di tempat ini beliau bekerja sama dan mendapat bantuan Kepala Kampung Bou bernama Kaleolangi (Papa Tarima) dan anaknya bernama Sinala. Akibatnya Kepala Kampung Bou tersebut di tangkap dan dibuang oleh Belanda ke Jawa hingga wafat dalam pengasingan. Di hutan-hutan Sojol tersebut lahir putera Tombolotutu yang bernama Datupamusu (berarti raja berperang) dan kemudian di kenal dengan nama Kuti Tombolotutu.

Sejak mundur dari Moutong raja Tombolotutu didampingi terus oleh isterinya. Karena diburu-buru terus maka raja Tombolotutu terus ke Selatan sampai tiba di Pantoloan. Di tempat ini ia dibantu pula oleh Makagili raja Banawa yang digelar Pue Mpudu. Akibatnya Makagili di tangkap oleh Belanda dan di buang ke Ujung Pandang pada tahun 1903 hingga wafat disana.

Dari Pantoloan raja Tombolotutu ke utara lagi hingga sampai ke Toribulu tempat mertuanya berkuasa. Di sana ia mengharapkan bantuan dari mertuanya, tetapi dengan alasan demi keselamatan rakyat permintaannya di tolak. Pada waktu itu raja sudah menderita sakit di kakinya sehingga ditandu. terpaksa raja Tombolotutu terus menyusuri pegunungan ke utara, maksudnya ke Kasimbar tetapi baru sampai di pegunungan Donggulu, di tempat yang bernama Uju Lari, ia telah di-

hadang oleh pasukan rakyat Donggulu yang dibantu oleh pasukan Belanda. Belanda mengeluarkan pengumuman, apabila raja Tombolotutu tak dapat ditangkap maka seluruh rakyat Donggulu akan di bunuh. Kalau Rakyat Donggulu berhasil menangkap atau membunuhnya maka mereka akan dibebaskan dari pajak (*heerendienst*). Selain pengumuman itu Belanda telah menawan pula mertua Tombolotutu dan dijadikan sandera. Ketika itu (tahun 1904) Kapal Perang Yava yang membawa pasukan Belanda berlabuh di perairan pantai Donggulu. Melihat posisinya yang telah terjepit dan ditambah perhitungan demi keselamatan rakyat dan mertuanya maka raja Tombolotutu bertekad dari pada jatuh hidup-hidup dan di tawan Belanda lebih baik mati di tangan pengawal sendiri.

Karena ia yakin memiliki ilmu kebal maka tak ada senjata yang dapat membunuhnya kecuali dengan memakai keris pusakanya sendiri yang bernama *Lacori*. Keris inilah yang diberikannya kepada pengawalnya lalu ia di tikam pada waktu duduk bersandar dibatu. Karena keris ini tertumbuk dibatu yang di sandarinya maka ujungnya patah. Jenazahnya kemudian diambil oleh mertuanya dan dikuburkan di Toribulu. Demikianlah akhir perlawanan raja Tombolotutu yang tak kenal menyerah dan bertekad dari pada mati di tangan Belanda lebih baik mati ditangan pengawalnya sendiri. Rakyat Donggulu akhirnya oleh Belanda tetap juga dikenakan beban harus membayar pajak atau *heerendienst*. Dengan berakhirnya perlawanan Tombolotutu maka dengan resmi pantai Utara Teluk Tomini dikuasai penuh oleh Belanda pada tahun 1904.

Perang Donggala (± 1902)

Meskipun raja Banawa sudah diikat dengan kontrak tetapi diantara hadat Pitunggotanya yaitu raja Gunung Bale yang bernama Malonda tetap tidak sudi menerima/mengakui pemerintah Belanda. Sebagai petugas pelabuhan (syahbandar) ia merasa benci melihat kedatangan Belanda. Kebenciannya makin bertambah dengan pembuangan pamannya raja Maka-

gili, oleh Belanda ke Ujung Pandang karena melindungi dan bekerja sama dengan Raja Moutong Tombolotutu. Sekalipun sebagai anggota Hadat Pitunggota ia turut menanda tangani perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Belanda, tetapi ia sendiri merasa tak terikat dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Ia tak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan hadat apabila dalam pertemuan itu hadir orang Belanda. Panggilan-panggilan kontroliur Belanda tak pernah dipatuhinya dan kepada utusan-utusan Belanda yang datang memanggilnya diperingatkannya agar kontroliur Belanda jangan sampai menginjakkan kakinya di Wilayah Gunung Bale.

Berhubung dengan sikapnya yang keras itu maka kontroliur Belanda di Donggala mengusulkan pada atasannya, Gubernur Makassar, agar raja Gunung Bale di buang karena membahayakan kedudukan Belanda. Usul pengasingan tersebut rupanya disetujui Gubernur hingga dalam tahun 1902 datanglah sebuah kapal perang Belanda di Donggala dengan seorang residen diperbantukan pada Gubernur di Makassar yang bernama J.A.G. Brugman. ¹⁾ Disamping itu kapal tersebut penuh dengan pasukan tentara Belanda yang telah dipersiapkan kalau sewaktu-waktu diperlukan.

Untuk menjemput Residen di kapal, kontroliur mengundang raja Lamarau, Pettalolo dan Malonda raja Gunung Bale, serta anggota hadat lainnya. Namun undangan tersebut tak dihiraukan oleh Malonda. Waktu itu raja Lamarau sementara sakit.

Kedatangan Residen itu adalah dalam rangka membawa surat kontrak dan bislit untuk mengangkat raja Banawa Lamarau sebagai pengganti Makagili yang telah diasingkan ke Makassar. Karena penolakan Malonda dan sakitnya Lamarau maka hanya kontroliur dan Pettalolo bersama pengawal-

1). Jamas Abdullah : *Sejarah Tanah Kaili*, Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala 1956, ha. 37.

nya (Haji Lawata dan Haji Monci) yang turun menjemput Residen ke kapal. Di kapal sekali lagi kontroliur menegaskan kepada Residen untuk membuang Malonda. Usul tersebut tak disetujui oleh Pettalolo yang mengusulkan agar ditempuh jalan damai melalui perundingan. Untuk itu Pettalolo berjanji akan menyelesaikannya bersama dengan Lamarauna. Walaupun begitu rupanya Belanda tetap akan mengambil tindakan pada Malonda.

Pasukan yang ada di kapal dipersiapkan untuk itu. Dan untuk memenuhi janjinya maka Pettalolo pergi sendiri ke Gunung Bale dan berusaha mengajak Malonda berunding untuk bertemu dengan Residen. Malonda menerima dengan syarat perundingan dilaksanakan di rumah Pettalolo, dan disetujui juga oleh Pettalolo. Sementara Malonda di rumah Pettalolo maka Belanda, yang tetap mau menangkap Malonda, menurunkan pasukannya dari kapal dan siap menyerang tempat Malonda berada. Sewaktu datang kerumah Pettalolo Belanda membawa juga pasukannya yang bertugas mengawal rumah itu, sementara Malonda berbicara dengan Pettalolo. Mengetahui gelagat tersebut pengawal Malonda menaruh curiga bahwa Pettalolo sudah sekongkol dengan Belanda. Dengan memegang tangan kanan Pettalolo, Malonda turun dari rumah dan ketika sampai di tanah langsung menikam Pettalolo sambil mengomando anak buahnya : " *Timbemo Ngana* " yang artinya " Mulai dan peranglah ". Serentak dengan itu pasukan Malonda menyerbu pasukan Belanda yang dibantu oleh pasukan Lamarauna sehingga terjadi pertempuran yang sengit. Sewaktu Malonda menikam Pettalolo seorang Pahlawan Malonda akan memarang Pettalolo dari muka tetapi serangan ini ditangkis oleh salah seorang pengawal Pettalolo bernama Haji Lawata. Tangkisan ini menyebabkan putusnya tangan Haji Lawata. Haji Monci seorang tangan kanan dari Pettalolo menjadi marah sewaktu melihat Pettalolo jatuh. Ia berpendapat bahwa kematian Pettalolo disebabkan oleh perbuatan Belan-

da. Dengan maksud untuk membunuh Residen yang waktu itu sudah ada dirumah kontroliur ia menyerbu kesana tetapi mendapat berondongan tembakan dari serdadu Belanda. Akibatnya dikuburkan berdampingan dengan mayat Pettalolo di dekat Mesjid Jami Donggala.

Dalam pertempuran ini Malonda berhasil lolos walaupun banyak pasukannya gugur. Pada malamnya, bersama pengawalnya Labadi dengan beberapa pasukannya yang setia, Malonda meninggalkan Gunung Bale dengan perahu menyeberang ke Tawaeli dan mendapat perlindungan dari Magau Tawaeli bernama Djaelangkara.

Atas kematian Pettalolo Belanda meminta pertanggung-jawab pada Lamarauna dan memerintahkan penangkapan atas Malonda. Dari Tawaeli Malonda lalu ke Toaya karena di tempat ini banyak keluarganya dan bermukim disitu agak lama.

Setelah suasana agak reda barulah Malonda kembali ke Gunung Bale dan langsung ditangkap oleh Lamarauna dan dibelenggu dibawah sebatang pohon. Karena tak ada reaksi perlawanan lagi akhirnya Malonda dilepaskan dan kembali ke Gunung Bale tetapi tidak diberi hak memerintah sampai ia meninggal pada tahun 1938. Ia merupakan raja Gunung Bale yang terakhir karena tak ada lagi penggantinya. Kelak untuk mengeratkan perhubungan antara raja Banawa dengan penguasa Gunung Bale diadakan perkawinan antara anak Lamarauna bernama Rohana dengan anak perempuan Malonda bernama Andi Raje (Busa Bulava). Juga diadakan perkawinan antara puteri Pettalolo dengan putera raja Lamarauna bernama Malaranga, puteri Lamarauna Andi Besse dikawinkan dengan Lamakaraka anak laki-laki dari Pettalolo. Demikianlah hubungan yang renggang antara tiga penguasa di Donggala di-eratkan kembali melalui perkawinan.

3. *Perang Sigi (1905 – 1908)*

Di Lembah Palu terjadi pula perlawanan yang dilakukan

oleh seorang tokoh bernama Karanja Lembah atau Toi Dampo. Sebenarnya pada mulanya yang memegang tampuk pemerintahan sebagai raja adalah Daeng Masiri tetapi dalam segala hal yang penting mendapat Toi Dampo inilah yang banyak didengar, termasuk sikap terhadap Belanda.

Sejak mula Toi Dampo atau Kerajalembah ini sangat benci pada Belanda dan menyarankan pada raja-raja dilembah Palu dan sekitarnya agar menolak kedatangan pemerintah Belanda di Sulawesi Tengah. Pengaruh Kerajalembah ini tidak terbatas pada golongan raja saja tetapi dia berpengaruh dan dicintai pula oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebenarnya diapun masih kemenakan dari raja Daeng Masiri. Karena pengaruhnya yang besar dan sikapnya yang keras pada Belanda maka Belanda yang sudah menduduki kerajaan-kerajaan pantai, seperti kerajaan Palu, Kerajaan Parigi, kerajaan Bana-wa dan Tawaeli bertekat menangkap dan membuang Kerajalembah alias Toi Dampo ini.

Beliau mempunyai watak keras dan sama sekali tak mau mengadakan hubungan dengan Belanda. Malah pada waktu Kruijt dan Adriani mengadakan penelitian di wilayahnya (1897) Toi Dampo sudah mulai curiga kedua orang itu dan tidak diizinkan lama-lama berada diwilayah Sigi. Semua orang Barat tak dipercayai dan dianggapnya datang untuk merampas kemerdekaan dan kekuasaan kerajaan dan rakyatnya. Oleh karena itu rakyat dipersiapkan untuk melawan karena diketahuinya lama atau lambat pasti serangan Belanda akan datang.

Sebelum Belanda datang kewilayahnya, pernah Kerajalembah mengundang madika-madika Palu, Tawaeli, Parigi, Kulawi dan Tojo (raja Kolomboi yang semuanya masih merupakan keluarganya, guna mengadakan pertemuan membicarakan persoalan kedatangan Belanda. Dalam pertemuan itu Kerajalembah memberi satu putusan : " Kita jangan tunduk kepada Belanda dan harus menentang mati-matian terhadapnya.

Karena sejak dari nenek moyang kita kita tak pernah melihat bangsa Belanda apalagi datang memerintah diwilayah kita ". Akan tetapi ada yang membocorkan keputusan itu keluar (melaporkan kepada Belanda).

Pada waktu Belanda menduduki dengan kekerasan pantai penggarahan Talise, Kerajalembah turun dengan pasukannya untuk mengusir pasukan Belanda itu, hingga terjadi pertempuran. Kekuatan Belanda ketika itu kecil sehingga mereka terpaksa mundur kembali ke Donggala. Kebenciannya pada Belanda merembet pula sampai kepada pengikut-pengikut kaki tangan Belanda. Karajalembah Toi Dompo menginstruksikan pada rakyatnya jika perlu pengikut-pengikut Belanda di bunuh saja. Terlaksana dengan pembunuhan seorang juru tulis yang bekerja pada Belanda di Tanaboa (Parigi) serta merampas harta benda Belanda di Tanaboa. Juga terjadi pembunuhan terhadap seorang opzichter (mandor jalan) di Bora.

Belanda merencanakan menyerbu Sigi dari tiga arah yakni dari Palu, Parigi dan Poso. Untuk persiapan itu maka ketiga tempat itu dikuasainya lebih dahulu. Mengetahui kerajaan-kerajaan Palu, Parigi, Donggala dan Tawaeli sudah jatuh ketangan Belanda, maka Toi Dompo menjadi sedih, tapi tekadnya tetap walau sendirian harus tetap melawan. Untuk menyelidiki kekuatan Belanda di Loji Parigi dikirimkannya kurir bernama Palukota dan Mojo. Kurir ini berhasil kembali membawa lari seekor kuda pilihan Belanda dan mengambil bintang jasa *Vierde Kruis* (bintang tanjung) dari poshouder Belanda di Parigi yang bernama Ince Dahlan. Maksud pengambilan kuda itu ialah agar Belanda terhalang mengadakan penyelidikan dan pengambilan bintang jasa sebagai satu ajakan pada rakyat Parigi supaya bangkit melawan Belanda.

Menghadapi sikap/tindakan Toi Dompo ini Belanda lalu menyiapkan pasukannya di Donggala, Parigi dan Poso. Mereka yang dapat diperalatnya antara lain Inco Muhamad, Karaeng Putih, Yojovuri, Mangge Cinco (Yahya), semuanya

tinggal di Palu dan Marakaili di kampung Kalukubula. Mula-mula rencana Belanda untuk menangkap Toi Dampo dapat dicegah oleh raja Tawaeli Jaelangkara alias Mangge Dampo karena ia menjadikan dirinya sandra pada Belanda. Memang hanya Jaelangkara saja yang disegani oleh Toi Dampo (Kerajalembah). Mereka berdua masih terpaut sebagai ipar. Namun karena ternyata kemudian Jaelangkara pula yang membantu dan melindungi Malonda (setelah berontak di Donggala), maka akhirnya Jaelangkara pun dicurigai Belanda walaupun Tawaeli sudah dikuasainya. Jaelangkara, raja Rawaeli ini, akhirnya dibunuh secara licik oleh kaki tangan Belanda ketika beliau memeriksa perbatasan wilayahnya dengan perbatasan Wilayah Toli-Toli. Peristiwa ini terjadi dipinggir pantai Baerumu (Sirenja) ketika ia kembali dari Toli-Toli.

Karena Belanda mencurigai terus Toi Dampo Karajalembah, dikirimlah seorang kurir bernama Ince Muhamad ke Watunonju tempat kediaman Toi Dampo, sambil membawa biji opium (candu) penebus kuda yang diambil dari Parigi. Namun kuda-kuda kurir inipun dirampas sehingga terpaksa ia jalan kaki pulang ke Palu. Akibat dari ini semua Belanda lalu menyiapkan penangkapan terhadap Toi Dampo. Pasukan Belanda disiapkan dari Palu dengan penunjuk jalan bernama Ince Muhamad, dibantu pula oleh sekutu-sekutunya Karaeng Putih, Yojoburi, Mangge Cinco (Yahya) dan Marakaili. Dari Poso pasukan Belanda diberangkatkan ke Parigi lalu memotong gunung melalui Sausu tembus ke Sigi dengan penunjuk jalan Ince Dahlan. Pemimpin pasukan Belanda adalah Letnan S. Voskuil. Ditempat kediaman Toi Dampo di Watunonju pasukan-pasukan Belanda menyerang serentak ketika Toi Dampo belum begitu siap karena tak menduga adanya serangan tiba-tiba ini. Terjadilah pertempuran sengit di Watunonju sehingga beberapa orang pasukan dari kedua belah pihak jatuh sebagai korban. Akan tetapi karena persenjataan yang tak seimbang, Toi Dampo

akhirnya tertangkap dan dibawa ke Palu dengan menyeberang kali Palu dari Kalukubula ke Tinggede. Toi Dampo dipukul oleh Marakaili yang sudah diperalat Belanda dan seterusnya ia dibawa ke Palu dimana tiga buah kapal Belanda telah dipersiapkan untuk membawa Toi Dampo ke Jawa dan diasingkan ke Sukabumi.

Besoknya pasukan Belanda datang dengan perlengkapan yang lebih banyak. Seperti halnya pada penyerangan pertama, Belanda diserang disaat mereka lagi istirahat. Walaupun hasil yang dicapai oleh rakyat Sigi Bora tidak sebesar pada pertempuran pertama tapi Belanda dipukul mundur lagi ke Watunonju. Ditempat inilah Belanda mendatangkan pasukan dari Palu, Dolo sehingga perlawanan rakyat terpaksa mengundurkan diri ke Gunung dan hutan-hutan. Belanda lalu merubah siasat dengan menggunakan Pue Langa yang tadinya ditawan Belanda, memerintahkan agar Pue Langa menyuruh rakyatnya kembali dari gunung dan hutan-hutan dan mengadakan persahabatan dengan Belanda. Pue Langa lalu dijadikan raja menggantikan kakaknya Karajalembah dan kelak menandatangani korte verklaring pada tanggal 3 Desember 1908 dengan nama Itondei. Karena patuh pada rajanya rakyat menghentikan perlawanan.

Pue Langa (Itondei) (raja puteri) didampingi Dewan Pitunggota dan Tadulakonya bernama Ponulele. Walaupun kelihatannya Sigi sudah aman tapi sebenarnya keadaan masih belum aman betul-betul. Karena rakyat sakit hati akibat rajanya dibuang, maka secara diam-diam ada gerakan untuk mengadakan perlawanan pada Belanda, sering-sering diadakan rapat gelap dipimpin oleh Mahasuri, Palarante dan Lamariapa. Hasil rapat adalah tindakan mengacau keamanan. Hal ini sebenarnya diketahui oleh Ponulele sebagai Tadulako tapi tidak dilaporkan karena secara diam-diam ia setuju pada rencana itu. Oleh karena Pue Langa ternyata tak dapat mengatasi keadaan (masih sering ada pengacauan terutama

dari rakyat Lande Raranggona) maka akhirnya Belanda mengakui bahwa Karajalembah yang dapat mengatasi dan menguasai rakyatnya. Ia lalu didatangkan dari Sukabumi pada tahun 1914 dan dikembalikan menjadi raja Sigi. Ia disambut secara besar-besaran secara adat oleh rakyatnya ketika kembali di Palu. Walaupun Toi Dampo sudah dikembalikan ke Sigi tetapi Belanda tetap mencurigainya sehingga langkah-langkah dan perbuatannya tetap diawasi Belanda melalui Bestuur Assisten di Biromaru yang pada waktu itu dijabat oleh Haji Sunusi. Memang ternyata Toi Dampo tidak berubah pendiriannya terhadap Belanda walaupun ia telah diasingkan. Dalam hubungan tersebut A.C. Kruyt mencatat dalam bukunya berjudul *De West Toradj's op Midden Celebes* (halaman 98): Peristiwa penyerangan ke Watunonju ini terjadi pada hari Jumat bulan September 1905 jam 10.00 pagi" (terjemahan).

Mendengar ayahnya tertawan oleh Belanda maka putera dari Toi Dampo bersama Malasingi sangat marah dan dengan parang terhunus ia menyerbu ketengah-tengah pasukan Belanda hingga beberapa orang tentara Belanda tewas dan luka-luka tapi dia sendiripun ikut gugur kena brondongan tembakan.

Selain itu rakyat Sigi segera berkumpul dengan kelengkapan persenjataannya lalu mengadakan pengejaran dipimpin oleh dua orang kemenakan Toi Dampo bernama Lamacarato (Putera Jaelangkara dan Lamasatu. Pertempuran sengit terjadi di Kalukubula. Serangan rakyat secara frontal menimbulkan korban yang cukup banyak dipihak Belanda. Pasukan Belanda hanya dapat diselamatkan dengan bantuan tentara cadangannya dari Palu.

Karena pembuangan atas diri Toi Dampo ke Sukabumi maka kemarahan rakyat makin bertambah. Dua utusan rakyat Sigi masing-masing Pue Langa, saudara perempuan Toi Dampo Karajalembah, dan Simbasigi Toma Intolipe

segera ke Palu mengadakan perundingan dengan Belanda supaya Toi Dampo dapat dikembalikan ke Sigi. Ternyata dua utusan inipun ditawan oleh Belanda dan hanya dapat dibebaskan setelah ditebus 100 ekor kambing. Rakyat Sigi dan Biromaru lalu merencanakan serangan umum terhadap Belanda di Palu tetapi hal ini tercium pula oleh Belanda. Belanda menyerang lebih dahulu ke Bora, pusat pertahanan Sigi. Karena rakyat telah menduga kedatangan Belanda maka Bora dikosongkan; semua rakyat mengungsi ke gunung dan membuat kubu pertahanan. Hanya delapan pemuda yang tinggal di kampung bersembunyi mengintai gerakan Belanda. Melihat tak ada perlawanan, pasukan Belanda beristirahat di Bantaya (rumah adat) tetapi sekonyong-konyong delapan pemuda tadi dipimpin oleh Lasoso, Tuvaya dan Kanasoki menyerbu ke tengah pasukan Belanda yang sedang istirahat sambil berseru memberi isyarat pada rakyat di Gunung. Serangan ini mengakibatkan kematian yang sangat banyak pada pasukan Belanda termasuk seorang komandannya tewas. Sisa pasukan Belanda lari ke Dolo. Akibat dari pertempuran ini rakyat menyingkir ke gunung karena diperhitungkan tentu Belanda akan kembali lagi menyerang. Hanya dua pemuda pengintai yang tinggal di kampung, masing-masing Langgo dan Runda dari Watunonju.

Rakyat Raranggonau yang tak mau tunduk pada Belanda meninggalkan perkampungannya pada tahun 1916 menuju ke pegunungan yang lebat "Manggalai" (kelak bernama Nyilalaki atau Nakilalaki). Katanya mereka ke sana atas instruksi dari Tomai Dampo yang pada satu pesta di Maenusi Daerah Palolo pernah menyampaikan pesan pada pengikut-pengikutnya untuk meninggalkan tempatnya/kampungnya karena Toi Dampo sendiri dalam tempo tak lama akan bergabung dengan mereka.

Karena diketahui Belanda Toi Dampo memimpin lagi rakyatnya untuk berontak, kedua kalinya ia ditangkap dan dibuang ke Sukabumi dan meninggal disana pada tahun 1917.

Dibuangnya Karajalembah untuk kedua kalinya tidaklah berarti bahwa perlawanan rakyat sudah berhenti. Pemerintah Belanda lalu menyodorkan dua orang calon raja Sigi yaitu Simba Sigi dan Pue Toi (Pue Langa atau Itondei). Dalam pemilihan ini sebenarnya dari segi adat Samba Sigi yang berhak menjadi Raja sesuai silsilah keturunannya, tetapi Pue Toi mengusulkan karena ia seorang wanita maka biarlah ia tetap jadi raja dan Simba Sigi karena ia laki-laki bisa selalu tornei, menjadi Madika Malolo. Usul ini diterima Belanda sehingga tetaplah Pue Toi menjadi raja puteri.

Gerakan yang penah ada sebelum Karajalembah dimulai lagi pada tahun 1914. Adanya gerakan-gerakan ini akhirnya tercium juga oleh Belanda melalui mata-matanya sehingga Pue Toi dianggap bersekongkol dengan saudaranya Karajalembah karena ia tidak menindak komplotan yang mengacau itu. Akibatnya ia diturunkan dari tachtanya dan oleh Belanda didudukkanlah Lamakarate seorang bangsawan dari Tawaeli (anak dari Jaelangkara) yang juga kemenakan dari Karajalembah.

Dibawah Lamakarate keadaan dalam negeri mulai agak aman. Tiga tokoh yang sering mengadakan rapat-rapat gelap untuk mengorganisir tentara pada Belanda ditangkap dan dibuang ke Jawa. Dua orang meninggal dipembuangan yaitu Lamariapa dan Mahasuri. Palarante sempat pulang ke Biromaru sesudah habis hukumannya. Dengan tertangkapnya tiga tokoh tadi maka keadaan mulai tenang tetapi rakyat Lando (Raranggonau) masih tetap tak mau takluk pada Belanda.

Raja Lamakarate mengirim dua utusan ke Lando Marajati dan Sampale untuk menyampaikan pesan supaya Lando menghentikan sikapnya yang membangkang itu. Jawaban Tadulako Lando : "Kami tidak mau tunduk pada Belanda" ditambah pula dengan ucapan : "Maloi maputi ratarima kami", ("Merah putih kami terima"). Makna ucapan ini, biar darah mengalir pada titik terakhir rakyat Lando tidak

akan tunduk kepada pemerintahan Belanda. Namun kedua utusan itu tetap memaksakan kehendaknya supaya rakyat Lando merobah sikapnya.

Kedua utusan diserang oleh Tadulako Lando hingga Marajati terbunuh dan Sampale meloloskan diri melapor pada raja. Tadulako Lando lalu membunyikan genderang perang. Karena peristiwa ini tentara Belanda lalu menyerang Lando disambut rakyat Lando yang sudah siap. Terjadi lah perang tanding dimana Belanda menderita banyak kekalahan kena sumpit *wila*, tombak dan *guma*. Sebaliknya di pihak Lando pun banyak yang gugur kena tembakan-tembakan Belanda. Tadulako Lando yang terkenal waktu itu Lahulemba, Tirolemba dan Toma Ipedi.

Peristiwa inilah yang dikenal dengan nama perang Lando, dan lanjutan dari perlawanan Karajalembah (perang Sigi). Sejak itulah orang-orang Raranggonau yang tidak mau tunduk kepada Belanda masuk hutan gunung dan kemudian menjadi salah satu suku terasing di Sulawesi Tengah.

4. Perang Kulawi (1904 — 1908).

Kerajaan Kulawi dibawah pimpinan raja Intovoalangi yang lebih dikenal dengan panggilan Toma Itorengke juga mempunyai sikap yang keras terhadap Belanda. Tiap kali Belanda berusaha memasuki daerahnya selalu gagal karena perlawanan yang ketat dari rakyat.

Belanda lalu merencanakan menyerang dengan persiapan yang seksama. Gerakan dari Palu ke Kulawi meliwati medan yang berliku-liku dan jurang-jurang yang dalam. Ditempat yang strategis inilah rakyat Kulawi mengadakan penghadangan terhadap setiap kedatangan Belanda. Sebelum menyerang, Belanda mengirim dua orang utusan untuk membujuk raja Kulawi supaya menyerah saja pada Belanda tak usah melawan. Utusan itu adalah Lamarauna, raja Donggala, dan Yojokodi, raja Palu. Toma Itorengke menolak mentah-mentah ajakan itu. Beliau merasa terhina dan kepada

utusan ia katakan bahwa ia sama sekali tidak mengizinkan Belanda menginjakkan kakinya di wilayah Kulawi, dan kalau berani melanggarnya akan ditentangnya dengan keke-
rasan.

Toi Torengke menduga Belanda segera akan menyerang. Karena itu genderang tanda bahaya segera dibunyikan sehingga panglima-panglima dan tentaranya lengkap dengan senjatanya siap sedia. Yang dijadikan benteng pertahanan adalah gunung Momi. Menurut ceritera orang-orang tua, tempat itu dilengkapi dengan 500 pucuk senjata api terdiri dari meriam-meriam bermacam-macam ukuran serta senapan-senapan disamping tombak, keris, guma (parang), sumpit dan onggokan batu-batu besar.

Tahun 1904 Belanda mulai memberangkatkan tentara pilihannya dengan senjata-senjata yang serba lengkap menuju ke Kulawi. Di Tuwa mereka berhenti untuk mengatur strategi penyerbuan, beberapa hari kemudian mulailah diadakan penyerbuan disambut dengan tembakan meriam, sumpit, panah dan gulingan batu-batu bagai hujan. Terpaksa Belanda mundur ke Tuwa dengan membawa korban. Pertempuran itu berlangsung sampai tiga bulan.

Yang menjadi penunjuk jalan Belanda adalah Ince Muhammad dari Palu. Dari dialah Belanda memperoleh informasi bahwa ada jalan lain untuk menuju ke Kulawi, dan yang mengetahui adalah Madika Tuwa, Jaraba. Mula-mula Jaraba menolak tetapi karena disiksa, antaranya dipanggang diatas api, maka terpaksa ia memberitahukan jalan itu, yaitu mengitari aliran sungai Miu kohulu tembus ke kampung Beteha di Kulawi. Untuk mencegah kemungkinan musuh menempuh jalan tersebut, orang-orang Kulawi semula merencanakan memperkuat pertahanan di Pedoa dengan mengirim 70 orang. Akan tetapi pasukan Belanda yang telah diperkuat dengan bantuan dari Palu dan Manado, setelah mendapat informasi adanya jalan lain ke Kulawi melalui

sungai Miu lalu mengirimkan pasukannya melalui jalan tersebut dan sebagai pancingan supaya orang Kulawi tak curiga dikirim pula pasukan mengadakan serangan ke gunung Momi. Akibat pancingan ini tak jadinya pasukan Kulawi dikirim memperkuat pertahanan Pedoa sehingga tentara Belanda hanya menemui perlawanan tak berarti sebelum masuk Kulawi dari belakang. Demikianlah pada tahun 1905 pasukan Belanda berhasil tembus ke Kulawi dari arah belakang dan memanfaatkan suatu tradisi di Kulawi, yaitu apabila musuh menaikkan bendera putih maka pertempuran harus dihentikan. Sewaktu pasukan Belanda sampai di Mamo (Kulawi) dinaikkannya bendera putih. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari istana raja yang terletak diatas bukit yang bernama Lemo. Sebagai balasannya raja Toi Torengke menyuruh naikan pula bendera putih dari kain kulit kayu (disebut *Tobula*).

Karena pertahanan Kulawi dipusatkan di gunung Momi, maka Kulawi dapat dikatakan kosong waktu itu bahkan perempuan dan anak-anak disingkirkan ke Gimpu. Yang ada di istana waktu itu hanya raja Toi Torengke dan Mekuasa. Mereka berdualah yang ditemui ketika kurir Belanda tiba yaitu masing-masing bernama Yojobula dan Yojovuri berasal dari Palu.

Toi Torengke dipaksa menyerah dan disuruh mengumpulkan rakyat dari gunung Momi. Kalau tidak maka ia bersama keluarganya akan dibunuh dan Kulawi akan dibakar habis. Karena ancaman ini, dan melihat kenyataan pasukan Belanda sudah masuk Kulawi, maka terpaksa Toi Torengke memanggil rakyatnya pulang dari gunung Momi hingga perlawanan berhenti. Setiba di Kulawi para hulu-balang Kulawi yang pulang dari gunung Momi masih mau melawan tetapi dicegah oleh raja untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak. Dalam buku *Meededeelingen van Afdeeling Bestuurzaken van Binnenlandsch Bestuurs*

seri A No. 3 dapat dibaca bahwa pada tanggal 30 Nopember 1908 Intowea Tomatorengke menandatangani *korteverklaring*. Karena jiwa Tomatorengke yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda maka setelah terpaksa menandatangani *korteverklaring* tersebut lalu mengundurkan diri sebagai raja dan menunjuk kemenakannya bernama Tomampe menggantikannya menjalankan pemerintahan di Kulawi. Tomatorengke meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1948 di Kulawi.

5. *Perlawanan sikap raja Parigi bernama Vinono bersama Putranya (Hanusu).*

Walaupun sejak tahun 1897 raja Parigi I Djengintombaru, sudah diikat dengan kontrak pengakuan pada Belanda, tetapi ternyata pada awal abad ke 20 raja Parigi bernama *Vinono* bersama anaknya bernama Hanusu memimpin rakyatnya melawan Belanda. Terkenal sumpah raja *Vinono "Mabula boga rivana, pade meta'a mbaeva Balanda"* (artinya "Nanti putih monyet di rimba baru berhenti melawan Belanda").

Perlawanan ini dapat ditekan Belanda dan akibatnya Hanusu dibuang ke Tondano (Minahasa). Tahun 1917 ia baru dikembalikan dan diangkat menjadi raja Parigi setelah menandatangani *korteverklaring* pada 5 Pebruari 1917.

6. *Peristiwa Dolago (1936).*

Ketika terjadi peristiwa Dolago (Parigi) pada tahun 1936, Pemerintah Hindia Belanda ditempat itu menuduh anggota-anggota SI dibawah pimpinan Marjun Habie dan Abdul Wahid Toana hendak memberontak untuk menggulingkan dan merebut kekuasaan dari tangan raja Parigi, Tagunu Hanusu.

Sebenarnya ada rencana mereka hendak memberontak karena tidak mau membayar pajak (*belasting*) dan kerja rodi

(*hecrendienst*). Tetapi baru saja pemuda-pemuda berlatih main silat oleh pelatih utamanya bernama Mahatini, hal ini telah tercium oleh pemerintah Belanda sehingga terjadi penangkapan-penangkapan (sebagai bukti adanya rencana untuk memberontak dapat dibaca pada foto copy Relaaas pada lampiran belakang).

Dengan berdasarkan tuduhan diatas, maka pemerintah menangkap dan memasukkan ke dalam penjara Marjun Habie dan Abdul Wahid Toana (= Ay Toana) bersama beberapa orang pengikutnya, diantaranya Mahatini, Soda, Udo Soda dan lain-lain. Mahatini, Soda dan anaknya Yudo Soda kemudian dibuang ke Manado.

Di dalam tahanan Abdul Wahid Toana secara diam-diam mengirim surat kepada M.H. Thamrin yang pada waktu itu menjadi anggota *Volksraad*. Kira-kira pada tahun 1938 M.H. Thamrin bersama Mandagie datang ke Donggala dan dijemput oleh Andi Laparenrengi Lamarauna dan menginap dipesanggrahan Donggala. Tidak lama setelah kedatangan M.H. Thamrin dan Mandagie tersebut maka Marjun Habie dan Abdul Wahid Toana dibebaskan dari penjara setelah kurang lebih dua tahun meringkuk dalam tahanan penjara Parigi.

7. Perlawanan Lasadindi.

Pada waktu Serikat Islam (SI) berkembang di Sulawesi Tengah maka di wilayah Sindue (daerah pantai Barat Kabupaten Donggala) dengan Enu sebagai pusat hidup seorang tokoh penyebar SI. Tokoh tersebut dikenal oleh umum dengan nama Mangge I Rante (nama sebenarnya adalah Lasadindi).

Dalam struktur pemerintahan di Sindue Lasadindi atau Mangge I Rante ini memegang jabatan komisariss pertanian, sehingga karena kedudukannya ini maka ia banyak melakukan perjalanan keliling dan sering berhubungan de-

ngan masyarakat suku-suku terasing di wilayah pantai barat Sulawesi Tengah, bahkan sampai ke daerah Sulawesi Selatan di daerah Mamuju (Mandar). Sebagai anggota SI maka pelaksanaan asas non-koperasi pada pemerintah Hindia Belanda, diujarkannya pada suku-suku terasing dengan mau membayar pajak pada pemerintah Hindia Belanda.

B. PERLAWANAN DI KABUPATEN POSO.

1. *Perlawanan Perorangan.*

- a. Tantogia alias Mowote dan Endera melakukan perlawanan di Tamungkudena (Tentena).
- b. Tancigi dan Tampayau (nama aslinya Palalo) melawan di Kandola (Tindole) ± 1907. Tampayau kemudian tertangkap lalu dibunuh dan dikuburkan di tepi danau Poso ditempat yang bernama Tanjung Bone (Tando Bone). Kemudian keluarganya menggali kuburan tersebut dan dipindahkan ke kampung halamannya.
- c. Kolomboi melawan di Buyumboyo tetapi akhirnya ditangkap Belanda dan dibuang ke Ujung Pandang sampai meninggal disana dan dikuburkan di Maros.
- d. Perlawanan pribadi yang dilakukan oleh seorang yang bernama Rusu Lembah (Tabatoki) di Tentena. Perlawanan ini berakhir dengan penangkapan dan pemenjarannya. Ia meninggal di penjara.
- e. Kontrolleur Poso I Engelenberg ketika berkunjung ke Sausu disambut dengan tidak sopan oleh pejabat kepala Sipa. Akibatnya ia lalu mengirimkan tentara marsose ke Sipa dan memaksa orang-orang Sausu membuat jalan raja dari Sausu ke Parigi.
- f. Tanggal 23 Januari 1904 atas perintah raja Sigi, orang-orang Napu dibawah pimpinan Tadulakonya menyerang ke Tambarana (daerah Sausu) lalu membunuh 2 orang saudagar Minahasa yang menjadi kaki tangan Belanda.

2. Perang Pekurehua (1907).

Tiga tahun sebelum pecah pertempuran di Napu pemerintah Belanda menduduki seluruh Lore yang terdiri dari 4 (empat) daerah lembah : Lembah Tawaelia (lembah Sedoa), lembah Pekurehua/Napu, lembah Besoa dan lembah Bada. ketika itu Belanda merencanakan untuk mengangkat seorang raja/magau untuk wilayah Lore. (Pembentukan kerajaan baru karena sebelumnya ke 4 daerah lembah tadi berdiri sendiri-sendiri).

Ama sebagai bangsawan/penguasa di Napu memiliki jiwa yang tak mau takluk pada perintah Belanda; semua perintah dari Belanda tak mau ia mentaatinya.

Awal tahun 1907 ia dipanggil menghadap perintah Belanda di Poso dimana beliau dipaksa untuk mentaati pembayaran pajak perintah kerja paksa, kerja rodi dan sebagainya. Akan tetapi kesemua perintah ini tak ada yang ditaatinya sewaktu kembali ke Napu. Pemerintah Belanda di Poso lalu merencanakan hukuman pengasingan bagi Ama (Umana Soli) beserta bangsawan-bangsawan lainnya yang membangkang.

Dengan tipu muslihat Belanda memanggil semua bangsawan di Lore yang berpengaruh pada masyarakat supaya datang ke Mapane untuk berunding. Disana sudah disediakan sebuah kapal untuk mengangkut mereka ketempat perasingan.

Panggilan ini tidak ditaati oleh Ama, ia hanya mengutus wakilnya. Ternyata kemudian setiba utusan itu di Mapane terus diperintahkan naik ke kapal dengan alasan perundingan akan dilakukan diatas kapal dan tak seorangpun yang diizinkan membawa senjata. Kenyataan bahwa hal itu adalah satu tipuan, maka bangsawan Napu/Besoa langsung melarikan diri kembali ke Napu dan Besoa.

Disamping peristiwa diatas terjadi pula pembunuhan seorang nahkoda dipantai pesisir Poso. Hal ini disebabkan

orang-orang Napu yang dipimpin oleh Kareba (Umana Baturu) bermaksud menjual rotannya pada Nahkoda tersebut. Tetapi tak jadi kecocokan tentang harga maka timbullah perkelahian hingga Nahkoda tersebut tewas. Seorang pembantu dari Nahkoda berhasil melarikan diri lalu melaporkan hal ini pada pemerintah Belanda di Poso. Belanda lalu mengiriskan satu peleton serdadunya ke Napu pada bulan Juli 1907 untuk menangkap Ama (Umana Soli) bersama bangsawan-bangsawan lainnya. Menjadi petunjuk jalan/juru bahasa adalah Ince Dahlan dan Ahmad Dahlan.

Pasukan Belanda setiba di Napu terus ke Peore, tempat Ama sekeluarga tinggal tetapi waktu itu ia sedang berada dikebunnya di Halukoi. Belanda mengirim dua kali utusan untuk memanggilnya, tetapi tetap ditolak oleh Ama. Pada panggilan ketiga kalinya yang dilakukan Ince Dahlan dan Ahmad Dahlan dibantu pula oleh keluarga dari Ama sendiri yang berusaha mencegah terjadinya pertumpahan darah, akhirnya Ama bersedia menemui pasukan Belanda dengan mengajukan syarat tidak ditangkap atau diasingkan.

Ama dengan pengikutnya yang bersenjata lengkap lalu memacu kudanya ke Peore. Setibanya ditempat itu ia disambut oleh komandan tentara Belanda dengan jabatan tangan yang disambut oleh Ama dengan tangan kiri. Komandan itu meminta tangan kanan Ama tetapi tetap juga tangannya diulurkannya. Akhirnya komandan itu terpaksa juga menerimanya lalu digenggamnya dengan kuat. Melihat gelagat itu spontan ia mengomando anak buahnya supaya serentak melawan. Dia sendiri menikam komandan yang menggenggam tangannya hingga mati tetapi beliau sendiri pun gugur dibrondong senapan pasukan Belanda. Terjadinya pertempuran sengit senapan melawan parang dan tombak sehingga banyak jatuh korban di kedua belah pihak.

Sebenarnya pasukan Napu telah nekat bertempur habis-habisan, apalagi melihat pemimpinnya Ama telah gugur

maka berdatanganlah rakyat dari kampung-kampung hendak membalas dendam tetapi seorang ibu bernama Polite (Umama Moso) cepat-cepat mengibarkan bendera putih dari kain kulit kayu (fuya) pertanda pertempuran dihentikan. (Adalah menjadi tradisi di Sulawesi Tengah dahulu apabila bendera putih dikibarkan maka pertempuran harus dihentikan). Ibu tersebut menaikkan bendera itu karena ngeri melihat semua saudara laki-lakinya gugur.

Pertempuran berhenti dan tentara Belanda kembali ke Poso dengan korban yang cukup banyak. Dari satu peleton tinggal 8 (delapan) orang yang masih hidup termasuk yang luka parah. Dalam perjalanan ke Poso korban yang luka banyak pula yang meninggal. Termasuk yang selamat dari pasukan Belanda adalah dua orang penunjuk jalan serta beberapa tukang pikul perlengkapan Belanda.

Pada peristiwa itu Ama gugur bersama dua orang menantunya bernama Sologi dan Makada. Gugur pula waktu itu orang yang bernama Ntange dan Lawei (Umana Sebe) kakak kandung dari Kabo. Yang tersebut terakhir ini (Kabo) kelak diangkat menjadi raja Lore.

Ama bersama 14 (empat belas) orang pengikutnya lalu dikuburkan di Poso dalam satu lubang. Begitu pula serdadu-serdadu Belanda yang mati dikubur dalam satu lubang. dan sejak itu penguasaan langsung Belanda atas Napu, Bada, Besoa dan Tawaelia berlangsung. Pajak dan rodi dijalankan oleh raja rangkatan Belanda itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Belanda. ²⁾

3. Perang Mori Kolonedale (1907)

Setelah Belanda berhasil menaklukkan suku-suku di sekitar Poso, mereka mengirimkan ekspedisi ke Mori/Kolo-

2). Informasi tertulis dari Ishak Tokare di Poso tanggal

1 - 10 - 1978.

nedale. Rakyat Mori dipimpin oleh rajanya Marunduh II mengadakan perlawanan mati-matian karena tak sudi dijajah. Akan tetapi karena persenjataan yang tidak seimbang, maka raja Marunduh mengambil siasat pura-pura menyerah dengan menaikkan bendera putih. Waktu itu yang menjadi tempat pertarungan/pertahanan suku Mori adalah Rano Tole, suatu tempat di tepi danau kecil diatas gunung. Yang menjadi penunjuk jalan merangkap juru bahasa Belanda adalah seorang Minahasa bernama Wenas. Tentara Belanda berkekuatan ± 70 orang dipimpin oleh Onder Luitenan (Letnan II) Ndro Leno (menurut ucapan orang-orang Mori).

Karena mengira Raja Marunduh betul-betul menyerah maka pasukan Belanda tanpa curiga memasuki Rano Tole dan disambut pula oleh raja dengan ramah tamah, malah diadakan pesta yang meriah. Prajurit-prajurit Mori dengan menyamar memakai pakaian upacara (memakai selempang dan destar bate) sambil menyembunyikan golok dibalik selempang, melayani pasukan Belanda makan minum. Suguhan minuman adalah arak atau saguer (tuak enau). Tibatiba dalam kemeriahan pesta itu raja mengomando "hioo" (artinya mulai) maka bagaikan singa menerkam mangsa, golok pasukan Mori menikam serdadu-serdadu Belanda yang udah mulai mabuk. Semua pasukan Belanda dibunuh, termasuk Luitenannya. Hanya Wenas juru Bahasa yang tidak dibunuh dan ketika dilepas lalu lapor kepada tentara Belanda di Poso.

Setelah peristiwa Rano Tole ini raja Marunduh memindahkan pertahanannya ke Matandan/Sampalowo, suatu daerah rawa yang ditumbuhi pohon-pohon sagu ± 16 km dari pantai. Benteng pertahanan disitu dikelilingi dengan tembok batu dan tanah dan diatasnya ditanami bambu. Tempat itu hanya dapat dicapai dengan naik perahu. Belanda memusatkan tentaranya di Bungintimbe dekat muara sungai Laa yang juga merupakan pelabuhan tempat berdagang para

pedagang dari luar dengan suku Mori. Dari Bungintinbe ke Kolonedale ada dua jalan :

— dengan naik perahu mengikuti sungai Laa.

— mengikuti jalan laut masuk teluk Kolonedale/teluk Tolo. Karena sukarnya mencapai benteng Maunduh di Matandan/Sampalowo maka Belanda merobah siasat pura-pura mau berunding untuk perdamaian. Tawaran Belanda ini diterima raja Mori dengan syarat Belanda harus datang ke Matandan. Belanda mengirimkan 2 (dua) orang perwira Letnan Kies dan Mathes dikawal 40 orang tentara bersenjata lengkap dengan seorang Bugis sebagai juru bahasa yang bernama Maradi.

Ternyata Belanda datang bukan untuk berunding tetapi hanya menyampaikan ultimatum :

1. Marunduh harus menyerah, jika tidak tentara Belanda akan menyerang.
2. Marunduh harus kerahkan rakyat untuk membangun kota Kolonedale.

Menghadapi kenyataan ini Marunduh sangat kecewa. Tetapi karena posisinya sulit maka dia tidak menyerang, malah pura-pura menyerah mengikuti kehendak Belanda. Kebenciannya pada Belanda makin menjadi karena Letnan Kies menjabat tangan permaisurinya Welaina, suatu hal yang tabu menurut adat Mori dan dianggap sebagai suatu penghinaan. Marunduh mempersiapkan rakyat/tentaranya sekitar 100 orang lebih untuk membangun kota Kolonadale. Tetapi disamping itu telah ada perundingan rahasia dengan para tadulakonya (panglima-panglimanya) dimana diputuskan siasat Rano Tole dijalankan dan komando "Hioo" tetap sebagai kode untuk menyerang. Tadulakonya diberi nama samaran seperti : Tadulako Towingku dinamai *Tobo* (artinya tikam), tadulako lainnya ada yang dinamai *Bansirai* (belah kepala), *Polewu* (potong leher), *senempaa* (potong paha), *Watukompo* (bongkar perut) dan sebagainya.

Oleh Belanda rakyat tadi dilarang membawa senjata seperti perisai, tombak dan sebagainya. Hanya diizinkan membawa alat-alat kerja seperti parang, kapak, pacul disamping itu rakyat ditugaskan pula memikul perlengkapan Belanda untuk kembali.

Sementara sibuk-sibuk hendak berangkat dalam keadaan Belanda agak lengah, tiba-tiba raja berseru "*Hioo Sipile*" (mulai jangan salah). Terjadilah pergumulan, seorang tentara dikeroyok oleh tiga sampai empat orang dengan menggunakan kapak, parang dan pacul.

Dengan mudah tentara Belanda \pm 40 orang dibunuh habis, termasuk komandannya Letnan Kies dan Mathes. Hanya juru bahasa Maradi tetap tak dibunuh dan segera lari memeluk Tovinangku minta diampuni. Akhirnya Maradi ini dijadikan pelatih untuk menggunakan senjata-senjata Belanda hasil rampasan dari peristiwa Rano Tole dan Matandan.³⁾

Pada ekspedisi Belanda yang ke 3 menyerang Marunduh dan rakyatnya di Mantandan barulah Mori berhasil dikuasai Belanda. Pada pertempuran itu gugurlah raja Marunduh II tahun (1907)⁴⁾

Dengan gugurnya Marunduh II maka Belanda lalu mengangkat raja baru di Mori dan sejak itu Belanda menguasai langsung wilayah Mori/Kolonedale tersebut.

4. Perlawanan Gerakan Merah Putih di Ampana.

Seperti halnya di Toli-Toli dan Luwuk Banggai pada tahun 1942 di Kabupaten Poso (yaitu di kerajaan Tojo dengan ibukotanya Ampana) terjadi pula perebutan kekuasaan oleh Pemuda Merah Putih dari tangan penjajah Belanda.

3). Informasi tertulis dari Parabe.

4). Hasil wawancara dengan Bapak P. Marunduh di Palu pada tanggal 8 - 11 - 1977.

Berbeda dengan keadaan di Toli-Toli dan Luwuk Banggai, di Ampana ini justru raja setempat, yaitu raja Tojo bernama Tanjumbulu, menjadi pimpinan Gerakan Merah Putih. Menurut sejarahnya raja-raja Tojo ini memang sejak awal datangnya Belanda sudah melawan, sehingga dibuang ke Sulawesi Selatan dan meninggal di sana.

Pada tahun 1928 putra Kolomboi yang bernama Tanjumbulu diangkat Belanda menjadi raja Tojo karena ternyata pengaruh kharisma raja pada rakyat tak dapat dipungkiri oleh Belanda. Namun sifat perlawanan yang diwarisi dari ayahnya tetap dimilikinya. Ia mendapat peluang pelaksanaan pada akhir masa pemerintah Belanda di tahun 1942.

Pada bulan Desember 1941 Raja Tanjumbulu pergi ke Malei melalui Poso untuk mengadakan perundingan dengan pengikut-pengikut setianya untuk menyusun dan merencanakan suatu aksi menentang kekuasaan Belanda.

Di Malei ini raja Tanjumbulu berunding di rumah Masewa Daeng Paliweng dengan tiga orang tokoh masing-masing :

1. Masewa Daeng Paliweng, disamping sebagai penasehat pribadi raja juga guru silat yang terkenal.
2. Lasongkeng Daeng Pawelang, sebagai seorang guru kontao asal dari Palopo.
3. Abdul Latif Mangitung, seorang pemuda Parindra yang melarikan diri dari Sulawesi Selatan pada tahun 1939 karena menjadi buronan polisi Belanda.

Hasil perundingan adalah supaya rakyat setempat disiapkan sambil menunggu komando untuk bergerak.

Mendengar informasi bahwa setelah Manado jatuh ke tangan Jepang tentara Belanda yang mundur dari Sulawesi Utara akan bertahan di Poso dibawah pimpinan Letnan I De Yong Gezaggeber terakhir di Kolonedale (dengan basis pertahanannya direncanakan di Ulubongka) maka rakyat setempat lalu beraksi dengan membunuh seorang pejabat pemerintah Belanda di Ulubongka.

Peristiwa ini menyebabkan raja Tojo Tanjumbulu melakukan pemeriksaan ke Ulubongka. Namun pada hakekatnya kesempatan ini digunakannya untuk melanjutkan perundingan pertama di Malei. Ia memanggil tiga orang tokoh Malei untuk melakukan perundingan kedua di Bongka.

Karena raja meninggalkan ibukota kerajaannya maka yang ditunjuk menjadi pejabat raja adalah menantunya yang bernama Raja Gunu Datupamusu/putra Raja Dolo Datupamusu, yang pernah diasingkan ke Ternate oleh Belanda karena menjadi pelopor pengembangan SI di kerajaannya.

Pada saat raja Tanjumbulu berada di Ulubongka itulah berturut-turut datang ke Ampana utusan-utusan dari Pemuda Merah Putih Bunta yang terdiri dari pemuda-pemuda Muhammadiyah dan utusan Gerakan Merah Putih Gorontalo. Mereka diterima oleh Raja Gunu Datupamusu. Utusan dari Bunta dikirim oleh pimpinan gerakan di sana bernama Haji Sunusi. Maksudnya mengajak rakyat Ampana umumnya, khususnya Warga Muhammadiyah Ampana, berontak melawan Belanda dan meminta senjata-senjata yang ada di pusat kerajaan Ampana untuk memperkuat gerakan pemuda Bunta. Utusan tersebut datang ke Ampana pada tanggal 18 Februari 1942. ⁵⁾ Namun permintaan senjata tersebut ditolak oleh raja Gunu Datupamusu karena senjata itu diperlukan juga untuk mempertahankan diri apabila tentara Belanda datang menyerang Ampana dari Poso.

Utusan dari pucuk pimpinan Gerakan Merah Putih Gorontalo (Nani Wartabone) terdiri dari dua orang yaitu Dai Wartabone dan Ismail Kemba tiba di Ampana pada tanggal 19—2—1942, ⁶⁾ dan pada jam 22.00 malam menyusul wakil raja untuk menyampaikan pesan dan mandat dari pimpinan Gerakan Merah Putih Gorontalo, supaya raja dan

5). Catatan harian Raja Gunu Datupamusu dari Ampana.

6). Catatan harian Raja Gunu Datupamusu dari Ampana.

rakyat Ampana melakukan aksi merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda di Ampana.

Dengan datangnya utusan Gerakan Merah Putih Gorontalo ini maka Wakil Raja yang dijabat oleh Raja Gunu Datupamusu menyambut dengan baik dan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat pada tanggal 21 Pebruari 1942, ⁷⁾ bertempat di sekolah Muhammadiyah Uentanaga Ampana.

Pada 21 Pebruari 1942 itu pulalah dikeluarkan pernyataan bahwa seluruh rakyat Ampana menyatakan diri telah bebas dari kekuasaan penjajah Belanda. Dengan hidmat bendera Merah Putih dinaikkan diiringi lagu Indonesia Raya dan sekali gus diperintahkan agar semua kantor-kantor, sekolah-sekolah, rumah-rumah dan perahu-perahu mengibarakan bendera Merah Putih. Pada hari itu juga dibentuklah satu komite Pemberontakan Ampana terdiri dari :

R.G. Datupamusu	sebagai Ketua I
L. Laeso	sebagai Ketua II
S. Pangemanan	sebagai Penulis I
A.K. Lamuru	sebagai Penulis II
L. Tanda	sebagai Bendahara I
L. Magulili	sebagai Bendahara II

Komite tersebut bertugas mengatur pemerintahan, memeriksa uang kas pemerintah dan mengatur barisan pertahanan. Dengan bertempat di kantor Swapraja Tojo Ampana, komite lalu mengadakan rapat untuk menentukan pimpinan pasukan guna menghadapi kemungkinan yang akan datang dari aparat pemerintah Belanda di Poso.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan :

- Abdul Karim Lamuru sebagai Kepala Pasukan I.
- Mohammad Muslaeni sebagai Kepala Pasukan II
- Sapala sebagai Kepala Pasukan Penyerbu ke Poso Togo,

Catatan harian Raja Gunu Datupamusu dari Ampana.

Hasim A. Ribai, Hasan A. Ribai, Moh. Badulu dan Ong Sung Kiong sebagai pembantu. Setelah itu dikirimlah utusan ke Ulubongka untuk menjemput raja dan melaporkan segala kejadian dan perkembangan keadaan.

Bersamaan dengan berangkatnya utusan untuk menemui raja di Ulubongka, maka dikirim pula penyidik ke Poso untuk meneliti keadaan pertahanan dan situasi pemerintahan Belanda di sana sehubungan dengan rencana komite Pemberontak Ampana hendak menangkap orang-orang Belanda di Poso terdiri dari :

1. Kontrolieur Poso
2. Aspiran Kontrolieur
3. Beherder Copra Fonds dan lain-lain.

Namun karena kekuatan persenjataan yang tak seimbang, maka kepala Pasukan A.K. Lamuru menyarankan pembatalan serangan ke Poso. Hanya gerakan Ampana dan Bongka disatukan dibawah pimpinan R.G. Datupamusu untuk menjadi basis pertahanan di Bongka.

Dengan penyatuan pasukan di Bongka ini maka berhasil ditangkap kurir Belanda yang menuju ke Luwuk liwat Bongka dengan menaiki truk.

Kurir tersebut diutus oleh Kapten Infantri Abink di Poso, membawa dokumen bagi pasukan Belanda di Luwuk berisi perintah untuk bersama-sama pasukan Belanda dari Poso menyerang para pemberontak rakyat Ampana dan sekitarnya. Kurir tersebut terdiri empat orang, 3 orang Tionghoa dan seorang mandor jalan bernama Sampelan.

Karena keadaan semakin genting maka Abdul Latif Mangitung segera mengadakan kontak dengan Induk Pasukan di Malei melalui Masewa Daeng Paliwang untuk membentuk satu batalion pasukan garis depan kerajaan Tanjumbulu dengan pimpinannya :

Masewa Daeng Paliweng	: Penasihat
Abdul Latif Mangitung	: Komandan Pasukan

Lasongkeng Daeng Pawelang	: Kepala Bagian Penyerbu
Tosayang	: Wk. Kepala Bagian Penyerbu
Abu Maloco	: Keuangan/Perlengkapan
Lapasenrang	: Wakil Perlengkapan
Laparimung	: Kepala Persenjataan
Lanokeng	: Penyelidik
Lapalepang	: Penghubung.

Tanggal 22 Pebruari 1942 tiba di Tojo dari Poso satu motor membawa 9 orang militer Belanda, dikepalai oleh seorang sersan dari Manado lengkap dengan persenjataannya. Yang menjadi penunjuk jalannya salah seorang anggota pemberontak Merah Putih yang berbalik mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya bernama Alkaf Muslaeni.

Mendengar tibanya motor tersebut maka A. Badudu ikirim dari Bongka ke Tojo mencek kebenaran berita tersebut. Dalam penyelidikannya ini A. Badudu bertemu Alkaf Muslaeni yang masih menyangka kawan seperjuangan dan tanpa curiga karena ditanyai rahasia pertahanan Bongka dari A. Muslaeni. Secara jujur A. Badudu menjawab bahwa betul tenaga pasukan banyak tetapi persenjataan hanyalah keris, tombak dan beberapa senapan double loop. Sementara itu supaya jangan dipergunakan tentara Belanda melewatinya, maka R.G. Datupamusu memerintahkan Kepala Distrik Uekuli agar rakyat setempat dikerahkan membongkar jembatan-jembatan besar dan kecil.

Tanggal 23 Pebruari 1942 rombongan raja tiba di Bongka dari Ulubongka. Di depan pasukan yang sementara bersiap siaga raja Tanjumbulu berbicara agar rasa kesatuan yang dibina selama ini dipupuk terus; agar jangan sampai tentara Belanda dapat meliwati pertahanan dan memasuki ibukota Kerajaan Ampana. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa semua pembentukan-pembentukan yang sudah direalisasikan oleh semua unsur kekuatan rakyat Tojo/Una-Una di Ampana dan ditempat-tempat lain untuk merebut kekuasaan

dari Pemerintah Belanda telah direstui oleh beliau

Dibawah pimpinan Kontrolieur Maslen dan Kapten Abink pasukan Belanda bergerak dari Poso ke Ampana untuk mematahkan perlawanan pasukan Merah Putih Tojo di Ampana.

Sebagai hasil adu domba Belanda maka secara diam-diam sebagian pasukan kerajaan Tojo yang dipimpin oleh A.C. Kussoy menyeberang ke pihak Belanda, termasuk pula beberapa tokoh putera daerah Tojo seperti Raja Tua Muslaeni, A.K. Lasupu, Badaruddin, Alkaf Muslaeni dan lain-lain. Sungai Bongka lalu menjadi garis demarkasi pasukan Belanda dan pasukan Merah Putih Tojo.

Karena rahasia pertahanan Tojo telah diketahui Belanda melalui mata-matanya Alkaf Muslaeni maka Belanda dengan persenjataan yang kuat lalu menyerang dan setelah bertempur di sungai Bongka mereka dapat menyeberang memasuki daerah pasukan Merah Putih Tojo. Dalam pertempuran ini 30 orang pasukan Merah Putih ditawan Belanda termasuk diantaranya Kepala Polisi Kerajaan Tojo A.K. Lanuru. Selanjutnya Kapten Abink memasuki kampung Maburoto dan bergerak kearah ibukota kerajaan Tojo Ampana.

Tanggal 29 Pebruari 1942 jam 23.00 malam pasukan Belanda tiba di Ampana dan langsung menyerang Markas Induk Pasukan Merah Putih di Kompleks Kantor Kerajaan Tojo dan berusaha menurunkan bendera Merah Putih yang masih berkibar di tiangnya. Dua orang pasukan Merah Putih yang mempertahankan bendera itu akhirnya gugur di bawah tiang bendera kena berondongan senapan pasukan Belanda masing-masing bernama Nggai alias Papa Judaedah dan Salimbu alias Papa Dero.

Tapi sebelum gugur keduanya sempat melawan dan melukai dua orang pasukan Belanda. Pasukan Merah Putih **lainnya** di dalam kegelapan malam melakukan gerakan

mundur karena tidak berimbangnnya kekuatan persenjataan sehingga ketika pasukan Belanda memasuki kota Markas Merah Putih telah kosong.

Dengan dikawal oleh Mohammad Amin Dahlan, Abdul Latif Mangitung, Dilla, Lacing dan pasukan-pasukan lainnya, Raja Tojo Tanjumbulu melakukan pengunduran ke desa Petingko di daerah perkebunan rakyat Ampana di kaki gunung.

Kemudian kontroliur Maslan dan Kapten Abink mengirim A.C. Kussoy sebagai utusan kepada raja Tanjumbulu untuk membujuk supaya mau kembali ke Ampana untuk berunding. Tapi utusan itu ditolak, malah diusir oleh pimpinan pengawal Moh. Amin Dahlan. Berhubung situasi makin genting maka raja dengan rombongan melanjutkan perjalanannya ketempat lain; mula-mula ke pegunungan Tanjung Api di Utara kota Ampana, lalu ke P.P. Togian dan seterusnya ke Gorontalo.

Tanggal 1 Maret tahun 1942 jam 19.00 malam datang sekretaris kerajaan S. Pangemanan menghadap raja Tanjumbulu ditempat penyingkiran untuk melaporkan bahwa sebagian besar Pasukan Merah Putih telah ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Poso, 5 (lima) diantaranya ditembak diatas motor dan mayatnya dibuang ke tengah laut. Ke lima korban itu bernama : Togoa, Hasyim Rivai, Madi Muhammad, Abdul Samad dan Angki Maloto.

Pada tanggal 2 Maret 1942 Raja Tanjumbulu sebagai pimpinan tertinggi mengeluarkan instruksi dan penetapan sementara sebagai berikut :

1. R.G. Datupamusu diangkat sebagai pejabat raja sementara Kerajaan Tojo yang ketika itu sementara masih dalam perjalanan untuk menjalankan tugas ke daerah distrik Tojo/Bongka.
2. Moh. Amin Dahlan diangkat menjadi Komandan Pasukan Angkatan Laut merangkap pengawal bagian tempur dan mendampingi raja Tanjumbulu.

3. Haji Saini Wakil Komandan Pasukan Angkatan Laut merangkap pengawal permaisuri raja dan warga istana.
4. Abdul Latif Mangitung diangkat menjadi, wakil pimpinan Angkatan Bersenjata kerajaan Tojo/Una-Una.

Setelah mengeluarkan penetapan tersebut di atas maka raja Tanjumbulu dengan dikawal oleh Moh. Amin Dahlan dalam satu perahu serta lainnya ditumpangi permaisuri dan keluarga istana dikawal Haji Saini, berlayar dari Tanjung Api ke P.P. Togian (ke Kampung Kalingkinari).

Pada waktu yang bersamaan dengan keberangkatan raja dan rombongan ke P.P. Togian tiba pulalah menantunya R.G. Datupamusu di ibukota kerajaan Ampana dari tugas menghubungi pejuang-pejuang lainnya di Wilayah kerajaan Tojo.

Mendengar mertuanya menyingkir ke P.P. Togian, R.G. Datupamusu menyusul ke sana dan seterusnya bersama-sama berlayar ke Gorontalo untuk bertemu pimpinan Gerakan Merah Putih Nani Wartabone dan Kusnodhanupoyo untuk melaporkan gerakan Merah Putih Tojo — Ampana yang mendapat tekanan pasukan Belanda dari Poso. Raja Tanjumbulu berada di Gorontalo sampai pasukan Jepang mendarat di Poso pada bulan Juni 1942 pada waktu mana barulah beliau kembali ke Ampana memegang tampuk pemerintahan kembali.

Sementara itu Abdul Latif Mangitung secara diam-diam bersama 4 (empat) orang anggota pasukannya kembali ke Markasnya di pegunungan Tanjung Api langsung ke Uekuli untuk mengadakan sabotase berupa pembakaran-pembakaran. Setelah itu ia menuju ke Kolonadale menuju kampung Buyung Taripa dan Tambayoli. Di tempat itu Abdul Latif Mangitung mengadakan kontak dengan Hamide Pasise untuk menyusun kekuatan melawan Belanda di daerah Kolonadale sampai kampung Salabangka. Disusunlah personalia penggerak pemberontakan di daerah Salabangka sebagai

berikut :

1. Abdullah sebagai Ketua I
2. Hamide Pasise sebagai wakil Ketua merangkap kepala Pasukan
3. Aburaera Sekretaris
4. Haji Abdul Rahim Pemegang Keuangan
5. Thio Ciang Pho Wakil Pemegang Keuangan
6. Hing Penghubung
7. Rahim Kepala Pasukan Wilayah Bungku
8. S.M. Ali Bafaddal Penyelidik
9. Haji Lakanene Kepala Perlengkapan
10. Kanjar, Raju, Wely sebagai pembantu.

Setelah membentuk pengurus pemberontakan di Wilayah Bungku Salabongka, Abdul Latif Mangitung kembali ke markasnya di Malei distrik Tojo.

Selama raja Tanjumbulu berada di Gorontalo maka R.G. Datupamusu tetap mewakili raja menjalankan pemerintahan sambil mengkoordinir pergerakan-pergerakan di daerah kerajaan Tojo Ampana dan kepulauan Togian, bekerja sama dengan Moh. Amin Dahlan dan Haji Sunusi dengan barisan Armada Laut yang terdiri dari Armada perahu warga suku Bajo dalam wilayah kerajaan Tojo. Perkembangan selanjutnya dari Gerakan Merah Putih ini mengalami nasib sama dengan Gerakan Merah Putih di Toli-Toli.

Tentara Belanda yang masih kuat di Poso melakukan penyerangan ke Ampana, ditambah pula dengan adanya beberapa anggota Gerakan Merah Putih Ampana yang mengkhianat, menyebabkan kota Ampana dapat diduduki kembali oleh Belanda sebelum tentara Jepang datang.

C. PERLAWANAN DI KABUPATEN BANGGAI

1. *Perlawanan Tonaas Djanggo Pute dan Kawan-kawan (± 1900)*

Kerajaan Banggai terdiri atas Semenanjung Luwuk, Ke-

pulauan Banggai, pulau Poling dan sekitarnya. Kerajaan Banggai merupakan salah satu Wilayah kekuasaan Ternate. Dan Ternate sendiri sudah lama dikuasai langsung oleh Belanda. Menurut informasi dari Bapak Djakaria Udaa, Raja Banggai yang ke 35 bernama Abdul Rahman dilantik di Ternate pada tahun 1901. Namun demikian penguasaan secara langsung terhadap kerajaan Banggai belum terjadi, sampai tahun 1908 yang datang ke Banggai dari Ternate hanya Posthouder untuk mengurus kepentingan orang-orang asing seperti orang Cina, Arab, India dan sebagainya, belum mengurus anak negeri.⁸⁾ Dalam situasi demikian itulah menurut informasi dari A.R. Lanasir Belanda lalu turut campur tangan menghadapi persepelisihan-perselisihan antara suku-suku di kerajaan Banggai. Atas perintah kontroliur Poso dikirimlah sepasukan Marsose dari Poso dengan memakai kapal perang *Sibolga*.

Ekspedisi ini menyusuri wilayah Banggai sepanjang pesisir Barat Laut dan mendarat di Bunta. Disitu Belanda lalu mengangkat beberapa juru bahasa antara lain Said Abdullah bin Shech Abubakar dan Abdullatif Manganco. Diangkat menjadi kepala distrik Bunta adalah Tettu. Dari Bunta ekspedisi langsung ke Lobu dan Pagimana. Ditempat itu diangkat pula juru bahasa Patuo Akase di Lobu, Panini di Pokowa dan Umar Dilo di Pagimana. Kedatangan ekspedisi ini mendapat perlawanan setempat. Tetapi dengan perantaraan kapiten Tangkonunu Lasadong, Belanda menempuh cara diplomasi. Dengan macam-macam bujukan Bapayung Dakkannyo Lingketeng akhirnya menurut (dapat dikuasai).

Hanya Tonnas Djanggo Pute dari Baloa, Tonaas Djanggo Item dari Doda serta Tunggol Tambunan yang bernama Gulungunsing tetap melakukan perlawanan. Ketiga pimpinan itu berunding dan sepakat untuk melawan sampai tetes darah

8). Hasil Wawancara dengan Bapak Haji Sulaeman Amir di Luwuk pada tanggal 22-9-1978.

penghabisan. Pasukan Marsose yang beroperasi di Lingketeng dipimpin oleh seorang sersan bernama KoloEt bergerak langsung ke Bulung (Baloa). Dari Pokowa Lion pasukan ini bergerak dan bergabung dengan pasukan Marsose lainnya di Salingan. Walaupun pasukan-pasukan Djanggo Pute serta Tunggol Tambunan mengadakan perlawanan gigih tapi karena kekalahan dalam tehnik persenjataan akhirnya terpaksa Djanggo Pute bersama 7 (tujuh) orang anak buahnya menyerah membawa *Tonda*. *Tonda* adalah penyerahan secara adat Saluan/Loinang berupa seekor sapi hutan (anoa) diikat lehernya dengan secarik kain putih pada sepotong kayu yang disebut "Mandapolang".

Di Lingketeng mereka yang menyerah itu berjumpa dengan pasukan Belanda. Sapinya disita dan orang-orangnya ditawan, tangannya diikat, lalu ditembak di Monongi. Sekarang tempat itu bernama Hakop (= tertangkap). Akibat pimpinannya tertawan dan dibunuh sebagian pengikut turun ke wilayah Batui. Pasukan-pasukan Belanda memasuki Banggai pulau setelah menaklukkan Marundu II dari kerajaan Mori.

Dengan jalan membujuk pemimpin-pemimpin terkemuka masyarakat Luwuk Banggai, terutama raja Banggai sendiri yang dilantik di Ternate pada tahun 1901, akhirnya korteverklaring ditanda tangani oleh raja Banggai Abd. Rahman pada tanggal 14 Juli 1908 diatas kapal putih *Konstantijn* (menurut keterangan Ali Kasim). Selama Banggai masih masuk wilayah kekuasaan Ternate, Belanda hanya mengirimkan ke Banggai seorang poshouder bernama Sam Kueffen dibantu seorang bestuur asisten bernama F. Saerang.⁹⁾ Dengan penanda tangan *korteverklaring* oleh raja Banggai setelah Banggai dinyatakan lepas dari Ternate oleh Belanda maka mulailah Belanda mengatur organisasi pemerintahan di Wilayah kerajaan Banggai. Seorang kontrolieur ditempatkan di Lu-

9). Informasi tertulis A.R. Lanasir di Luwuk.

nyak Fo, 25 (dua puluh lima sen).¹⁰⁾

2. *Perlawanan Laginda (1905)*

Disemenanjung jazirah Luwuk (Daerah Balantak) terjadi pula perlawanan suku Loon dipimpin oleh Laginda. Diantara pimpinan pasukannya (Tadulakonya) terkenal adalah Salawan, Banaan dan Aiyo. Mereka mendirikan kubu-kubu pertahanan disekitar pegunungan sabal Balantak. Perlawanan ini terjadi disekitar tahun 1905 dan markas Laginda terdapat di Batubiring.

Pada saat itu pembantunya ialah :

Nasu (suku Loon) dengan anggotanya sebanyak 80 orang.

Daud (suku Loon) dengan anggotanya sebanyak 6 orang.

Sedang Laginda sendiri mempunyai anak buah 20 orang, terdiri dari pria dan wanita. Antara Laginda dan Nasu terdapat pendirian yang berbeda dalam melawan musuh. Nasu menginginkan menyergap secara diam-diam pada waktu tentara Belanda tidur. Sedang Laginda secara ksatriya tidak mau menyerang/membunuh musuh kalau musuh tidak sedia. Kekuatan Belanda waktu itu terdiri dari 3 pasukan masing-masing dipimpin oleh : Sersan Van Brey.

Sersan Tumewu, Sersan Manindola.

Sekitar tahun 1910 sering timbul kontak senjata dengan Belanda karena pasukan Laginda memakai siasat menghadang patroli-patroli pasukan Belanda. Di Kampung Bondo Lamontikan, Lusak Batusopau, Unsulenan, Bonemantan Laginda mendapat bantuan dari suku Ioinan hingga pasukannya bertambah.

Sebagai hasil menghadang pasukan Belanda, Laginda da-

10). Informasi tertulis A.R. Lanasir di Luwuk.

pat merebut beberapa senapan dari tentara Belanda yang dibunuhnya. Diantara Marsose yang tewas pada pertempuran di Ramosan terdapat sersan Tumewu yang dikuburkan di Dondo. Di Dondo ini pulalah kakak perempuan Laginda dijadikan sandra oleh Belanda supaya Laginda mau menyerah. Dengan diam-diam Laginda menyusup masuk keperkemahan Belanda pada waktu malam dan berhasil mengeluarkan kakaknya tetapi seorang pengikutnya tewas ditembak Belanda. Ketika ditawan Belanda maka kakak Laginda menyanyikan sebuah lagu yang kelak populer dikalangan rakyat suku Loon sebagai berikut :

O, O, Laginda, Panyau laku-laku namorikoo
Moringkui namian tako takana
Mian nganion Belanda
Tasik tombono dodongoan
Tasik tobono tano kani.

Artinya :

O, O, Laginda, menyahut berani-berani
Jangan engkau dikalahkan orang ini
Orang ini orang Belanda Pendatang
Bukan yang punya tempat
Bukan yang punya tanah ini.

Walaupun melawan dengan gigih tapi karena Marsose selalu mendapat bala bantuan, lagi pula persenjataan tak seimbang (tombak, parang, golok melawan senapan) sehingga Laginda dengan pasukan-pasukannya terdesak dikejar-kejar Belanda dari gunung kegunung. Akhirnya Laginda dengan pasukan-pasukannya tertangkap lalu dipenjarakan di Luwuk. Hanya beberapa bulan kemudian Laginda dapat meloloskan diri dari tahanan lalu lari sampai tiba dipulau Banggai. Disitu ia bertemu dengan Lasopawuno yang diangkatnya menjadi pimpinan pasukan perlawanan di Banggai kepulauan. Dengan tipu muslihat yang licik serta dihianati oleh bangsa sendiri akhirnya Laginda tertangkap lagi di Bolong. (Pegunungan

Abason) pada tahun 1911.

Setelah ditangkap tangan kanannya dipotong dengan pedang oleh seorang sersan Marsose bernama Paimin, kemudian diarah ke Balantak, diperlihatkan pada orang banyak (contoh hukuman bagi orang yang berani melawan Belanda), kemudian dirawat di rumah sakit Luwuk. Setelah sembuh dimasukkan lagi kedalam penjara Luwuk tapi tak lama ia berhasil pula meloloskan diri dan menghilang kedalam hutan sampai saat meninggalnya. Kapan meninggal dan dimana kuburannya sampai sekarang tak diketahui orang.

Sekitar tahun 1912 - 1913 pada masa Kapten Van Beck banyak pengikut-pengikut Laginda yang diharuskan turun ke Tangkios. Pertempuran paling sengit terjadi di Siongalong, Mouris, Batupeloy, Binolik dipimpin oleh Salawan Tambong, Nundo dan kawan-kawannya sehingga banyak pasukan-pasukannya yang gugur dan ditawan Belanda. Sampai sekarang bekas-bekas kubu pertahanan Laginda dan kawan-kawannya masih dapat disaksikan diatas gunung. Pengikut-pengikutnya yang tidak tertangkap atau menyerah kemudian menjadi suku-suku terasing diatas gunung-gunung.

Didaerah yang dianggap belum aman Belanda menempatkan seorang penguasa militer, seorang kontroliur diikuti oleh sejumlah tentara untuk menjaga keamanan ditempat itu. Dengan kekuatan tentara inilah sang kontroliur mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan wilayah pemerintahannya. Demikian pula halnya dengan kerajaan Banggai, setelah peleton Marsose dipimpin oleh sersan Pongoh masuk di Luwuk, maka berturut-turut yang ditempatkan Belanda di kerajaan Banggai adalah penguasa Militer (seorang kontroleur dengan pangkat Kapten atau Letnan).

Pertama : Kapten Van Beck.

Kedua : Kapten Ryman dan seterusnya.

Penguasa militer ini berlangsung sampai tahun 1927, dengan ditempatkannya J.J. Doormeiyer sebagai kontroliur sipil per-

tama di Luwuk. ¹¹⁾

3. *Perlawanan Gerakan Merah Putih di Luwuk Banggai (1942)*

Dengan disponsori oleh tokoh-tokoh pergerakan di Bunta Pagimana, maka di Kabupaten Luwuk Banggai terjadi pula perebutan kekuasaan dari tangan penjajah Belanda. Pada tanggal 6 Pebruari 1942 diadakanlah pertemuan musyawarah bertempat di rumah Theng Fu Yung (seorang pedagang Tionghoa) di Pagimana.

Setelah membahas keadaan/situasi internasional pada saat itu berdasarkan pandangan-pandangan dari beberapa peserta rapat maka diambilah keputusan-keputusan sebagai berikut :

- I. Dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut berusaha dengan jalan mengadakan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan penjajahan Belanda yang berkedudukan di Luwuk.
- II. Mengikrarkan sumpah setia dalam perjuangan.
- III. Menunjuk :
 1. T.S. Bullah sebagai pemimpin
 2. M.A. Makarao sebagai pembantu
 3. S.P. Makarao s.d.a.
 4. A. Lagonah s.d.a.
 5. Ys. Manoarfa s.d.a.
 6. A.R. Lanasir s.d.a.
 7. N. Buato s.d.a.
 8. Theng Fu Yung s.d.a.
 9. Dadi Misilu s.d.a.

Untuk melaksanakan maksud punt I di atas maka dibentuk :

- I. Pasukan Pemberontakan Pemuda Merah Putih di Pagimana terdiri dari :

11). Hasil wawancara dengan Bapak Haji Sulaeman Amir di Luwuk tanggal 22-9-1978.

1. Ince Umar Dahlan	sebagai Komandan I
2. A.R. Lanasir	sebagai Komandan II
3. Ys. Manoarfa	sebagai anggota
4. Dadi Misilu	s.d.a.
5. Go Weng Sui	s.d.a.
6. Ahmadi Tapo	s.d.a.
7. Mambo Masulili	s.d.a.
8. Sune Noka	s.d.a.
9. Dahlan Lagonah	s.d.a.
10. The Liong Lam	s.d.a.
11. Sho Lip Pia	s.d.a.

- II. Selain dari membentuk pasukan pemberontakan juga mengirim perutusan ke Gorontalo untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Nasional dibawah pimpinan Nani Wartabone karena di Gorontalo rakyat telah mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah Hindia Belanda sekitar bulan Januari 1942.

Perutusan ke Gorontalo terdiri dari dua gelombang :
Yang pertama terdiri dari dua orang masing-masing :

1. A. Lagonah.
2. S.P. Makarao.

Yang kedua juga terdiri dari dua orang yaitu :

1. Sue.
2. Ali Bजारत.

- III. Mengirim utusan/kurir untuk menghubungi sponsor-sponsor / pemimpin-pemimpin diantaranya :

1. Ahmad Fulilohan di Lobu.
2. S. Kirdiat dan kawan-kawan di Bunta.
3. Dr. Sataryo, A.G. Mambu dan kawan-kawan di Luwuk.

- IV. Perhubungan Pagimana Luwuk ditutup sambil mengadakan penjagaan yang ketat. Keadaan darurat diumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat di kampung-kampung sekitar Pagimana sambil diberikan penjelasan ser-

ta disiapkan untuk berjuang bersama-sama. Di Kampung Poh yang letak antara Pagimana — Luwuk diperketat penjagaan lalu lintas.

Pada tanggal 8 Pebruari 1942 seorang jaksa anggota Vernielen Corps (VC) Belanda membawa bahan peledak/dinamit untuk merusakkan jembatan besar di Lobu. Ia ditangkap oleh beberapa anggota Merah Putih di Lobu pimpinan Ahmad Fulilehan.

Pada tanggal 9 Pebruari 1942 Kepala Resort Tomini — Bocht K.J. Rorimpandey telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada T.S. Bullah sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Nasional pada masa itu.

Pada tanggal 11 Pebruari 1942 pukul 13.30 waktu setempat setelah selesai shalat Jum'at bertempat di rumah bapak Haji Abdau Masulili kampung Pala Pagimana diadakan upacara doa selamat untuk merestui keberangkatan Pasukan Pemuda Merah Putih berjumlah 12 orang bersenjatakan Mauser, pistol, senapan dua laras dibawah pimpinan Ince Umar Dahlan dan A.R. Lanasir masing-masing sebagai komandan I dan II dengan berkendaraan kereta angin (sepeda).

Pasukan singgah di Poh memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat sekitar maksud dan tujuan perjuangan tersebut. Selesai makan malam di Poh rombongan Pasukan Pemuda Merah Putih melanjutkan perjalanan ke Luwuk melalui kampung Salodik dan Biak menambah tenaga diantaranya :

1. Daeng Maka dan Jonggulemba di Salodik.
2. Daeng Gela di Biak.

Jarak Pagimana — Luwuk ± 64 km. Pasukan Pemberontak (Pemuda Merah Putih) tiba di Biak sekitar pukul 02.00 malam. Setelah diadakan perundingan di atas jembatan Biak untuk membagi-bagi tugas masing-masing untuk dilaksanakan nanti setelah memasuki kota

Luwuk, maka berangkatlah pasukan Pemuda Merah Putih sekitar pukul 03.00 hampir siang.

Tiba di km 1 (satu) dari Luwuk pasukan dibagi dua kelompok :

Kelompok pertama terdiri dari :

1. A.R. Lanasir.
2. Ys. Monoarfa.
3. Daeng Maka sebagai Voorspit untuk meninjau situasi kota Luwuk langsung menghubungi kawan-kawan di Luwuk.

Kelompok kedua anggota-anggota lainnya dibawah pimpinan Ince Umar Dahlan dibidang operasional untuk melaksanakan penangkapan terhadap seluruh pegawai pemerintah Belanda terdiri dari bangsa Belanda dan bangsa Indonesia yang setia pada Belanda. Pertama-tama stasion radio dan kapal S.S. *Urania* dikuasai. Sekitar pukul 10.00 pagi tanggal 12 Pebruari 1942 seluruh aparat pemerintah Belanda di kota Luwuk selesai ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan di penjara Luwuk. Selanjutnya dilaksanakan serah terima kekuasaan/pemerintahan dari tangan *Gezaghebber* F. Walrabbe sebagai HPB ke tangan Dr. Soetaryo sebagai wakil pimpinan Gerakan Pemberrontakan Rakyat Banggai merangkap Kepala Bahagian Keamanan.

Selesai serah terima jabatan/kekuasaan, bendera Merah Putih Biru diturunkan dari tiangnya kemudian warna birunya disobek lalu bendera Merah Putih dinaikkan dengan upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah seluruh keadaan/situasi dikuasai maka diaturlah pertahanan/keamanan dan penjelasan-penjelasan.

Pada tanggal 14 Pebruari 1942 sebagian pemimpin-pemimpin dari Pagimana dan Bunta berdatangan ke Luwuk dan kemudian mengadakan perundingan bersama dan memutuskan untuk mengirim delegasi ke Banggai

untuk menghubungi serta menemui raja Banggai S.A. Amir menyampaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pengambil alihan kekuasaan pemerintahan pada tanggal 12 Pebruari 1942 yang lalu dimana beliau menyetujui apa yang telah dilaksanakan.

Pada tanggal 16 Pebruari 1942 sekembali perutusan dari Banggai bersama-sama dengan raja Banggai S.A. Amir diadakan perundingan/permusyawaratan di suatu tempat diantara pemimpin-pemimpin dari Pagimana Bunta dan Luwuk dimana hasilnya telah mendapat persetujuan bersama serta kata sepakat membentuk suatu badan Pemerintahan Nasional dengan istilah Komite 12 terdiri dari 12 orang anggota dipimpin/diketuai oleh S. A. Amir ex Raja Banggai dibantu/dilengkapi dengan tenaga-tenaga yang mengepalai bahagian-bahagian sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. S.A. Amir Kepala Pemerintahan/Ketua Komite 12.
2. T.S. Bullah wakil Kepala Pemerintahan.
3. Ys. Monoarfa Sekretaris dan Penghubung.
4. S. Amir Bahagian Keuangan dan Perbekalan.
5. Dr. Soetaryo Keamanan dan Kesejahteraan.
6. A. Lagonah Urusan Umum.
7. A.G. Mambu Urusan Umum.
8. S. Kirdiat Penerangan.
9. N. Peju Bahagian Pengajaran dan Pendidikan.
10. R.G. Makadada Bahagian Pengajaran dan Pendidikan.
11. Ipung Mang Bahagian Perekonomian.
12. S.H. Bunai Bahagian Perekonomian.

Dengan terbentuknya Pemerintahan Nasional/Komite 12 Daerah Banggai mulailah roda pemerintahan diatur terutama dibidang keamanan. Mengingat masih adanya kekuatan Belanda yang mengapit daerah Banggai antara Kolonedale-Poso dimana kegiatan-kegiatan mereka ma-

sih ada dengan adanya info-info/pemberitaan yang didapat bahwa Belanda akan mengadakan serangan dari dua jurusan sehingga demi menjaga kemungkinan benarnya hasrat keinginan mereka maka pada tanggal 18 Pebruari 1942 tahanan bangsa Belanda segera diantar ke Gorontalo dengan kapal S.S. *Urania* oleh satu regu Pemuda Merah Putih dipimpin oleh Ahmad Fulilehan.

Tawanan itu terdiri dari pegawai-pegawai pemerintah Belanda yang berbangsa Indonesia diantaranya :

1. K.J. Rorimpandey.
2. W.J. Lantang.
3. A. Lolong.
4. Sapulette dan lain-lain.

Setelah diadakan penyempahan bersedia setia pada nusa dan bangsa Indonesia merekapun dibebaskan serta dipekerjakan kembali dalam jabatan mereka semula. Pemerintahan Komite 12 daerah Banggai diakui oleh pemerintah militer Jepang yang telah menduduki kota Manado. Shunanto Seirei sebagai komandan Angkatan Laut/Kaigun mengakuinya, sama halnya dengan pengakuan mereka terhadap pemerintah Nasional di Gorontalo dibawah pimpinan Nani Wartabone, Kusnodhanupoyo dan kawan-kawan. Pada tanggal 15 Mei 1942 tentara Jepang mendarat di Luwuk dipimpin oleh Komandan Miyamoto dan pada tanggal 17 Mei 1942 mereka mengambil alih pemerintahan Nasional dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum dapat mempertahankan dirinya jika ada serangan dari luar nanti, dengan janji bahwa apabila bangsa Indonesia telah sanggup berpemerintahan sendiri barulah mereka serahkan kembali kekuasaan itu.

D. PERLAWANAN DI KABUPATEN BUOL TOLI-TOLI

1. *Peristiwa Salumpaga (1912)*

Suatu pemberontakan yang dilakukan oleh warga SI

terhadap pelaksanaan *heerendienst* (kerja rodi) terjadi di Salumpaga Toli-Toli. Seperti diketahui SI masuk ke Sulawesi Tengah sejak tahun 1916 dan sejak itu silih berganti pengu-rus-pengurus pusat dari Jawa mengadakan kunjungan penin-jauan/pembinaan seperti umpamanya pada tahun 1916 HOS Tjokroaminoto dan Sosrokardono berkunjung ke Sulawesi Tengah kemudian pada tahun 1919 datang Abdul Muis. Ab-dul Muis dalam pidato-pidatonya cukup keras terutama me-nge-nai *belasting* dan kerja paksa (*heerendienst*). Tidak cukup satu tahun setelah kunjungannya maka timbullah pemberon-takan Salumpaga yang cukup mengagetkan Parlemen di Nege-ri Belanda. Terjadinya pemberontakan tersebut dapat diurai-kan sebagai berikut :

Dengan cara bergiliran rakyat dari tiap-tiap kampung da-lam wilayah kerajaan Toli-Toli datang ke Toli-Toli melaksana-kan giliran kerja rodi membuat jalan ke pelabuhan dan mem-buat pelabuhan di Tanjung Batu, disamping memperbaiki ja-lan jurusan Kalangkangan yang tertimbun tanah longsor aki-bat hujan. Dalam pelaksanaan kerja rodi itu rakyat sendirilah yang menyediakan bekalnya dibawa dari rumah masing-masing. Biasanya kerja rodi itu berlangsung sampai 14 hari bagi tiap kelompok.

Demikian pula halnya dengan rakyat Salumpaga yang berjumlah 43 orang yang dikenakan kerja rodi di Toli-Toli bertepatan waktunya menjelang bulan puasa pada tahun 1919. Ke 43 orang itu adalah Intio (bertindak sebagai pim-pinan orang tua kampung), La Hasang (Kepala jaga selaku ketua rombongan), Halika, Daon, Laware, La Dangka, La Dengke, Tinumbu, Dun, Tana, Rabbil, Maleseng, Yubu, Ka-rim Salawat, Sioko, Takik, Muradi, Kulisik, Tokki, Hamzah, Yahuse, Nyong, Nagaribi, Kambi, Haruna La Dandu, Lahido. Talebo, Injali, Abu Rukka, Nandu, Basar, Siando, Tasubu, Madilau, Sikuru, Hadi, Rajib, Kombeng; Maleng, Ganggaleng,

Haji Abdul Karim, M.Sunusi. ¹²)-

Walaupun pelaksanaan kerja rodi itu dilakukan terus-menerus namun masih ada pekerjaan untuk kira-kira 6 hari borongan ketika bulan puasa sudah hampir tiba dan bekal yang dibawa sudah hampir habis. Sebagai penganut Agama Islam maka rakyat Salumpaga yang kena rodi itu ingin melaksanakan ibadah puasa dengan keluarganya di Salumpaga. Mereka berharap agar sisa pekerjaan itu dapat dilanjutkan nanti setelah lebaran. Maksud ini disampaikan oleh pimpinan rombongan kepada mandor, tetapi mandor itu tak berani memutuskan sendiri dan menyuruh untuk menghadap pada raja Mogi Haji Ali. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh raja bahkan diperintahkannya untuk melangsungkan pekerjaan itu walaupun dalam bulan puasa. Namun karena sebagian pekerja sudah kembali ke Salumpaga, maka sekali lagi Intio dan La Hasang menghadap raja meminta kebijaksanaannya untuk memenuhi permintaan para pekerja. Akhirnya raja menyuruh mereka menghadap kontroliur De Kat Angelino yang berhak memberi putusan terakhir. Tapi jawaban kontroliur menghadap adalah : " Bukan saya yang menghendaki kerja rodi dibulan puasa, tetapi raja kamu sendirilah yang punya mau. ¹³)-

Kepada kontroliur pimpinan rombongan berjanji bahwa mereka bersedia diberi tugas rodi untuk 12 hari, asalkan mereka diizinkan pulang ke kampung selama bulan puasa. Akhirnya rombongan pekerja itu memutuskan kembali ke Kampung Salumpaga " apapun yang akan terjadi ". Sesampai di kampung mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Iman kampung bernama Haji Hayun. Iman menganggap untuk memohonkan kepada kontroliur agar keinginan peker-

-
- 12). Hasil wawancara dengan Anwar Abu, Kepala Kampung Salumpaga (Toli-Toli) tanggal 16 - 10 - 1978.
 - 13). M. Lubis : *Pemberontakan Toli-Toli (3 orang kaum Simati digantung*. Taman Pengajian Ni'mah Manado tahun 1969.

ja tadi dapat dipenuhi.

Sementara itu saudara raja yang bernama Haji Muhamad Saleh Bantilan melapor kepada raja bahwa para pekerja sudah berontak melawan pemerintah dengan meninggalkan pekerjaannya. Raja Mogi Haji Ali bersama kontrolieur De Kart Angelino dengan rombongannya berangkat ke Salumpaga. Setelah di Salumpaga mereka terus ke pasanggrahan dan kepala kampung diperintahkan mengumpulkan rakyatnya terutama mereka yang kena *heerendienst*. Didepan mereka raja menuduh bahwa mereka telah memberontak dengan meninggalkan pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan walaupun dalam bulan puasa. Tuduhan itu dijawab oleh Haji Hayun (Iman Salumpaga) yang juga pengurus SI di Salumpaga. " Kami tak melawan, para pekerja pulang karena menganggap sudah diizinkan pulang, tetapi agaknya baik dari raja maupun kontrolieur tak memberikan izinnya ".

Lalu diadakan lagi perundingan dimana Haji Hayun selaku wakil rakyat menyampaikan kembali permohonan tersebut, dengan janji setelah bulan puasa, sisa pekerjaan akan dilipat dua kalikan. Tetapi permohonan itu tetap ditolak oleh raja dan kontrolieur yang memaksakan juga supaya pekerja-pekerja itu kembali bekerja walaupun dalam bulan puasa. Kontrolieur dengan rombongannya melanjutkan perjalanan ke Binontoan dengan naik perahu. Sepeninggal rombongan itu Haji Hayun bersama pemuka-pemuka kampung mengadakan perundingan untuk menentukan sikap/langkah-langkah terakhir dan menganggap baik raja maupun kontrolieur tidak mengizinkan mereka melaksanakan ibadah sebagai seorang mualim, jadi seolah-olah menghalangi orang Islam dalam menjalankan perintah Agamanya karena pada bulan puasa bukan hanya puasa waktu siang saja, tapi juga tarawih pada malam hari dilaksanakan. Bertepatan waktu itu bulan puasapun sudah tiba dan salat tarawih pada malamnya diadakan.

Sementara rakyat kampung melaksanakan tarawih, ang-

gota-anggota *gewapenob* (polisi) mendatangi mesjid dan membubarkan rakyat yang sedang bertarawih dengan alasan bahwa mereka itu mengadakan perundingan. Terpaksa rakyat tak jadi meneruskan salat tarawih dan pulang kerumahnya masing-masing.

Rombongan kontrolieur yang ke Binotoen dua hari kemudian telah tiba kembali di Salumpaga langsung ke pesenggrahan. Haji Hayun ditemui oleh Otto, Kombong, Hasan dan Kampaeng kembali menghadap mengajukan permohonan agar rakyat dibebaskan dari *heerendienst* selama bulan puasa. Sementara mereka menghadap *Gewapende* mengirim para pekerja kembali ke Toli-Toli dengan berjalan kaki. Sekali lagi raja dan kontrolieur tidak mau menerima permintaan delegasi Haji Hayun dan kawan-kawan. Haji Hayun lalu mengucapkan Allahu Akbar, serentak itu pula Otto berdiri menghunus parangnya langsung memotong kontrolieur De Kat Angelino, Hasan memotong juru tulis. Kombong memotong jaksa Zakaria, Kampaeng menombak raja. Seorang opas yang ada diluar pasanggrahan yang melihat kejadian itu terus berlari memberi tahu pada polisi yang mengawal para pekerja sambil berte-riak : " Kontrolieur sudah mati ". Mendengar itu rakyat yang sedang digiring serentak disuruh duduk. Pada kesempatan inilah rakyat yang lebih 40 orang itu tiba-tiba merampas senapan para pengawalnya, dan dipakai untuk memukul para polisi itu sampai mati (rakyat waktu itu belum tahu mempergunakan senapan). Lima orang polisi yang dibunuh itu adalah : Kalele, Papa, Puda, Panambuna dan Jamadi. Opas yang melapor itu bernama Ismaila kemudian ditangkap pula dan dibunuh. Sementara itu Otto, Hasan, Kombong dan Kampaeng terus kerumah raja mencari saudaranya Haji Mohammad Saleh Bantilan. Tapi karena sudah lebih dahulu mendengar kejadian tersebut maka ia sempat melarikan diri bersembunyi kerumah keluarganya bernama Yotobambana di Kampung, dan disembunyikan dalam lemari.

Pemberontakan Salumpaga terjadi pada 2 Ramadhan 1339 H atau bertepatan dengan tanggal 5 Juni 1919 M. Korban pada waktu itu 10 orang :

- kontroliur J.P. De Kat Angelino.
- raja Toli-Toli Mogi Haji Ali.
- komandan polisi (informan tidak ingat lagi namanya).
- lima orang anggota polisi Kalele, Papa, Puda, Penambuna dan Jamadi.
- jaksa Toli-Toli Zakaria.
- Opas Ismaila.

Peristiwa pemberontakan ini dalam waktu singkat beritanya tiba di Toli-Toli bahkan tersiar keseluruh Nusantara dan luar Negeri. ¹⁴⁾ Kepala Kampung Toli-Toli Abdul Wahab Lainta bersama Haji Tengku kepala distrik Utara Toli-Toli berangkat dengan perahu ke Donggala untuk melaporkan kejadian ini pada Asisten Residen. Ditengah laut mereka bertemu dengan kapal KPM lalu menceriterakan kejadian tersebut kepada Kapten Kapal. Dengan Kapal itulah mereka ke Donggala melapor pada Asisten Residen (waktu itu Toli-Toli masuk wilayah Afdeeling Donggala). Beberapa hari kemudian Asisten Residen Donggala bersama raja Banawa Lamarauna, dengan dikawal satu pasukan polisi, menuju Toli-Toli dengan menumpang Kapal KPM tadi. Di Toli-Toli rombongan ditambah lagi dengan Tegelan Haji Muhammad Ali Bantilan, raja muda Toli-Toli lalu menuju ke Salumpaga.

Sejak pecahnya peristiwa pada tanggal 5 Juni 1919, rakyat Salumpaga senantiasa dalam keadaan siap siaga dengan penempatan pos-pos penjagaan disepanjang pantai, bersenjatakan tombak, keris, parang sumpitan. Seluruh keluarga mereka diungsikan kegunung-gunung sampai ada yang melahirkan ditengah hutan diatas gunung. Anaknya dimasukkan dalam keranjang ayam yang dibuat sebagai ayunan. Rombongan

14). M. Lubis : Op. Cit.

itu tiba di Salumpaga pada waktu pagi. Yang mula-mula turun ke darat adalah raja Toli-Toli Tegelang Haji Mohammad Ali dan raja Banawa Lamarauna. Sebelum mereka tiba di Salumpaga telah diturunkan di Tanjung Kako (± 1 km dari Salumpaga), polisi lengkap dengan senjatanya. Mereka didaratkan pada waktu malam hari hingga rakyat tidak mengetahuinya.

Melihat yang datang adalah kapal dagang (bukan kapal putih kapal perang) maka rakyat tak menaruh curiga. Disangkanya kapal itu datang mengangkat rotan kepunyaan orang Cina di kampung Salumpaga. Datangnya raja Banawa Lamarauna dan Tegelan Haji Muhammad Ali sama sekali tak dicurigai. Setiba di darat raja Banawa Lamarauna memerintahkan supaya senjata-senjata diletakkan sejauh 5 meter dari pemiliknya masing-masing. Karena ketaatannya pada raja, maka perintah itu mereka laksanakan dengan patuh. Raja Lamarauna terus memeluk Haji Hayun. Sementara itu berangsur-angsur pasukan polisi Belanda yang sudah siap mendekati mereka. Kemudian semua rakyat yang berkumpul itu ditangkap satu-persatu. Haji Hayun, Otto, Kembang dan Hasan langsung diikat. Setelah itu barulah Asisten Residen Donggala turun ke darat. Rakyat lalu digiring ke sekolah dan dijemur di halaman sekolah tersebut. Kemudian Asisten Residen menanyakan siapa yang membunuh kontroliur dan korban lainnya, serta tempat kuburannya. Tawanan kemudian dipindahkan ke sebuah rumah besar kepunyaan Lagandingan. Haji Hayun, Otto, Kembang dan Hasan diikat ditiang rumah. Makanan ditaruh ditemperung kelapa dan mereka disuruh makan seperti kucing tanpa mempergunakan tangan. Jenazah kontroliur dibawa ke Toli-Toli. Kemudian saudaranya mengambilnya dan membawanya ke Batavia.

Selesai menguburkan kembali para korban dan setelah mengetahui pelaku pembunuhan, kemudian Asisten Residen bersama Lamarauna dengan menumpang kapal KPM kembali

ke Donggala. Selama 7 hari para tawanan dijaga ketat sambil menunggu kapal perang untuk mengangkutnya ke Toli-Toli. Yang diangkut ke Toli-Toli sebanyak 67 orang ialah : Haji Haryun, Abdul Karim, Otto, Marus, Yulu, Kampaeng, Kombong, Hasan, Jali, Suebun, Mandani, Lancugau, Lagosa, Labucu, Halika, S.Lumu, Porong, Malesang, Yakub, Intio, Lamara, Nandu, Karim, Kaimang, Sibi, Danan, Nyong, Puto, Se-reang, Tiki, Yoko, San, Lahido, Haji Abdul Karim, Kambi, Yasit, Larekeng, Siabu, Sikuru, Sani, Kasibun, Panggola, Babili, Haji Halim, Mardani, Tanaa, Ibrahim, Gafur, Korong, Doji, Lakim, Bun, Halik, Sahudi, Inda, Lawere, Imporo, Lacaco, Lanone, Topik, Madin, Lahali, Malatte, Abdul Latif, Latimalu. ^{1 5)}

Di Toli-Toli para tawanan itu dipenjarakan di Lonti. Selama di Toli-Toli mereka dipaksa bekerja dalam bulan puasa membuat jalan dan jembatan pelabuhan Tanjung Batu yang panjangnya 300 meter dari pantai menuju laut, dengan tangan terikat.

Kira-kira 3 bulan dipekerjakan di Toli-Toli barulah dikirim ke Manado untuk diadili. Selesai diadili di Manado, proses verbalnya dikirim ke Makassar. Landraad Makassar kemudian mengambil keputusan hukuman. ^{1 6)}

Rakyat yang ternyata tidak bersalah kemudian dibebaskan dikembalikan ke Salumpaga. Yang dijatuhi hukuman adalah :

No.	Nama	Tempat Pem- buangan	Jenis/lama hukuman	Keterangan
-----	------	------------------------	-----------------------	------------

15). Wawancara dengan M.Raiss Amiruddin di Toli-Toli, 7-10-1978.

16). Hasil wawancara dengan Anwar Abu, Kepala Kampung Salumpaga di Toli-Toli pada tanggal 16-10-1978.

1.	Haji Hayun	Nusakam- bangan	Seumur hidup	Pimpinan, me- ninggal di Am- barawa.
2.	Kombong	Manado	Hukum gan- tung sda	Pimpinan.
3.	Otto	sda	sda	sda
4.	H a s a n	sda	sda	sda
5.	J a l i	Nusakam- bangan	15 tahun	meninggal di Sa- lumpaga.
6.	Y u u b o	sda	8 tahun	masih hidup.
7.	Abdul Karim	sda	—	meninggal wak- tu menuju Cila- cap.
8.	Abdul Mu- talib	sda	9 tahun	meninggal di Sa- lumpaga.
9.	Marus	sda	7 tahun	sda
10.	Kampaeng	sda	20 tahun	sda
11.	Mudin	sda	20 tahun	sda
12.	Suebun	sda	5 tahun	sda
13.	Lancugau	sda	7 tahun	sda
14.	Lagesa	sda	5 tahun	sda
15.	Halika	sda	4 tahun	masih hidup.
16.	Indala	sda	9 tahun	meninggal di Sa- lumpaga.
17.	Intio	sda	6 tahun	sda
18.	Kambi	sda	7 tahun	sda
19.	Sikuru	sda	5 tahun	sda
20.	Rabili	sda	6 tahun	sda
21.	Tamaa (Wa'- muda)	sda	7 tahun	sda
22.	D u n	sda	6 tahun	sda
23.	Labucu	Boven Digul	5 tahun	sda
24.	Lamara	Nusakam- bangan	5 tahun	sda

25.	Lamesang	sda	2 tahun	sda
26.	Hamesa	Boven Digul	5 tahun	masih hidup
27.	Lakuseng	sda	5 tahun	sda.

Dalam resolusi DPR-GR Kabupaten Toli-Toli tersebut diatas disebutkan bahwa Hasan dihukum 20 tahun. Tetapi dari banyak laporan wawancara menyebutkan bahwa Hasan dihukum gantung di Manado bersama dengan Kombong dan Otto. Juga dalam buku " *Pemberontakan Toli-Toli* (3 kaum SI mati di gantung). M. Lubis menulis : " Putusan Landraad Makassar, 4 orang pemimpin pemberontakan Toli-Toli dihukum mati digantung ". Dikuatkan oleh Raad van Justisi dan disyahkan oleh Gubernur Jenderal Mr.P. Fock. Mereka yang menjalani hukuman gantung di Manado pada tanggal 27 — 9 — 1922 adalah : 1. Kombong, 2. Otto, 3. Hasan, 4. Jakaria (Kepala Kampung Salumpaga terlebih dahulu mati menggantung diri dalam selnya). ^{1 8)}.

Haji Hayun dihukum buang seumur hidup di Nusakambangan, lalu dipindahkan ke Semarang. Dalam perjalanan menuju ke Semarang Haji Hayun meninggal sekitar tahun 1943 dan jenazahnya dikuburkan di Ambarawa. ^{1:9)}. Ketiga orang yang diputuskan dijatuhi hukuman mati digantung di penjara Manado (Otto, Kombong dan Hasan) kemudian naik banding ke pengadilan tinggi Raad van Justisi Makassar tetapi tak mendapat jawaban. Akhirnya datang putusan Gubernur Jenderal bahwa permintaan grasi mereka ditolak dan hukuman gantung tetap dilaksanakan.

Sebelum menjalani hukuman mereka diizinkan bertemu dengan keluarganya. Mereka meminta bertemu dengan seo-

18). M. Lubis : Op. Cit.

19). Hasil wawancara dengan Hasan Tawil, cucu Haji Hayun, di Palu pada tanggal 3-2-1978, hal.

rang Ulama besar yaitu Kiyai Haji Muhammad Arsyad Tawil, Hoofd Penghulu Landraad Manado, seorang bekas buangan dalam pemberontakan Cilegon Banten (1888), permintaan mana dikabulkan sehingga Kiyai Muhammad Arsyad Tawil didatangkan ke penjara Manado. Pertemuan dengan Kiyai Muhammad Arsyad Tawil diawasi dan diamati oleh pihak yang berwajib dipenjara. Yang tertua dari mereka lalu bertanya : " Mas Kiyai, bagaimanakah keadaannya ketika roh, jiwa berpisah dari badan "? Mas Kiyai, memberi jawaban dengan mengeluarkan Al Qur'an surat Al-Isra' ayat 85 : " Wa yas alunaka Anir ruhi, qulik ruhu min amri Rabbi, wa ma utitum minal'ilmi illa qalilan ", artinya : " Apabila mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Allah dan kami memberikan ilmu pengetahuan, kecuali hanya sedikit ".

Tetapi bersenanglah, kata Mas Kiyai, bahwa kamu dengan hukum ini akan mendapat putusan mati syahid. Mendengar itu wajah mereka kelihatan berseri-seri. Sebagai orang yang beriman yang dengan penuh kepercayaan akan nikmat kemurahan Allah Yang Maha Kuasa. La tataharraka zarratan illa biiznillah = Tidak terjadi segala sesuatu, kecuali dengan izin Allah. ²⁰). Setelah mendapat penjelasan, mereka merasa gembira dan rela melakukan hukuman gantung.

Tanggal 17 September 1922 tibalah di Manado seorang algojo dari Batavia bernama Tere dengan 3 orang pembantu-nya lengkap dengan perkakasnya berupa besi, kawat, tali serta palang melintang. Tanggal 27 September 1922 pagi, semua alat-alat pembunuh tersebut sudah terpasang. Kontrolieur, jaksa, dokter dan presiden Landraad telah hadir dan sejumlah 12 orang anggota *gewapende* polisi siap dengan pedang terhunus dan senjata berboyonet. Ketiga terhukum sudah siap pula, tangannya dirantai dan matanya diikat dengan kain hitam.

20). M. Lubis : Op. Cip.

Tere lalu memanggil nama Kombong. Pada saat itu Kombong digiring ketiang gantungan dinaikkan keatas meja yang terse-dia. Tali kawat dilehernya lalu disentak dan meja tempat ber-dirinya ditarik. Kombong menghembuskan napas yang ter-akhir.

Kemudian Otto dipanggil lalu alat gantung dipasang dilehernya. Tali dan kawat gantungan ditarik, meja ditarik maka Otto pun digantung. Tak lama kemudian lalu Hasan dipanggil oleh Tere. Hasan menyahut pula dengan suara keras : Yah kita sudah sedia, seorang anak laki-laki pantang mundur, mati itu adalah tunangan kita. Sewaktu naik tiang gantungan ia sempat memberikan selamat tinggal kepada ibu bapanya serta saudara-saudara seperjuangannya dengan berseru : *Insya Allah kita sekalian akan bertemu didalam janatun nain* ". Setelah itu ia azan dengan suara keras dan mengucapkan kalimat syahadat.. Ketika meja-meja digeser dan tali penjerat lehernya disentak, mulutnya masih berkemat kamit dan suaranya masih berdengun perlahan-lahan. Kira-kira 15 menit barulah ia diam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai pelaksanaan hukum gantung itu maka beberapa orang tua dari kampung Kodok dan Komo menghadap pembesar negeri Manado, meminta mayat-mayat itu diserahkan kepada orang-orang kampung supaya diurus pemakamannya sesuai dengan syariat Islam, tetapi permintaan itu ditolak.

Dengan dikawal oleh 12 orang polisi bersenjata bayonet terhunus ketiga mayat itu lalu dikuburkan oleh orang-orang hukuman lainnya diperkuburan Lawangirung dipimpin oleh mandor Amat (mandor penjara), bekas buangan dari Betawi yang ternyata tidak begitu paham seluk beluk tata cara penguburan secara Islam. Ketiga mayat dikubur dalam satu lubang dan untuk beberapa hari dijaga terus oleh anggota-anggota polisi agar mayat-mayat tersebut tidak digali oleh masyarakat kampung Kodok dan Komo. Beberapa bulan setelah pemberontakan Salumpaga, pemerintah Belanda lalu mem-

buat tugu peringatan untuk kontroliur Y.P. De Kat Angelino serta perbaikan kuburan dari anggota-anggota polisi yang tewas.

2. *Perlawanan Gerakan Merah Putih di Toli-Toli (1942)*

Pada akhir masa pemerintahan Belanda di Toli-Toli terjadi pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Kepala Polisi Inspektur Boertje ditembak oleh anak buahnya bernama I.D. Awuy. I.D. Awuy adalah seorang polisi yang diutus oleh Nani Wartabone dari Gorontalo ke Buol dan Toli-Toli untuk menggalakkan Gerakan Merah Putih. Rapat rahasia untuk merencanakan aksi Gerakan Merah Putih itu diadakan di rumah Klerek E.Kansil di Toli-Toli pada tanggal 23 Januari 1942 dan dihadiri oleh :

1. I.D. Awuy anggota polisi sebagai pimpinan.
2. H.L. Waani juga anggota polisi.
3. E. Kansil Klerk Kontroliur.
4. Makale, Werk Baas.
5. A. Manuel Boekhouder Kontroliur.
6. S. Malingga Kepala Douane Toli-Toli.
7. M. Salim Haji Hallu tokoh PSII.

Tujuan Gerakan Merah Putih adalah mengambil alih kekuasaan pemerintah Belanda di Buol Toli-Toli dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Gerakan ini cepat mendapat sambutan dari Pemuda kaum pergerakan, anggota polisi dan pegawai pemerintahan.

Pada tanggal 25 Januari 1942, terjadilah pemberontakan dan pembunuhan terhadap Kepala Polisi Belanda Inspektur Boertje. Setelah terjadi pembunuhan itu maka pemberontak dipimpin oleh I.D. Awuy segera mengepung rumah kontroliur Toli-Toli (De Hoof), menangkapnya dan memasukkan dalam tahanan. Kemudian menangkap tuan Yansen. Sesudah itu mereka mengepung rumah Bestuur Asisten Mattata Daeng Mase. Ternyata malam itu ia tidak berada di rumahnya dan

pencarian dilanjutkan pada besoknya tanggal 26 Januari 1942. Akhirnya diketahui ia bersembunyi di kebunnya. Yang bertugas mencarinya adalah Languju (anggota polisi), E. Kansil, M. Salim Haji Mallu dan sopir Lamuin. Akhirnya Mattata Daeng Masese dapat ditangkap dan ditahan.

Pada hari itu pula I.D. Awuy berangkat bersama Waani (anggota polisi) ke Buol untuk menangkap Kontrolieur Puol (De Bries), kemudian diseret ke Toli-Toli.

Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh penjahat tersebut maka praktis kekuasaan berada di tangan Gerakan Pemuda Merah Putih. Gerakan inilah yang mengatur pemerintahan dan keamanan. Pimpinan keamanan dipegang oleh kepolisian dibantu oleh tokoh-tokoh pemuda dan pergerakan:

1. Haji Mahmuda, Kadi Kerajaan Toli-Toli.
2. S.A. Alatas Kepala Arab.
3. Haji Hamid Ketua PSII.
4. Haji Ibrahim, Pimpinan Pemuda Muslim.
5. M. Tahir, Ketua Pandu SIAP.
6. Haji Said, Kepala Sekolah Islamiyah.
7. M. Yamin, Penulis PSII.
8. A. Rasyid, anggota PSII.

Pada tanggal 1 Pebruari 1942 dengan diiringi lagu Indonesia Raya berkibarlah Sang Merah Putih di angkasa Toli-Toli di halaman kantor PSII Desa Lonti, tiga setengah tahun mendahului pengibaran Sang Saka Merah Putih di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pengibaran bendera ini dipimpin oleh M. Salim Haji Mallu. Yang menjadi pengerek bendera adalah M. Nawir Haji Hamid dan Abu Baeda; dan upacara ini dihadiri oleh Jaksa Yakobus dan rakyat Toli-Toli.

Sesudah selesai rapat umum untuk penaikan bendera Merah Putih barulah diketahui bahwa dua orang anggota polisi telah melarikan diri, yaitu Usman dan Ma'ruf. Mereka berangkat ke Donggala melaporkan kudeta Gerakan Merah Putih Toli-Toli. Seminggu kemudian datanglah pasukan **tentara**

Belanda yang dipimpin oleh Letnan Herberts dan mendarat tengah malam di Toli-Toli, langsung mengepung tangsi polisi Toli-Toli dengan persenjataan yang kuat menyebabkan para polisi yang sudah memberontak tidak sempat mengadakan pertahanan dan mengundurkan diri masuk hutan di atas kampung Tuwelei.

Pagi harinya pasukan Belanda memasuki tangsi polisi dengan menawan isteri-isteri polisi yang telah melarikan diri itu. Disitu tentara Belanda mempergunakan tipu muslihatnya, membujuk isteri-isteri polisi tersebut supaya memanggil suaminya dan menjanjikan akan memberikan surat pengampunan bagi suaminya. Sebagai hasil bujukan akhirnya anggota polisi yang melarikan diri itu terpancing untuk kembali dan menyerah, antara lain. Makaleo, Piring, Siswoyo, Suparman. Yang tidak menyerah terus melarikan diri antara lain: I.D. Awuy, H.L. Waani, Jafar Habibi, S. Malingga dan M. Salim Haji Mallu. Sedang yang tertangkap dari golongan pegawai adalah, E.Kansil Makalo, A. Manuel. Ketiganya dipenjarakan di Donggala. I.D. Awuy dalam pelariannya ke Gorontalo tertangkap di Buol dan diserahkan kepada raja Buol. Kemudian datang sersan Wenglingba (lebih dikenal dengan nama sersan Merah) menembak I.D. Awuy di belakang penjara Leok pada tanggal 18 Pebruari 1942. H.L. Waani melarikan diri ke Tuwalei, akhirnya tertangkap dan ditembak mati di Panasakan Dalam. Sebelumnya Makaleo, Piring, Languju, Siswoyo dan Suparman telah ditembak mati di Panasakan Dalam. S. Malingga, M.Salim Haji Mallu dan Jafar Habibi dapat meloloskan diri ke Gorontalo. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang barulah mereka kembali ke Toli-Toli.

Atas permintaan pejuang-pejuang kemerdekaan kepada pemerintah Jepang Bunken Kanrikan Awatzu maka didirikanlah tugu peringatan di depan kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli. Tugu peringatan bertuliskan nama para pejuang yang telah gugur masing-masing :

1. I.D. Awuy.
2. H.L. Waani.
3. Makaleo.
4. Piring.
5. Siswoyo.
6. Suparman.
7. Languju.

E. PERLAWANAN TERHADAP JEPANG

Pada mulanya Toli-Toli menjadi basis pertahanan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang di Sulawesi Tengah. Rakyat tidak dapat berbuat apa-apa kecuali tunduk dan patuh pada perintah Jepang. Tokoh-tokoh pergerakan Merah Putih yang mengadakan aksi pada tanggal 1 Pebruari 1942, banyak meninggalkan kota dan tinggal di luar kota Toli-Toli. Sebagiannya lagi ikut tertangkap dan di penjarakan di Manado. Namun setelah melihat dan mengalami kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh kaki tangan-kaki tangan Jepang terhadap rakyat di Kampung Ogotua, Soni, Bambapula, Malomba dan sekitarnya, maka tokoh-tokoh PSII yang ada di kampung-kampung itu mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk memikirkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan menentang perbuatan-perbuatan yang dinilai sudah melanggar norma-norma Agama itu. Pemukulan sewenang-wenang terhadap rakyat dan pemerkosaan wanita-wanita, bahkan kadang-kadang isteri orangpun diambil secara paksa dari tangan suaminya untuk dijadikan alat pemuas hawa nafsu kaki tangan-kaki tangan Jepang, telah menjadi kebiasaan sehari-hari.

Kesulitan pakaian, kekurangan bahan makanan membuat rakyat tak sabar dan tidak kuat lagi menahan, sehingga perasaan takut luar biasa terhadap Jepang berbalik menjadi perasaan benci yang meluap-luap dan menimbulkan sikap nekat melawan Jepang dan kakitangannya. Perasaan benci rakyat terhadap Jepang dan kaki tangannya makin meningkat lagi setelah da-

tangnya Abang Ali (suku Jawa) dan Tantong Madayuni (suku Dondo) dari Tarakan. Mula-mula kedua orang ini menemui tokoh-tokoh partai (PSII) di Bambapula, masing-masing bernama Ladjabare, Lasaenong dan Lapanrita, untuk melaporkan bahwa Jepang sudah mendekati kekalahannya. Di Tarakan, Berau dan Bulungan telah terjadi pemberontakan rakyat melawan Jepang. Secara bisik-bisik beredar issue bahwa dengan kalahnya Jepang oleh Sekutu maka ada rencana untuk membunuh rakyat seluruhnya supaya kalau Sekutu datang tak ada lagi rakyat sehingga mereka hanya akan memerintah batu dan pohon saja. Oleh karena itu sebelum rakyat dibunuh maka rakyat harus berontak pada Jepang.

Pada waktu itu di Toli-Toli telah banyak tokoh-tokoh masyarakat serta rakyat biasa yang ditangkap atas perintah Ken Kanrikan Imaki dengan tuduhan mata-mata musuh. Untuk rakyat kampung Nalu, para guru dan pegawai yang ditahan dibuatkan asrama di kampung Panasakan. Kepada mereka oleh Jepang diperintahkan menggali lubang perlindungan dengan alasan untuk tempat bersembunyi jika ada pemboman Sekutu, padahal sebenarnya lubang itu dipersiapkan sebagai tempat penguburan masal jika diadakan pemandangan rakyat kelak.

Mendengar laporan dari Abang Ali dan Tantang Madayuni itu maka tokoh-tokoh masyarakat kampung Bambapula pada tanggal 2 Juni 1945 mengadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan rencana pemberontakan terhadap Jepang bersama kaki tangannya. Sementara itu polisi di Ogotua mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang pelarian dari Tarakan ada di Bambapula. Pada tanggal 12 Juni 1945 dikirimlah 2 (dua) orang polisi Jepang ke Bambapula, masing-masing bernama Krek dan V.Manopo. Keduanya langsung menuju ke rumah kepala Kampung Bambapula tapi keduanya dihadang rakyat di tengah jalan sebelum sampai ke rumah Kepala Kampung.

V.Manopo menyerahkan diri tetapi Krek melarikan diri sehingga dikejar beramai-ramai sampai tertangkap dan karena me-

lawan maka ia dibunuh, senjatanya dirampas. Kedatangan dua orang polisi ke Bampapula itu adalah untuk mencari Atang Ali dan Tantong Madayuni. ²¹⁾ Setelah musyawarah di Kampung Bampapula, Tantong Madayuni melanjutkan perjalanan ke kampung Malomba untuk menemui tokoh-tokoh masyarakat disana. Tanggal 1 Juli 1945 diadakanlah musyawarah antara para tokoh masyarakat desa Malomba, dipimpin langsung oleh Tantong Madayuni, di rumah seorang tokoh masyarakat yang bernama Radjaili yang juga ketua ranting PSII di Malomba. Pertemuan tersebut memutuskan :

1. Seluruh rakyat desa Malomba laki-laki tua/muda harus melawan pemerintah Jepang bersama kaki tangannya dengan alat apa saja yang dapat dipergunakan.
2. Barang siapa yang mungkir atau lari, harus dibunuh dan disita seluruh harta bendanya.
3. Penjagaan desa Malomba harus diperketat dari dua arah. Di Timur yaitu di Tinabongan dipimpin oleh Baula dan di Barat yaitu di Lais dipimpin oleh Lassaenong.
4. Jika telah terjadi pertempuran maka kedua penjaga tersebut harus tolong menolong dan suku Daya Lauje dari desa Ogowale sudah harus siap dengan sumpit menunggu komando dari pimpinan yaitu Tantong Madayuni.

Berita pembunuhan Polisi Jepang di kampung Pambapula dan rencana rakyat Malomba hendak melawan pemerintahan Jepang, oleh seorang Polisi Jepang di Malomba dilaporkan kepada Ken Kanrikan Imaki di Toli-Toli. Sejak pertemuan tanggal 1 Juli 1945 di Malomba rakyat kampung Malomba dan sekitarnya telah bersiap-siap menjaga kemungkinan adanya serangan dari Jepang bersama kaki tangannya. Pada tanggal 18 Juli 1945 datanglah Ken Kanrikan Imaki dengan kapal motor. Ia berlabuh di desa Tinabogar dengan pengawalan sepasukan polisi dan ten-

21). Wawancara dengan Bapak Haji Muhammad Salim Mallu di Mallu di Kampung Baru Toli-Toli tanggal 16-11-1979.

tara Jepang. Di desa Tinabogan Ken Kanrikan Imaki ditemani oleh Suco Toli-Toli Haji Mohammad Saleh Bantilan, polisi Makalo dan Hamlet Semen. Mereka naik gerobak menuju ke Malomba, sedangkan pasukan-pasukan polisi dan tentara Jepang lainnya naik motor laut ke Malomba. Mendengar kedatangan rombongan Ken Kanrikan Imaki ini maka rakyat Malomba dan sekitarnya bersiap menunggunya. Sewaktu memasuki desa Malomba Polisi pengawal Ken Kanrikan memerintahkan kepada rakyat supaya meletakkan senjatanya masing-masing. Lanoni yang telah bertekad dan berjanji akan membunuh setiap bangsa Jepang yang lewat didepannya hari itu, meletakkan senjatanya berupa parang di bawah pahanya.

Melihat rakyat patuh meletakkan senjatanya maka polisi yang bernama Hamlet Semen (pengawal rombongan) meletakkan senjatanya ke atas sebagai kode bagi polisi dan tentara di atas motor laut bahwa keadaan aman dan perlawanan rakyat sudah diatasi.

Mendengar letusan ini rakyat segera memegang senjatanya lagi dan berlari menuju rombongan Ken Kanrikan. Lanoni yang terdekat dengan grobak tumpangan Ken Kanrikan segera memotong parangnya ke kepala Ken Kanrikan Imaki yang sedang turun dari gerobak sehingga kepalanya terpental. Ia mati saat itu juga. Melihat kejadian ini polisi Makalo menembak Lanoni hingga ia tersungkur dan meninggal. Raja Toli-Toli Haji Muhammad Saleh Bantilanpun hampir korban seandainya tak dilindungi oleh Datu Intan. Dari arah laut pasukan polisi dan tentara Jepang menghujani tembakan kedarat menyebabkan banyak dari rakyat yang jatuh korban. Yang meninggal pada kejadian tersebut adalah Ken Kanrikan Imaki dan Lanoni. Inaki dikuburkan di Tinabogan dan Lanoni di Ogogasang. Sampai sekarang ini kuburan Lanoni masih tetap ada di Ogogasang belum dipindahkan ke Makam Pahlawan Toli-Toli. Yang menderita luka parah dalam peristiwa Halomba ini adalah polisi Jepang Makalo dan dari pihak rakyat adalah Bobelan Taniangka, Haji Hamzah dan

Daeng Maroncong.

Pada tanggal 21 Juli 1945 pemerintah Jepang lalu mengadakan penangkapan terhadap beberapa tokoh pemberontak rakyat Malomba yaitu :

1. Bebelan.
2. Taniangka.
3. Haji Hamzah.
4. Amat.
5. Bacolena.
6. Abdul Wahab.
7. Usman.
8. Adam Labudu.
9. Labudu.

Kesembilan orang ini dengan tangan diborgol dibawa ke Toli-Toli dan sesampai disana mereka dipancang di kampung Panasakan Dalam, dikaki sebuah Bukit lalu dikubur dalam satu lubang. Sekarang kerangka dari ke 9 orang pahlawan tersebut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli telah dipindahkan ke Makam Pahlawan Toli-Toli.

Setelah pemberontakan rakyat Melomba ini barulah pada tanggal 1 Agustus 1945 pemerintah Jepang di Toli-Toli memerintahkan pembebasan terhadap rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat kampung Nalu, para guru dan pegawai yang telah lama ditahan karena perintah Ken Kanrikan Imaki. ²²⁾ Perlawanan lainnya di Sulawesi Tengah melawan Jepang terjadi pula di Balantak dan Ranga-Ranga (Wilayah Luwuk Banggai), dipimpin oleh Mantide.

Juga di desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso terjadi aksi rakyat menangkapi tentara Jepang dipimpin oleh Abe Pande, Tarico Hio dan kawan-kawannya, sehingga sisa pa-

22). Wawancara dengan Bpk. Haji Mahmud Radjaili di Kampung Panasakan Toli-Toli, tanggal 18 - 11 - 1979.

sukan Jepang menyingkir ke Tawaelia. ^{2 3}) Pemberontakan rakyat pada ke dua tempat diatas kurang lengkap data-datanya sehingga tak dapat diuraikan secara terperinci. Di Salinggoha Kecamatan Walea Kepulauan, pada tahun 1944 (2604 tahun Jepang) Talhata Dariseh dengan pengikut-pengikutnya melakukan perlawanan. Mereka tak mau taat lagi kepada pemerintah Jepang dan mendirikan pemerintahan sendiri di Kampung Salinggoha (pulau Walea) kerajaan Una-Una dengan kepala pemerintahannya dipegang oleh Talhata Dariseh, Daeng Parangi. Bendera yang dikibarkan bukan bendera Merah Putih tetapi bendera dengan dasar hijau dengan bulan bintang putih ditengah-tengahnya. Karena sikap rakyat Salinggoha ini maka dikirimkanlah pasukan polisi dari Gorontalo untuk mengetahui dari dekat maksud dari penduduk Salinggoha.

Pada waktu motor yang ditumpangi oleh polisi dari Gorontalo mendekati kampung Salinggoha, maka rakyat dengan berperahu keluar menyongsong dengan bersenjatakan tombak dan klewang. Polisi-polisi lalu memberikan tembakan peringatan ke udara supaya mereka menyerah, tetapi ternyata mereka bukannya menyerah malah tambah maju mendekati motor yang ditumpangi polisi-polisi Jepang itu. Melihat gelagat yang membahayakan itu maka polisi-polisi lalu menembaki para pemberontak sehingga banyak yang gugur ditembus peluru dan mayatnya jatuh ke laut. Walaupun sudah banyak yang gugur tetapi yang masih hidup bukannya menyerah malah tambah nekat melawan, maju terus mendekati motor polisi. Akibatnya polisi terus memberondong senapan ke arah pemberontak-pemberontak sehingga korban makin banyak berjatuhan. Akhirnya polisi-polisi tadi berhasil juga mendarat. Didaratan rakyat tetap mengadakan perlawanan menyerang polisi-polisi itu. Polisipun terus

23) Informasi tertulis dari G.Beba, Penilik Kebudayaan pada Kantor Dep. P dan K. Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

bertindak dengan senjata apinya sehingga jatuh bergelimpangan korban-korban yang kena tembakan. Diantaranya yang korban terdapat ayah dari Talhate.

Melihat ayah dari Talhata telah gugur, sisa pasukan yang masih selamat mengundurkan diri masuk ke hutan dimana Talhate telah lebih dahulu membuat pertahanan di dalam hutan tersebut. Polisi yang datang tak berani menyerbu masuk ke dalam hutan tetapi kembali ke Gorontalo sambil membawa tawanan-tawanan yang dapat ditangkap. Dua hari kemudian motor kembali lagi dari Gorontalo ke pulau Walea (Kampung Salinggoha) membawa polisi tentara Jepang. Sesampainya di Kampung Sainggoha dikirimkanlah kurir untuk menemui Talhata di dalam pertahanannya di hutan. Mengetahui bahwa ada tentara Jepang di motor itu maka terpaksa Talhata keluar dari persembunyiannya. Ia dengan pengikut-pengikutnya lalu ditangkap dan dibawa ke Manado (kira-kira ada 20 orang semuanya). Di Penjara Manado Talhata ditahan di kamar tersendiri, dipagar dengan kawat berduri, dan orang-orang dilarang menghampiri atau bertemu dengannya. Sedangkan anak buahnya yang 19 orang lagi ditahan bersama-sama di dalam satu kamar.

Gerakan ini sangat disayangkan karena hanya diadakan dengan kepercayaan tahyul saja, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kesaktian senjata keris, tombak dan golok, sehingga dapat dipatahkan oleh Jepang dengan kekuatan senjata moderennya atau mitraliurnya. ²⁴) Selain perlawanan rakyat terhadap Jepang di Toli-Toli dan Salinggoha yang diuraikan di atas, terjadi pula perlawanan-perlawanan rakyat di Balantak dan Ranga-Ranga (wilayah Luwuk Banggai) dipimpin oleh Mantide.

Juga di desa Wusa dan Watumaeta di kecamatan Lore Utara (sekarang Kabupaten Poso) terjadi pula penangkapan-penang-

24). Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Seri Propensi Sulawesi* hal. 219.

kan terhadap tentara Jepang oleh Abe Pande, Tarico Kio, dan kawan-kawannya yang menyebabkan sisa pasukan Jepang menyingkir ke Tawaelia.²⁵⁾

25). Informasi tertulis dari G. Beba, Penilik Kebudayaan pada Kantor Dep. P dan K kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

B A B. IV

AKIBAT YANG TIMBUL KARENA ADANYA PERLAWANAN

Pada mulanya kontak yang terjadi antara Belanda dengan penguasa-penguasa setempat di Sulawesi Tengah masih bersifat hubungan persahabatan dagang, tapi lama kelamaan berubah menjadi makin mengikat dengan disodorkannya Traktor Panjang oleh pihak Belanda.

Daerah yang mula-mula dihubungi Belanda adalah daerah yang memiliki sumber penghasil emas seperti Parigi. Tahun 1770 Belanda mendirikan loji (benteng) di Parigi dan Lambuno untuk mengawasi pertambangan emas di tempat tersebut. Akan tetapi karena kemudian produksi tambang tersebut merosot ditambah sikap raja Mai Puru yang tidak begitu senang pada Belanda, maka akhirnya pada tahun 1795 Belanda meninggalkan tempat tersebut dan tidak menghiraukannya lagi sampai tahun 1850.

Pada tahun 1850 datang ekspedisi Belanda terdiri dari 2 (dua) kapal Belanda bernama *Argo* dan *Bromo* dipimpin oleh kapten C. Van dan Hart menyodorkan Traktor Panjang pada Magau Parigi Iskandar Abd. Mohammad untuk ditanda tangani.

Untuk pengamanan teluk Palu dari gangguan bajak laut maka oleh Belanda ditangkap seorang kapten dari Kalangkangan bernama Djallantona sebagai pengawas di Teluk Palu, dan seorang Bugis bernama Lapatigo menjadi Kapten Bugis di Donggala. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa tak senang pada Madika (raja) Gunung Bale (bernama Maloda, salah seorang anggota Dewan Hadat Pitunggota Kerajaan Banawa) karena beliaulah yang sebenarnya menjadi penguasa pelabuhan (Syahbandar) di pelabuhan Donggala.

Pada tahun 1854 Magau Palu melindungi seorang buronan Belanda dari Manado dan menolak permintaan Belanda untuk menyerahkan buronan tersebut. Akibatnya utusan Gubernur dari Makassar datang ke Sulawesi Tengah membawa dan menyodorkan kontrak pengakuan kekuasaan pada pemerintah Belanda pada raja-raja Kaili (Banawa, Palu, Tawaeli).

Tahun 1888 Gubernur dari Makassar (Ujung Pandang) pergi ke Sulawesi Tengah lagi mencampuri urusan perbatasan antara Toli-Toli, Banawa dan Mamuju. Setelah itu Gubernur terus ke Teluk Palu dengan 3 (tiga) buah kapal perang dengan maksud memperbaharui lagi kontrak yang telah ditandatangani raja-raja Kaili pada tahun 1859. ¹⁾

Belanda merasa sikap raja-raja Kaili tidak patuh lagi pada kemauan Belanda sehingga perlu kontrak pengakuan diperbaharui kembali. Dengan tekanan tembakan 3 (tiga) kapal di pantai Kayumalue yang mengambil banyak korban, terpaksa raja Tawaeli yang baru dilantik (bernama Yangge Bodu Tome Tanggu) menandatangani Trahtat Panjang pada tanggal 26 Juni 1888.

Tahun 1888 raja Banawa Lasabanava wafat diganti oleh Makagili yang sebelumnya berkedudukan di Pantoloan. Oleh karena itu kepada Makagili pun disodori Trahtat Panjang yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1888.

Tanggal 18 Januari 1897 Makagili menandatangani lagi tambahan kontrak tentang landbow dan mijnbow yang disodorkan oleh pemerintah Belanda.

Berikut ini dituliskan daftar urutan tanggal penandatanganan Trahtat Panjang yang disodorkan Belanda pada penguasa/raja-raja di Sulawesi Tengah yang kami kutip dari buku *Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurs Zaken der Buiten Gewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuurs Serie A no. 3*.

- | | |
|-------------|---|
| 29 Mei 1887 | raja Parigi Ijengi disuruh menandatangani Trahtat Panjang dengan perjanjian mengadakan hubungan dan pengakuan pada kedaulatan Belanda sehingga dengan perjanjian ini raja Parigi makin dikuasai lagi. |
| 1 Mei 1888 | Magau Palu Yojokodi Toma Siema menanda- |

1). Kruyt. A.C., *De West Toradja's op Midden Celebes I*, 1938, hal. 40.

- tangani Trahtat Panjang dengan akte pengakuan pada kekuasaan Belanda.
- 14 Agustus 1891 terhadap madika Dolo dan Dewan Hadatnya disuruh menandatangani perjanjian pengakuan kekuasaan pemerintah Belanda.
- 9 Agustus 1891 Magau Sigi dan Dewan Hadatnya disuruh menandatangani perjanjian pengakuan terhadap kekuasaan pemerintah Belanda.
- 8 Agustus 1891 Perjanjian yang sama disodorkan dan disurutanandatangani pada Magau Biromaru bersama Dewan Hadatnya.
- 11 Desember 1887 Raja Tojo bernama La Riu dieru menandatangani Trahtat Panjang. Karena Raja Tojo menunjukkan sikap membangkang pada Belanda maka pada tanggal 25 Mei 1897 diulang lagi menandatangani. Tang Contract.
- 4 Agustus 1888 Kontrak disuruh tandatangani pada Gaweda raja Poso Bawah, bernama Ulite Bunga Sawak dan Bengka semuanya raja-raja daerah kerajaan yang terdapat di wilayah Poso.
- 27 Pebruari 1899 Kontrak ditandatangani Garuda alias Ta'urungi Papa I Tapulu sebagai Kabose Poso.
- 15 Agustus 1858 Trahtat Panjang ditandatangani oleh Muhammad Nur Aladin raja Buol.
- 31 Agustus 1864 Sirajuddin Raja Buol menandatangani perjanjian dan pengakuan pada kekuasaan Belanda.
- 13 Desember 1890 Patrah Turungku menandatangani Trahtat Panjang dari akte perhubungan dan pengakuan pada kekuasaan Belanda.
- 27 Agustus 1895 Patrah Turungku menandatangani lagi Trahtat Panjang.
- 5 Juli 1858 Bantilan Syafiudin raja Toli-Toli menandatangani akte pengakuan kekuasaan kerajaan Belanda.

Demikianlah pemerintah Belanda dalam usahanya menanamkan kekuasaannya atau penjajahannya di daerah Sulawesi Tengah memakai siasat bertahap. Mula-mula sebagai sahabat lalu mulai menyodorkan perjanjian-perjanjian yang tidak begitu mengikat dan akhirnya menuntut raja-raja mengakui pemerintah yang berarti sedikit demi sedikit kemerdekaan dan kedaulatan raja-raja diambil. Selanjutnya pemerintah Belanda mencampuri dan mengatur pemerintahan dalam wilayah kekuasaan raja-raja.

Untuk menjaga supaya jangan ada kerajaan yang sempat menjadi kuat dan melawan maka diadakanlah politik adu domba. Wilayah kekuasaan raja-raja yang tadinya besar dipecah-pecah dan kalau ada timbul perselisihan maka salah satu pihak yang dapat dikuasi atau diikatnya diberi pertolongan atau bantuan hingga raja itu merasa berhutang budi dan mau mengikuti apa yang dikehendaki Belanda. Dapat dikatakan sejak tahun 1888 itu campur tangan Belanda atas Sulawesi Tengah makin meningkat.

Dengan makin meningkatnya campur tangan Belanda dalam urusan-urusan pemerintahan kerajaan tersebut, maka timbullah perlawanan-perlawanan rakyat yang dipimpin oleh raja tau tokoh-tokoh pemimpin lainnya. Malah ada pula perlawanan-perlawanan perorangan. Kesemua perlawanan yang timbul ini merupakan reaksi dan pertanda sikap penolakan rakyat atas datangnya kolonialisme dan imperialisme di Sulawesi Tengah yang menimbulkan bermacam-macam akibat baik terhadap raja-raja atau penguasa setempat dengan struktur pemerintahan adatnya, maupun terhadap kehidupan masyarakat, bahkan juga pada pihak pejabat-pejabat kolonial itu sendiri.

Yang jelas adalah bahwa akibat perlawanan-perlawanan tersebut satu persatu wilayah daerah Sulawesi Tengah, lalu dikuasai langsung oleh pemerintah kolonial, yang berarti kuku penjajahannya makin kuat tertanam untuk mengeksploitasi rakyat bersama kekayaan alam dan hasil buminya, yang selanjutnya mengalir mengisi perbendaharaan kas pihak penjajah, utamanya bagi pemerintah Belanda pada masa-masa sebelum pecah perang dunia ke II.

Demikian pula halnya dengan datangnya kekuasaan penjajah fasis Jepang yang berkuasa dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Rakyat dan bumi Sulawesi Tengah dieksploitasi untuk menjadi sumber pengadaan kebutuhan perangnya, terutama di bidang penyiapan bahan pangan dan mika. Perlawanan-perlawanan tersebut menimbulkan akibat sebagai berikut :

A. DI BIDANG PEMERINTAHAN.

Dalam bidang pemerintahan yang melawan mengalami perubahan pemerintahan adatnya setelah Belanda berkuasa. Sedikit demi sedikit peranan Dewan Hadat dalam pemerintahan dikurangi. Administrasi pemerintahan secara barat mulai diterapkan mengikuti cara-cara yang diinginkan oleh pihak penjajah Belanda.

Raja-raja lalu dijadikan sebagai aparat pemerintah Belanda yang harus mendatangkan keuntungan bagi Belanda, menyeter penghasilan pada kas pemerintah dari hasil pungutan pajak kepala disamping menyediakan rakyatnya sebagai tenaga kerja untuk pelaksanaan kerja rodi pembuatan jalan-jalan raya, jembatan dan sebagainya

Setiap kali Belanda mengalahkan raja-raja yang melawan maka disodorkan perjanjian "plakat pendek" atau korte verklaring seperti halnya raja Kulawi yang bernama Intovoalangi alias Toma I Torengke pada tanggal 30 Nopember 1908 dan Pue Langa (Intondei) adik Karajalembah (Toma I Dampo) dari kerajaan Sigi-Biromaru menandatangani korteverklaring pada tanggal 3 Desember 1908.

Menandatangani korteverklaring berarti raja-raja yang sudah dikalahkan tersebut mengakui kekuasaan pemerintah Belanda atas wilayahnya. Ini berarti raja-raja tersebut tidak bebas lagi mengatur pemerintahannya seperti sebelum mengadakan perlawanan.

Dalam mentrapkan administrasi pemerintahan secara barat perlahan-lahan pemerintahan secara adat mulai dikurangi sedikit demi sedikit, seperti umpamanya di Banggai. Sebelum datangnya

Belanda raja didampingi oleh Basalo Sangkap dibantu oleh Komisi Empat. Setelah datangnya Belanda maka fungsi Basalo Sangkap dikecilkan diturunkan hanya setingkat Kepala Kampung. Sebaliknya kekuasaan Komisi Empat diperbesar dengan mendudukkannya sebagai wakil raja di setiap wilayahnya.

Sulawesi Tengah lalu dijadikan bagian dari keresidenan Manado dan dibagi 2 (dua) afdeeling masing-masing dengan ibu kotanya di Donggala dan Poso. Tiap afdeeling dikepalai seorang Asisten Residen. Dua afdeeling ini dibagi pula dalam 8 (delapan) onder afdeeling dan setiap onder afdeeling dikepalai oleh seorang kontrolleur oleh aspirant kontrolleur.

Akibat lainnya dari perlawanan-perlawanan tersebut adalah terbentuknya beberapa kerajaan baru sebagai pecahan dari kerajaan yang pernah melawan, atau penggabungan beberapa daerah yang tadinya berdiri sendiri-sendiri menjadi satu kerajaan. Kerajaan Tojo yang dipecah dua menjadi kerajaan Tojo dan kerajaan Una-Una. Kerajaan Lore dibentuk sebagai hasil penggabungan wilayah Napu, Bada, Besoa dan Tawaelia. Belanda mengangkat Umana Massi (nama aslinya Kabo) menjadi raja pertama dari kerajaan Lore. Ia menandatangani korteverklaring pada tanggal 22 Agustus 1917.

Dengan berkuasanya Belanda secara langsung di Sulawesi Tengah maka dilaksanakanlah pungutan pajak kepala, rodi atau kerja paksa secara intensip terhadap rakyat Sulawesi Tengah yang kelak dirasakan sebagai suatu beban sangat berat bagi rakyat.

B. AKIBAT BAGI PEMIMPIN—PEMIMPIN PERLAWANAN/ RAJA--RAJA.

Pada umumnya raja-raja yang melawan serta pemimpin-pemimpin perlawanan yang dikalahkan oleh Belanda mengalami hukuman buang ke daerah lain dan digantikan dengan orang lain yang masih sekeluarga dengan raja yang melawan tadi.

Ada kalanya secara adat atau tradisi setempat raja diangkat Belanda tadi tidak berhak menjadi raja atau kurang disetujui

oleh dewan adat, tapi justeru diangkat oleh Belanda karena dapat memenuhi dan patuh pada kemauan Belanda.

Akibatnya antara keluarga yang masih seketurunan lalu menjadi tidak senang satu sama lain. Sedangkan turunan langsung dari raja yang pernah melawan akhirnya sebagian tidak diberi kesempatan lagi untuk berperan dalam pemerintahan.

Hal seperti ini antara lain dialami oleh turunan Malonda raja Gunung Bale dari kerajaan Banawa penguasa pelabuhan (Syahbandar) di Donggala. Raja-raja yang mengalami hukuman buang adalah Makagili, raja Banawa yang membantu perlawanan Tombolotutu, raja Moutong, yang dibuang ke Sulawesi Selatan pada tahun 1903 hingga wafat di sana. Demikian pula halnya raja Tojo yang bernama Kolomboi dibuang ke Makassar (Ujung Pandang) tahun 1905.

Karajalembah (Toma I Dompou) dari kerajaan Sigi — Biro-maru diasingkan ke Sukabumi (Jawa Barat) hingga wafat di sana pada tahun 1917. Raja Vinono bersama anaknya Hanusu dari kerajaan Parigi akibat melawan lalu Hanusu dibuang ke Tondano (Sulawesi Utara).

Banyak pula yang gugur di medan pertempuran bersama pengikut-pengikutnya seperti raja Tombolotutu dari Moutong, raja Marundu II tahun 1907 dari kerajaan Mori serta penguasa Napu yang bernama Ama (Umana Soli), Putera Karajalembah yang bernama Lamasingi gugur pula diberondong pasukan Belanda ketika mencoba membela ayahnya yang hendak ditangkap oleh pasukan Belanda.

Tokoh-tokoh yang melawan secara perorangan pada umumnya ditangkap dan dibunuh seperti apa yang dialami oleh Tancigi dan Pelalo alias Tampayatu yang melawan di Kandela (wilayah Poso) dibunuh oleh Belanda di Tando Bone (tanjung pasir) di tepi danau Poso, pada tahun 1907. Rusulembah alias Tabatoki mengadakan perlawanan di Tentena (poso) kemudian ditangkap lalu dipenjarakan hingga meninggal di penjara. Laginda yang memimpin pemberontakan suku Loon di kerajaan Banggai ditangkap

dan disiksa oleh Belanda tetapi akhirnya berhasil melarikan diri dan masuk ke hutan hingga tak diketahui lagi di mana kuburannya.

Selanjutnya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok suku setelah didesak oleh pasukan tentara Belanda lalu melarikan diri naik ke atas gunung dan mengembara dari hutan ke hutan menjadi suku terasing seperti halnya suku Raranggonau dan Daya di wilayah Kabupaten Donggala dan suku Sea-sea di Kabupaten Banggai, suku Wana di Kabupaten Poso.

Setelah adanya pengaruh pergerakan di Sulawesi Tengah sejak tahun 1916, maka semangat melawan rakyat mulai berkobar lagi dengan didasari berbagai motivasi sesuai dasar dari tiap pergerakan tersebut. Ada yang berdasarkan agama seperti SI kemudian menjadi PSII, Muhammadiyah dan ada pula didasarkan pada semangat nasionalisme.

Raja Dolo Datupamusu malah menjadi Ketua SI Dolo sehingga rakyat dalam wilayah kerajaannya sebagian besar menjadi anggota partai ini. Akibatnya raja Dolo Datupamusu, diasingkan Belanda ke Ternate dan saudara sepupunya Gagaramusu di buang ke Sangir-Talaud. Begitu pula sepupunya Datupalinge dan Lapasere dipenjarakan di Palu karena ke dua Beliau adalah pembantu utama dalam staf kerajaan Dolo. Akibatnya kemudian Dolo dimasukkan Belanda menjadi bagian dari kerajaan Sigi sehingga menjadi kerajaan Sigi — Dolo dengan pusatnya di Biro-maru.

Setelah pergerakan makin luas dan bertambah banyak pengikutnya dikalangan rakyat, terjadilah aksi-aksi perlawanan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pergerakan tersebut terutama dari partai SI yang kemudian berubah menjadi PSII.

Pada tahun 1924, dengan dipelopori oleh pimpinannya (Yusuf Makarao) maka anggota-anggota SI di Pagimana melakukan aksi menolak melakukan heorendienst dan membayar pajak. Akibatnya Yusuf Makarao bersama teman-temannya ditangkap dibawa ke Bau-Bau untuk diadili (karena pada waktu

itu kerajaan Banggai masuk wilayah Afdeeling Oost Celebes yang beribukota di Bau-Bau). Putusan pengadilan kolonial di Bau-Bau adalah Yusuf Makarao dan teman-temannya dipenjarakan di Luwuk.

Setelah adik (Suankupan) Yusuf Makaro mengirim surat kepada anggota Volksraad menanyakan pada pemerintah Belanda, barulah Yusuf Makarao dengan kawan-kawannya dibebaskan setelah 50 hari dipenjarakan. Akibat diajukan pada Volksraad maka kontroliur Kapten Van Becken dipindahkan ke Digul dan menteri jalan (bernama Haulusi) dipecat dari jabatannya.²).

Aksi menentang melakukan heeren dienst dan membayar pajak ini banyak dilakukan pemimpin dan anggota PSII Sulawesi Tengah karena asas PSII adalah non-koperasi pada pemerintah Belanda. Salah satu pemberontakan yang dilakukan warga PSII di Toli-Toli adalah Pemberontakan Salumpaga. Pemberontakan Salumpaga Toli-Toli yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1919 menyebabkan terbunuhnya :

- a. Kontroliur De Kat Angelino.
- b. Raja Toli-Toli Mogi Haji Ali.
- c. Komandan Polisi setempat bersama 5 orang anggotanya.
- d. Jaksa Toli-Toli Zakaria.
- e. Seorang Opas.

Akibat pemberontakan bagi pelakunya adalah : 4 (empat) orang dijatuhi hukuman gantung yaitu Otto, Kampaeng, Kombong dan Hasan. Pimpinannya Haji Hayyun 'dihukum seumur hidup dan dibuang ke Jawa, meninggal di Ambarawa. 20 (dua puluh) orang dibuang ke Nusakambangan dan 3 (tiga) orang dibuang ke Boven Digul.³).

-
- 2). Hasil wawancara dengan Yusur Monoarfa di Luwuk, tgl. 23-9-1978.
 - 3). DPRD-GR Buol Toli-Toli, *Resolusi tentang perjuangan rakyat melawan penjajahan Belanda dan Jepang di daerah Kabupaten Buol Toli-Toli nomor 7/Res/DPRD-GR/1970.*

Akibat langsung yang diderita rakyat Salumpaga adalah tetap dikenakan wajib bayar pajak dan melakukan *heerendienst* disamping hartanya disita oleh pemerintah utamanya pohon kelapa rakyat diserahkan pengelolaan dan pemetikannya kepada seorang Cina bernama Bu Ting selama lebih 4 (empat) tahun sebagai ganti rugi karena tokonya hancur pada waktu timbul pemberontakan.⁴⁾

Tahun 1933 timbul pula aksi Pagimana yang dilakukan oleh Komite Umat Islam. Dalam aksi ini tokoh-tokoh PSII, Muhammadiyah dan Islamiten Bond bekerjasama. Aksi dilakukan dalam rangka menyongsong hari Idul Qurban 1933. Akibatnya pimpinan-pimpinan yang memperlopori aksi ini dijatuhi hukuman dan dipenjarakan.

Peristiwa Dolago tahun 1936 juga merupakan perlawanan menentang pelaksanaan *heerendienst* dan pungutan pajak. Akibatnya tokoh pimpinannya Abdul Wahid Toana dan Marjun Habie ditangkap dan dipenjarakan. Sedangkan anggota-anggota lainnya dihukum buang ke Manado dan berpuluh-puluh dibuang ke Bolang Maongondow.

Demikian pula halnya ketua SI Palu bersama wakilnya (Yoto Daeng Pawindu dan Abdul Rahin Pakamundi) karena mengembangkan SI, ditangkap dan dipenjarakan ke Sukamiskir dari tahun 1927 — 1930. Di dalam tahanan Daeng Pawindu bertemu dengan Ir. Sukarno sehingga ketika pulang ke Palu Daeng Pawindu makin giat menganjurkan dan menyuruh anggota-anggotanya supaya jangan membayar pajak.

Hal ini ditaati terutama oleh pengikut-pengikutnya yang tinggal di daerah pegunungan (suku terasing).

Melalui media tulisan (pers), seorang wartawan yang datang ke Sulawesi Tengah sejak September 1937 (bernama Horas Siregar) sering membuat tulisan yang menyerang pemerintah Hindia Belanda.

4). Hasil wawancara dengan Haji Hasan Tawil di Palu, tgl. 29—12—1978.

Dalam mingguan *Penerangan* yang dipimpinnya tahun 1933 tentang penderitaan rakyat yang melakukan *heerendienst* di daerah Mamuju. Surat kabar tersebut dikirimnya pula kepada Muhammad Husni Thamrin anggota Volksraad di Batavia. Hal tersebut lalu dipertanyakan pada pemerintah. Akibatnya Horas Siregar ditegur dan diancam akan dibreidel mingguannya oleh Asisten Residen Donggala (bernama Lanting) apabila menulis lagi berita-berita semacam itu. Walaupun begitu sebagai akibatnya Gezaggebber Mamuju lalu dipindah tugaskan ke daerah lain.

Tahun 1939 Horas Siregar mengirim berita ke *Bintang Timur* (pimpinan Parada Harahap) tentang Peristiwa Pesaku yaitu peristiwa dimana Bala Keselamatan masuk ke Mesjid Pesaku melakukan kebaktian gereja. Pemberitaan ini oleh Wiwoho anggota Volksraad ditanyakan kebenarannya pada pemerintah. Sebagai akibatnya lalu Komandan Bala Keselamatan Rhoimaker dipindahkan dari Palu.

Pada tahun 1942 saat menjelang tibanya balatentara Jepang ke Sulawesi Tengah, pemberontakan di tiga tempat yaitu di Toli-Toli, di Luwuk dan Ampana (Poso) pecah melawan pemerintah Belanda yang berkuasa di tempat-tempat tersebut. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh gerakan Merah Putih yang ada di tiga tempat tersebut.

Seperti diketahui gerakan Merah Putih ini berpusat di Gorontalo dipimpin oleh Nani Wartabone. Sebagai bagian dari wilayah Keresidenan Manado maka pemerintah Belanda di Sulawesi Tengah menjadi kebingungan ketika balatentara Jepang sudah menduduki Manado pada tanggal 11 Januari 1942, dan tentara KNIL sudah melakukan gerakan mundur ke arah Sulawesi Tengah melalui Gorontalo.

Sebelum balatentara Jepang tiba, maka berturut-turut terjadi perebutan kekuasaan dari pemerintah Belanda masing-masing :

1. Di Toli-Toli pada tanggal 1 Pebruari 1942.
2. Di Luwuk pada tanggal 12 Pebruari 1942.
3. Di Ampana, Poso, pada tanggal 20 Pebruari 1942.

1. Akibat dari perebutan kekuasaan itu adalah pemuda-pemuda gerakan Merah Putih berhasil mengambil alih pemerintahan setempat dan mengibarkan bendera Merah Putih kemudian membentuk pemerintah darurat yang terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional setempat.

Di Toli-Toli pemuda gerakan Merah Putih berhasil menangkap kontroliur Toli-Toli De Hoof dan membunuh Inspektur Polisi Belanda bernama Boertje. Juga kontroliur Buol bernama De Vries ditangkap lalu dibawa ke Toli-Toli.

Gerakan Merah Putih Toli-Toli lalu membentuk badan pemerintahan darurat dan mengatur keamanan pimpinannya terdiri dari tokoh-tokoh pemuda pergerakan yang pada umumnya dari PSII. Pimpinan pemuda Islam dan polisi yang berjiwa nasional.

Akan tetapi sayang perebutan kekuasaan di Toli-Toli ini tidak berusia lama karena kemudian datang balabantuan pasukan tentara Belanda dari Donggala. Akibatnya 7 (tujuh) orang dari pelopor dan pelaku dari Gerakan Merah Putih yang sebagian besar terdiri dari anggota polisi gugur menghadapi serangan pasukan tentara Belanda yang datang dengan tiba-tiba akibat adanya penghianatan dari 2 (dua) anggota polisi yang melarikan diri dan melapor kepada pemerintah Belanda di Donggala.

2. Mengenai perebutan kekuasaan oleh Gerakan Merah Putih Luwuk berhasil pula menawan aparat pemerintah Belanda di Luwuk, lalu dilaksanakan serah terima kekuasaan pemerintahan dari Gezagebber F. Walrahbe kepada Dr. Soetaryo sebagai wakil pimpinan Gerakan pemberontakan rakyat Banggai.

Untuk menjalankan pemerintahan darurat dibentuklah suatu badan yang dinamai Komite 12 terdiri dari 12 orang diketuai oleh S.A. Amir raja Banggai ketika itu.

Pemerintah Komite 12 ini pada mulanya diakui oleh Shunanto Seirei Komandan Angkatan Laut Jepang di Manado

saat itu. Tetapi ketika Komandan Miyamoto dengan pasukannya mendarat di Luwuk pada tanggal 15 Mei 1942, maka pada tanggal 17 Mei 1942 kekuasaan Komite 12 ini sebagai pemerintahan darurat diambil alih oleh Miyamoto dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum dapat mempertahankan dirinya jika ada serangan dari Sekutu. Kelak apabila bangsa Indonesia telah sanggup berpemerintahan sendiri barulah Jepang akan menyerahkan kembali kekuasaan itu.

Ketika Jepang menyerah dan NICA kembali berkuasa maka semua tokoh yang terlibat dalam gerakan Merah Putih di Luwuk ini ditangkap dan dipenjarakan. Berdasarkan vonis yang dijatuhkan mereka dikenakan hukuman penjara antara 2 sampai 12 tahun penjara.

3. Terjadinya pengambil alihan kekuasaan pemerintahan dari pemuda gerakan Merah Putih di Ampana dipelopori oleh raja Tojo, Tanjumbulu pada tanggal 20 Pebruari 1942.

Pengambil alihan ini dilaksanakan setelah datangnya 2 orang utusan (kurir) Nani Wartabone dari Gorontalo dan raja sendiri yang menjadi ketua gerakan ini maka pengambil alihan kekuasaan berlangsung tanpa pertumpahan darah. Nanti setelah selesai pengambilalihan kekuasaan barulah datang pasukan tentara Belanda dari Poso dan menembak mati dua orang penjaga kantor ditugaskan menjaga bendera Merah Putih yang sedang berkibar di atas tiang masing-masing bernama Nggai alias Papa Judaedah dan Salibu alias Papa Dero.

Pemerintah Gerakan Merah Putih ini berkuasa di Ampana sampai pertengahan bulan Mei 1942 saat masuknya Jepang di daerah ini. ⁵⁾

Gerakan Merah Putih Ampana mengalami nasib yang sama dengan Komite 12 di Luwuk, yaitu kekuasaannya diambil alih oleh Jepang.

5). Hasil wawancara dengan R.G. Datupamusu di Dolo, tgl. 1-11-1978.

Pimpinan gerakan Merah Putih di Ampana ini, raja Tojo Tanjumbulu, pada zaman Jepang akhirnya dipancing Jepang bersama beberapa orang tokoh PSII pada pertengahan bulan Ramadhan, tahun 1942 akibat fitnah yang dilancarkan oleh ex Bestuur Asisten Belanda di Poso bernama S. Warow yang menuduh mereka sebagai mata-mata Sekutu.

Pada masa pendudukan Jepang terjadi pula beberapa perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Jepang, walaupun rakyat hidup dalam keadaan tertekan dan diliputi rasa ketakutan.

Tercatat di Sulawesi Tengah terjadi pemberontakan rakyat pada 4 tempat masing-masing di :

1. Balantak dan Rang-Ranga di wilayah Kabupaten Banggai dengan tokoh pimpinannya bernama Mantide.
2. Di desa Wuasa dan Watumaeta di Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Pemimpin pemberontakan di tempat-tempat tersebut adalah Abe Pande dan Tarico Hio.
3. Di Salenggoha Kecamatan Walea Kepulauan pada tahun 1944 (2694 tahun Jepang) terjadi pemberontakan rakyat terhadap Jepang dipimpin oleh Talhata Darise.
4. Di Malomba Toli-Toli pada tanggal 18 Juli 1945 dengan pelopornya Abang Ali dan Latantong.

Perlawanan-perlawanan tersebut kemudian membawa akibat sebagai berikut : Jatuhnya berpuluh-puluh korban rakyat gugur dalam pemberontakan bersenjata melawan Jepang, karena rakyat yang nekad melawan hanya memakai pedang, parang dan senjata tajam lainnya sedangkan pihak Jepang memakai senjata api (senapan).

Walaupun demikian sisa pasukan Jepang yang diserang di Kecamatan Lore Utara akhirnya lari menyingkir ke Tawae-

lia. 6)

Demikian pula halnya dengan perlawanan rakyat di Salinggoha. Banyak rakyat yang gugur diberondong senapan mesin dan yang masih hidup akhirnya ditangkap oleh Jepang dan pimpinan serta \pm 20 orang pengikutnya dipenjarakan di Manado.

Perlawanan rakyat di Malomba Toli-Toli mengakibatkan tewasnya Ken Karikan Toli-Toli yang bernama Imaki, kena parang dari Lanoni yang menyerang dengan tiba-tiba kepada orang Jepang tersebut ketika turun dari kendaraannya. Lanoni ikut gugur diberondong senapan dari pengawal Imaki. Begitu pula rakyat lainnya banyak gugur kena berondongan peluru pasukan Jepang. Kemudian ada 9 (sembilan) orang rakyat kampung itu ditangkap hidup-hidup lalu dibawa ke Toli-Toli dan 14 hari sesudah kejadian tersebut kesemuanya dihukum pancung oleh Jepang di Panasakan Dalam Toli-Toli kemudian dikuburkan dalam satu lubang.

6). Informasi tertulis dari G. Beba, Penilik Kebudayaan Kantor Departemen P dan Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

PENUTUP

Dari apa yang ditulis pada Bab-Bab yang di depan tadi, dapat disimpulkan bahwa sejak datangnya kekuasaan kolonialisme dan imperialisme di daerah Sulawesi Tengah maka sejak itu pula telah timbul reaksi atau perlawanan sebagai tanda penolakan rakyat pada kekuasaan asing tersebut.

Pada umumnya perlawanan-perlawanan tersebut dipimpin oleh raja atau tokoh-tokoh masyarakat setempat dan mendapat dukungan/bantuan dari rakyat atau pengikutnya masing-masing.

Sulawesi Tengah yang wilayahnya terdiri dari empat (4) kabupaten tercatat perlawanan-perlawanan yang pernah terjadi melawan kolonialisme imperialisme di 4 (empat) kabupaten tersebut.

Perlawanan-perlawanan tersebut ada yang secara massal dan ada pula secara perorangan dan wujudnya ada yang berupa perlawanan bersenjata ada pula berupa perlawanan sikap.

Hanya saja perlawanan-perlawanan tersebut tidak terjadi serentak tetapi setempat-setempat, tidak terkordinir pada satu pimpinan karena pada zaman itu kerajaan-kerajaan yang ada masing-masing otonom didalam wilayah kekuasaannya sehingga Belanda menaklukkannya satu-persatu. Disamping itu Belanda pun menjalankan siasat politik adu domba diantara raja-raja yang melawan, dengan mengangkat penggantinya dari keluarga raja itu sendiri sehingga timbul keretakan hubungan antara satu sama lain.

Setelah berhasil menundukkan perlawanan, maka Belanda lalu menyodorkan "plakat pendek" atau korteveklaring untuk ditanda tangani oleh raja-raja yang sudah dikuasai atau pada raja-raja yang baru dilantik sebagai tanda pengakuan raja-raja tersebut atas kekuasaan Belanda atas kerajaannya. Kebanyakan raja-raja yang melawan dijatuhi hukuman pengasingan keluar daerah Sulawesi Tengah oleh Belanda. Dengan demikian raja-raja setempat lalu dijadikan alat dalam mengeksploitasi rakyat dan

hasil bumi Sulawesi Tengah untuk mengisi kas penjajah melalui pungutan pajak kepala, kerja paksa dan lain-lainnya.

Untuk mengawasi raja-raja dalam tugas pemerintahannya Belanda menempatkan pejabat-pejabat orang Belanda dengan pangkat masing-masing sesuai status daerahnya. Wilayah Sulawesi Tengah dijadikan sebagai bagian dari keresidenan Manado dan dibagi menjadi 2 afdeeling, afdeeling Poso dan afdeeling Donggala. 2 afdeeling ini terdiri lagi dari 8 onderafdeeling, dimana tiap onder afdeeling dikepalai oleh seorang Kontraliur atau aspirant controlieur.

Dengan datangnya pengaruh pergerakan nasional ke Sulawesi Tengah maka timbullah gerakan-gerakan yang didasari oleh rasa kebangsaan dalam menentang pelaksanaan politik kolonialisme Belanda, utamanya dalam menentang pelaksanaan sistim pajak kepala dan kerja paksa (beerendienst) yang dirasakan oleh rakyat sangat berat.

Perlawanan-perlawanan tersebut dipelopori atau dipimpin oleh tokoh-tokoh pimpinan pergerakan seperti umpamanya: peristiwa Dolago, pemberontakan Salumpaga, peristiwa Pagimana dan lain-lain.

Akibat perlawanan ini adalah penangkapan-penangkapan tokoh pimpinan pergerakan lalu dipenjarakan atau diasingkan/dibuang keluar daerah Sulawesi Tengah. Ada yang dibuang ke Cilacap, Boven Digul, Sulawesi Selatan, Bolaan Mongondow dan sebagainya. Malah ada yang sampai dijatuhi hukuman gantung (mati. Disamping itu pada setiap pemberontakan telah jatuh pula banyak korban rakyat yang gugur kena berondongan peluru pasukan Belanda.

Pada tahun 1942 menjelang tibanya penjajahan Jepang di Sulawesi Tengah, telah terjadi pula pengambil alihan kekuasaan dari pemerintah Belanda oleh pemuda-pemuda gerakan Merah Putih suatu gerakan yang pusat gerakannya terdapat di Gorontalo dipimpin oleh Nani Wartabone.

Gerakan Merah Putih ini mengadakan aksi pengambil alih-

an kekuasaan di tiga tempat masing-masing: di Toli-Toli, Ampana (Poso) dan Luwuk (Banggai). Mereka sempat membentuk badan pemerintahan/keamanan darurat gerakan Merah Putih yang melaksanakan tugas pemerintahan darurat di masing-masing tempat yang disebut diatas dan Bendera Merah Putih dikibarkan menggantikan bendera Belanda.

Namun ketika Jepang datang pimpinan bala tentara Jepang yang mendarat di tiga tempat tersebut lalu mengambil alih kekuasaan dengan dalih bangsa Indonesia belum mampu mempertahankan diri apabila sekutu datang menyerang.

Demikianlah selama masa pendudukan Jepang, rakyat hidup dalam penderitaan dan tekanan serta ketakutan tapi akhirnya meletus juga pemberontakan rakyat yang dilakukan secara nekad walaupun hanya bersenjata parang, tombak dan keris menghadapi senjata senapan Jepang. Pemberontakan-pemberontakan ini mengakibatkan banyak korban gugur di pihak rakyat tapi pun dari pihak Jepang jatuh pula korban antara lain Ken Karikan Toli-Toli yang bernama Imaki.

DAFTAR SUMBER/KEPUSTAKAAN

1. Abdullah, Jamas; *Sejarah Tanah Kaili*, Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala 1956.
2. Abdullah, Muh. Djaruddin Haji; *Mengenal Tanah Kaili*, Badan Pengembangan Pariwisata Dati I Sulawesi Tengah.
3. Adicondro, Y.G.; *Prisma*, Pluralisme Budaya dari Batak sampai Bajo yang disensor di Singapura Pemuda Takdir dan Ayip Rasidi tentang Kultur kita. (Prisma No. 2 tahun 1979).
4. Amir, Syukuran Amiruddin dkk.; *Naskah Riwayat Perjuangan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Menggulingkan Pemerintah Penjajahan Belanda pada tanggal 12 Pebruari 1942*, Luwuk 30 Maret 1974.
5. Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, *Gambaran Umum Pelaksanaan Pelita I, II sampai tahun ke II Pelita III Sulawesi Tengah Tahun 1981*.
6. Datupamusu, R.G. ; *Catatan Harian* (tidak diterbitkan).
7. DPRD—GR Kabupaten Buol Toli-Toli, *Resolusi Tentang Perjuangan Rakyat Melawan Penjajahan Belanda dan Jepang di daerah Kabupaten Buol Toli-Toli No. 7/Res/DPRD—GR/1970*.
8. *Humas Alkhairat, Sejarah Ringkas Lembaga Pendidikan Islam Alkhairat Palu*. (Brosur) 1977.
9. Kruyt, J. ; *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1977.
10. Kementerian Penerangan RI; *Seri Propinsi Sulawesi*. Makassar 1953.
1. Koyongian, V.R.; *Sejarah Singkat Kerajaan Banggai*. (Tidak diterbitkan).
2. Kantor Sensus dan Statistik Sulawesi Tengah; *Sulawesi Tengah Dalam Angka 1979*.
3. Kruyt, A.C.; *De West Toradja's op Midden Celebes I, 1938*.

14. Lanasir, A.R.; *Catatan Perjuangan/Pergerakan di Luwuk Banggai* (Tidak diterbitkan).
15. Lubis, M.; *Pemberontakan Toli-Toli (3 Kaum SI mati digantung)* Taman Pengajian Ni'mah Komo Manado 1969.
16. L. Van Vuuren; *Een Woord Toi Inleiding Bij Den Onderzeeche Vorm Weltevreden* 1916.
17. Larekeng, Abdul Azis; *Memori Bupati Kepala Daerah Banggai 1973*.
18. Moh. Sidky Daeng Materu; *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia* (Tanpa penerbit).
19. Monoarfa, Yusuf; *Konsep Autobiografi dan Perjuangan Yusuf Monoarfa di Daerah Luwuk*. (Tidak diterbitkan).
20. Mangitung, Abdul Latif; *Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata di Daerah Sulawesi Tengah*. (Belum diterbitkan).
21. Maluku, Abdul Wahid; *Memori Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Daerah Donggala, Sulawesi Tengah*. (Belum diterbitkan).
22. Masyhuda, Masyhuddin; *Monografi Sulawesi Tengah Jilid I*, diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Media-Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Dep. P dan K RI Jakarta 1977.
23. Masyhuda, Masyhuddin; *Perkembangan Kebudayaan di Sulawesi Tengah*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah tahun 1981.
24. Masyhuda, Masyhuddin; *Sejarah Etnis di Sulawesi Tengah*, tahun 1981.
25. *Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurzaken der Buiten Gewesten van Binnenlandsche Bestuur, Serie A Nomor 3*. Landsdrukkerij, Weltevreden 1929.
26. N.N.; *Aurobiografi dan Perjuangan Karanja Lembah*. (Tidak diterbitkan).
27. Nurdin, A.T.; *Catatan Ringkas Riwayat Perjuangan Lasykar PIM*. (Tidak diterbitkan).
28. Parobe, M.; *Riwayat Perjuangan Rakyat Mori Menentang*

Penjajahan Belanda. (Tidak diterbitkan).

29. Russama, J.; *Sejarah Kerajaan Sigi*, Bora, 9 Juni 1981.
30. Tokare, Ishak; *Informasi tertulis dari Poso*.
31. Visser, J. et. al.; *Sejarah Kebudayaan Suku-Suku Sulawesi Tengah*, Lembaga Penelitian Studi GKST Tentena 1978.
32. Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah tahun 1977/1978; *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Tengah*.
33. Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah tahun 1978/1979; *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tengah*.
34. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah tahun 1979/1980; *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sulawesi Tengah*.
35. Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah; *17 Tahun Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 1981*.

No. 56493

PERHIMPOENAN „CENTRAL-SAREKAT ISLAM”

(فرهءون: سنرال-سركة الاسلام)

BERDOEDOEK DI SOERAKARTA (DJAWA)

(Rechtspersoon - Gouvernementsbesluit 18 Maart 1916 No. 41)

Dengan mengoetjap sjoekoer dan terima kasih soedah terima
oeang derma sedjoemelah 1,0,53 (lima poeloeh tiga cent) dari
saudara *[Handwritten Name]*, beroemah di *[Handwritten Address]*,
Lid dari perhimpoean „Sarekat Islam
„Sarekat Islam” Stamboek No. *[Handwritten Number]*

SOERABAJA, 23 October 1917.

Atas nama perhimpoean „Central-Sarekat Islam,”
Secretaris, *[Handwritten Signature]* Voorzitter,

No. *[Handwritten Number]*



Bewijs Lidmaatschap perhimpoean
„Sarekat-Islam Boenta”
di Boenta (Oostkust van Celebes).

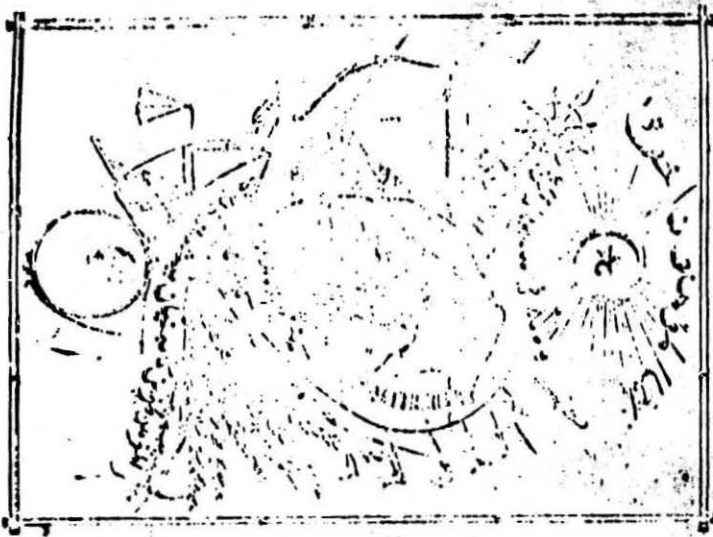
Orang nama *[Handwritten Name]*
tinggal beroemah di kampoeng (doesoem) *[Handwritten Address]*

soedah diterima mendjadi Lid, masoek dalam register pada
[Handwritten Date], dengan soedah membayar
oeang derma *[Handwritten Amount]*

Atas nama Bestuur „perhimpoean S. I. Boenta”

Secretaris, *[Handwritten Signature]*

President, *[Handwritten Signature]*



سورة مائدة شريكة الاسلام

بايت دشن مشغول دى اتم اسلام دن دلت . غن ديا ابقيا يغ تيد
 . مغر بيت نثري تيد . مغر عده اسعده يغ باب دن تيد . مغر كسنان
 سرنا نسافونان عموم

۱۰ مهاجوك نلراوان بومي قوترا نمنغ قره . هان دته فردانغان دن كراچيان تغان
 ناسخ كسحانن بدان قملهاران انن دن ققاجران

۲۰ مشيلاكن قنيران يغ . ناصر نمنغ انام اسلام دن مهاجوكن نهيدون منوروة
 جلنفت اقام سرنا نلدوان صالح داننارا فنددك بومي قوترا

۳۰ ملبهاراكن تالي فرجيفقان داننارا ليدن دن مباحثونكن هاتي مريندايت قدا
 قربواتن تولوف مغبولونم . قوسا لائين

لاى قولا (شريكة اسلام) ممبري قوترا غن كند ليد يغ . مذاقة كسوسهان دشن تيد
 دسچا دن تيد داري سلهت سندنري
 (شريكة اسلام بوننا) اكن بركرا برساه سرنا بنغو مباحثو دشن قرحولونن
 (شريكة اسلام) لائيت يغ سام . تصودت

Relaas

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Oktober 1936 sudahkoe, R.I.F. Wenas, Leider Gewestelijk Recherche Manado, sekarang di Parigi sudah pergi di ToroE (Parigi Selatan) dengan maksud mendapati beberapa orang dari ToroE yang sudah turut perkumpulannya Mahatini di Dolago dan yang sudah turut juga beramai-ramai dengan Mahatini datang di Parigi pada tanggal 28 September 1936 sehingga tertahan di Penjara.

Menurut keterangan dari tuan Magau Parigi yang turut sesama saya ke ToroE maka ada 9 (sembilan) orang yang sudah turut kumpulannya Mahatini sedang bertinggal di ToroE.

Dari kesembilan orang itu, sudah ada 8 (delapan) orang yang dilepaskan dari Penjara Parigi, sedang tertinggal 1 (satu) orang tertahan terus.

Dari kedelapan orang ini, satu dari padanya yaitu Tendjo sudah diperiksa lebih dahulu, sedang seorang bernama Mohasini tiada di negeri melainkan ada keluar tiada tahu kemana, mudah-mudahan ada ke Parigi.

Keenam orang yang lain bernama Barasindji, Maaloem, Lontjet, Mosi, Pandoe dan Pakoe sudah diperhadapkan padahal dan sesudahnya saya buat beberapa pertanyaan pada keenam orang itu, mereka itu berturut-turut sudah memberi penyahutan padaku dihadapan tuan Magau dan Kepala kampung ToroE seperti berikut dibawah ini :

"I. Barasindji umur \pm 39 tahun, pekerjaan berkebun, jadi di Poso, tinggal di ToroE.

"II. Maaloem, umur \pm 35 tahun, pekerjaan berkebun, jadi di Dolago, tinggal di ToroE.

"III. Lontjet, umur \pm 18 tahun, pekerjaan berkebun, jadi di Dolago, tinggal di ToroE.

"IV. Mosi, umur \pm 16 tahun, pekerjaan berkebun, jadi dan di ToroE.

"IV. Pandoe, umur \pm 50 tahun, pekerjaan berkebun, jadi di

Besoa, tinggal di ToroE.

"VI. Pakoe, umur ± 32 tahun, pekerjaan berkebun, jadi di Dolago tinggal di ToroE."

Menerangkan :

"Kami sudah diperiksa lebih dahulu oleh pembesar di Parigi dan kami sudah mengaku salah, sedang turut perkumpulan dari Mahatini, walaupun kami tiada tetap turut ajartannya dari Mahatini. Kami sudah turut itu perkumpulan atas maunya Mahatini dan Soda. Hal pakaian yang disediakan oleh Mahatini maksud dipakai bilamana mau lawan pemerintah katanya Mahatini dan Soda ini semuanya ada kehendak dari Papui Adji dan President sedang kalau lawan pemerintah harus bunuh tuan Magau, tuan Kepala district dan tuan Controleur, supaya bebas dari heerendienst dan pembayaran belasting.

Lebih jauh kami diajak supaya bilamana pemerintah sudah dibunuh maka tentu serdadu musti datang dan juga musti lawan sama serdadu.

Ditentukan bahwa Raolo mula-mula selaku kepala menghantar kami yang melawan membawa bendera merah sedang Soda nanti dari belakang kami membawa bendera hijau.

Oleh karena sumpah yang kami sudah lakukan, kami punya hati menjadi bata-bata artinya menjadi takut, juga takut sama Mahatini dan Soda yang senantiasa menerangkan inilah perintah dari Papai Adji dan President".

Atas pertanyaan siapa itu Papai Adji dan siapa itu President, mereka menyatakan ::Papai Adji ialah Ai Towana Kepala district tua dan President ialah Mardjoen Habi, yang kami tahu ada President Serikat Islam. Kami merasa sungguh-sungguh sudah kenapa ditipu dan kami minta ampun.

Atas pertanyaanku kalau-kalau mereka merasa keberatan atas penuntutan heerendienst dan belasting mereka menyahut: "Kami tidak ada keberatan fatsal heerendienst, sebab itu seperti biasa juga, juga atas belasting kami tidak ada keberatan apa-apa".

(Tuan Magau menyatakan bahwa belasting ToroE sudah

lain sama sekali dalam bulan Agustus).

Lontjet menerangkan lebih jauh: "Saya di Dolago bertinggal dirumahnya Mahatini dan saya yang di suruh senantiasa panggil orang-orang yang alpa datang main kontak, dan saya mendapat itu hak akan pukul orang kalau tidak datang".

Keterangan ini dikuatkan oleh kelima orang yang lain.

Keenam orang tersebut menerangkan lebih jauh: "Maraota dan Powedo ditentukan selaku schildwacht dan bilamana ada orang mau datang ditempat mainan kontao yaitu dikintal sebuah kebun dari Mahatini, sedang orang itu tiada suka turut itu perkumpulan harus lantas dibunuh saja. Kami sudah menjadi takut sehingga sudah turut terus saja dulu itu perkumpulan buat melawan, bunuh Pemerintah, disebabkan oleh sumpah yang sudah diambil oleh Mahatini pada kami".

Sebegitu sudah dibuat relaas ini pada tanggal tersebut, dengan mengingat sumpah tatkala menjabat pekerjaanku.

Leider Gew. Recherche tersebut.



PETA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Skala 1 : 2.000.000

+++++ Batas Propinsi
 +++++ Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan

□ Ibu Kota Propinsi
 ⊙ Ibu Kota Kabupaten
 ○ Ibu Kota Kecamatan • Desa

SULAWESI
 TENGGARA.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abdul Azis Larekeng. Drs.
Umur : 63 tahun
Alamat : Palu
Pekerjaan : Anggota DDPR Pusat mewakili rakyat Sulawesi Tengah
Aktivitas yang pernah dilakukan:
 - 1936 bekerja sebagai juru kepala distrik di Luwuk. Kemudian berhenti karena menganut paham non-koperasi dengan Pemerintah Belanda.
 - 1936 anggota koresponden majalah mingguan "Pedoman Masyarakat" terbit di Medan (Sumatera).
 - 1939—1940 mendirikan Centrale Korant en Boekhandel T/V korrespondensi Cabang Luwuk berpusat di Gorontalo.
 - Anggota korespondensi mingguan "Perasaan" pimpinan Amin Larekeng di Gorontalo menjelang Jepang datang.
 - 1940 dalam rangka Indonesia berparlemen ikut menjual insign Merah Putih yang bertuliskan "Indonesia Berparlemen" ditengahnya dan menjual buku roman perjuangan berjudul "Suasana Kalimantan" karangan Matumona (Abdullah Parinduri).
 - Akibatnya perusahaannya ditutup oleh pemerintah Belanda.
 - Pernah aktif sebagai anggota partai PSII.
 - Zaman pendudukan Jepang menjadi polisi Jepang (Jum-po).
 - Waktu Revolusi fisik aktif dalam perjuangan di Luwuk.
 - 1950 menjadi pegawai Departemen Penerangan Propinsi Sulawesi.
 - Setelah berdiri Propinsi Sulawesi Tengah tahun 1963, menjadi Kepala Kantor Penerangan Propinsi Sulawesi Tengah.
 - Sekretaris Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
 - 1969—1973 Bupati BKDH Dati II Banggai di Luwuk.

- Ketua BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tengah.
- Anggota DPR Pusat mewakili rakyat Sulawesi Tengah 1977 — sekarang.

2. Nama : Abdul Rahman Lanasir (almarhum).

Umur : 67 tahun.

Alamat : Kompleks Asrama Kodim Luwuk.

Pekerjaan : Anggota DPRD Dati II Banggai di Luwuk.

Aktivitas yang pernah dilakukan :

- 1932 ke Mandar (Sulawesi Selatan) bersekolah pada Vervolgsholl. Menjadi pimpinan Pandu Yong Islamiten Bod di Mandar.
- 1933 kembali ke Donggala merukunkan hubungan antara Pandu HW dan SAP ketika ada sedikit salah faham antara keduanya di Parigi, ketika Doormeyer menjadi Aspirant Kontrolieur di Parigi.
- Setelah kawin tinggal di Pagimana, aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan menjadi Komandan II dari Pasukan Pemberontakan Pemuda Merah Putih di Luwuk awal tahun 1942.
- Selama masa pergerakan di Sulawesi Tengah berkali-kali masuk penjara di Luwuk. Terakhir ditahan di Kamp militer Layang Ujung Pandang dan nanti dibebaskan setelah penyerahan kedaulatan tahun 1949.
- Pimpinan Markas Cabang Legium Veteran Dati II Luwuk hingga saat meninggal dunia tahun 1979.

3. Nama : Abdul Wahid Maluku.

Umur : 63 tahun.

Alamat : Kampung Limboro, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Pekerjaan : Swasta.

Aktivitas yang pernah dilakukan :

- 1948—1950 Bendahara pada pengurus Gerakan Merah Putih di Donggala.

- Pimpinan Staf IV Laskar PIM sektor pertahanan Surumana
— Ganti di daerah Donggala.
- Selama Pendudukan Jepang memimpin seinendan di Donggala.
- Waktu mendudukkan NICA dimasukkan penjara tahan militer di Palu dengan siksaan berat hingga sekarang fisiknya lemah.
- Anggota Barisan Nasional Indonesia pimpinan G.E. Dauhman di Manado dengan surat kabar "MENARA" sebagai terompetnya.
- Hasil karya : Memori Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Donggala.

4. Nama : Abdul Latif Mangitung.

Umur : 62 tahun.

Alamat : Risetlemen Maengko, Kecamatan Poso Kota.

Aktivitas yang pernah dilakukan :

- Wakil Panglima Perang Kerajaan Tojo di Ampana.
- Membentuk Laskar Tanjumbulu di kampung Sayo, Kecamatan Poso Kota pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 21.00 malam.
- Komandan Laskar Tanjumbulu dilebur ke Devisi PKR Luwu—Palopo tanggal 21 Maret 1946 menjadi Resimen VII PKR Luwu Sulawesi Tengah bermarkas di kampung Malei (Poso).
- Memberi bahan-bahan dalam penulisan buku "Luwu Dalam Revolusi" oleh H.M. Sanusi Daeng Mattata.
- Hasil Karya : "Sejarah Singkat Perjuangan Bersenjata di Sulawesi Tengah Sejak 25-12-1941 sampai dengan 12-2-1959.

5. Nama : Abu Saleh Tanjumbulu.

Umur : 55 tahun.

Alamat : Uentanaga B. Ampana, Kabupaten Poso.

Pekerjaan : Tani selain sebagai anggota Veteran RI.

Kegiatan :

— Agen Pewarta Celebes selama pendudukan Jepang di Ampana.

— Wartawan IPPHOS di Makassar 1949—1950.

— Pimpinan majalah harian "Harian Kebenaran" di Poso 1950—1953 dengan oplag 2000/hari.

— Anggota DPRD Kabupaten Poso 1952—1953.

— Kepala Kantor Kesenian Kabupaten Poso 1953—1955.

— Pimpinan "Harian Sulawesi Bergolak" di Makassar 1956—1958 dengan oplag 15000/hari.

— Anggota Laskar Tanjumbulu Resimen VII Devisi PKR Luwu Sulawesi Tengah.

6. Nama : Abdul Hamid (menantu Haji Hayyun).

Umur : 72 tahun.

Alamat : Kampung Salumpaga, Toli-Toli.

Pekerjaan : Tani.

Kegiatan :

7. Nama : Anwar Abu.

Umur : 42 tahun.

Alamat : Kampung Salumpaga, Toli-Toli.

Pekerjaan : Kepala Kampung Salumpaga.

Kegiatan : —

8. Nama : A.R. Onge.

Umur : 73 tahun.

Alamat : Luwuk.

Pekerjaan : Pensiunan Kepala Kantor Penerangan Gorontalo.

Kegiatan :

— 1923—1927 anggota Pandu SIAP di Bunta.

— 1927 dipenjarakan di Luwuk karena aktif dalam partai SI (PSII).

- Komisaris merangkap sekretaris Muballig Muhammadiyah Gorontalo 1929.
- 1933 mendirikan Muhammadiyah di Poso atas perintah Tom Olli, selaku Konsul Muhammadiyah Sulawesi Utara.
- Sebagai seorang wartawan aktif menerbitkan surat kabar:
 - a. Mingguan "Al Iman" tahun 1932 oplag 1000/hari, beredar sampai ke Jawa, Medan, Samarinda, Manado, Luwuk dan Banggai.
 - b. Mingguan "Pelita Kaum" tahun 1934, dikenakan pers delik karena isinya menyerang pemerintah Hindia Belanda.
 - c. Menerbitkan roman perjuangan "Kembang Perjuangan" tahun 1936 yang ditulisnya selama berkebun di desa Isimu.
 - f. Menerbitkan surat kabar "Peringatan" tahun 1938.
 - e. Majalah "Keinsafan" bernafaskan Islam tahun 1938.
- Koresponden harian "Bendera Islam" pimpinan Ir. Soekarno dan Ir. Anwari di Bandung.
- Anggota Perintis Kemerdekaan Indonesia SK Pol. 475/70/PK. 27-3-1971.

9. Nama : Cornelis Sapa.

Umur : 50 tahun.

Alamat : Bunta, Kabupaten Banggai.

Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai.

Kegiatan : —

10. Nama : Dorose Togero (menantu raja Kulawi, Intovoalangi).

Umur : 62 tahun.

Alamat : Kulawi, Kabupaten Donggala.

Pekerjaan : Petani.

Kegiatan : menyimpan alat-alat kerajaan milik mertuanya raja Kulawi Intovoalangi alias Toma I Torengke.

11. Nama : Daeng Lawawo Lamakarate, Haji (almarhum).
Umur : 73 tahun.
Alamat : Biromaru, Kabupaten Donggala.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Distrik Biromaru.
Kegiatan :
— Pernah menjadi Bestuur Asisten di Kolonadale pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
— Pernah menjadi kepala polisi di Palu.
12. Nama : Edy Rumambi.
Umur : 43 tahun.
Alamat : Tinombo.
Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Kecamatan Tinombo.
Kegiatan : —
13. Nama : G. Beba.
Umur : 43 tahun.
Alamat : Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.
Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.
Kegiatan : —
14. Nama : Horas Siregar.
Umur : 67 tahun.
Alamat : Palu.
Pekerjaan : Wartawan.
Kegiatan : Berulang-ulang menjadi pimpinan surat kabar/majalah.
— 1932—1933 di Kota Baru (pulau Laut) memimpin bulanan "Panggi Waktu" dicetak di Surabaya. Karena memuat lagu Indonesia Raya dan memuat pidato Bung Karno di Yogyakarta ia dituduh menghasut rakyat untuk memberontak pada pemerintah Hindia Belanda.

- Akhir tahun 1933 pindah ke Samarinda menerbitkan mingguan "Panggilan Waktu".
- 1933 diproses di Samarinda karena ia memuat pidato Bung Karno di Yogyakarta ketika masih di Kota Baru, ia dipenjarakan setahun di Sukamiskin, Bandung. Karena memuat karangan berjudul "Impian Indonesia Merdeka" tulisan dari Aswiyantoyo (Dawat Setitik) ia dimasukkan lagi ke penjara Sukamiskin selama 1½ tahun.
- 1937 mendapat ampunan 3 bulan, keluar dari penjara lalu pindah ke Balikpapan memimpin mingguan "Warta Umum".
- September 1937 pindah ke Palu dan menerbitkan mingguan "Penerangan" dalam bentuk stensilan beredar sampai Poso, Luwuk, Toli, Manado, Gorontalo, Makassar dan Medan.
- 1940 bersama Haji Ince Makka menerbitkan majalah "Mingguan Baru" sampai Jepang masuk tahun 1942.
- 1947 menerbitkan majalah tengah bulanan "Bahaya".
- 1949-1950 pemimpin redaksi "Suara Sulawesi Tengah" terbit 2x seminggu.
- 1952-1961 pimpinan "Mingguan Sulawesi" di Palu
- 1963-1974 pimpinan redaksi mingguan "Duta Revolusi" suara PSII kemudian berubah nama menjadi "Nusa Putera" sekarang.

15. Nama : Hasan Tawil, Haji.
 Umur : 46 tahun.
 Alamat : Palu.
 Pekerjaan : Pegawai Kantor Wilayah Dep. P dan K Sulawesi Tengah.
 Kegiatan :
- Guru SD di Toli-Toli.
 - Bekas anggota DPRD Dati II Buol Toli-Toli.
 - Pembina Pramuka Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
 - Anggota DPRD Dati I Sulawesi Tengah, juga **Pimpinan**

GOLKAR Dati I Sulawesi Tengah.

16. Nama : Ishak Tokare.
Umur : 54 tahun.
Alamat : Kampung Lawanga, Kecamatan Poso Kota.
Pekerjaan : Pegawai Kantor BKDH Poso.
Kegiatan :
— Bekas Kepala Kecamatan Lore. (Napu).
— Aktif menulis tentang adat istiadat orang di Napu sebelum dan sesudah adanya pengaruh agama Kristen di daerah itu.
17. Nama : Lahmadi Mangas. Drs.
Umur : 47 tahun.
Alamat : Bumi Mutiara, Luwuk.
Pekerjaan : Pegawai Kantor BAPPEDA DATI II Banggai.
Kegiatan : Pengurus MDI Dati II Banggai di Luwuk.
18. Nama : M. Dj. Abdullah.
Umur : 70 tahun.
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 26 Palu.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Jawatan Pajak Daerah Kab. Donggala.
Kegiatan :
— Bekas Sekretaris Laskar Merah Putih Sigi — Dolo.
— Sekretaris Umum Gabungan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia Sulawesi Tengah (GAPPRIST) 1947 — 1949.
— DPRDS Daerah Donggala di Palu 1952 — 1955.
— Ketua I Persatuan Wreda Tama RI di Palu 1974 — sekarang.
Hasil Karya: "Mengenal Tanah Kaili" dan "Adat Istiadat di Lembah Kaili" diterbitkan oleh BAPPARDA Sulawesi Tengah.
19. Nama : Mahmud Radjaili, Haji.
Umur : 49 tahun.

Alamat : Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli.

Pekerjaan : Anggota DPRD Dati II Buol Toli-Toli.

Kegiatan :

— Anggota PSII Toli-Toli.

Guru SD Malomba 1949 — 1957.

— Kepala Desa Malomba 1958 — 1978.

— Anggota Panitia Penyusun Perjuangan Rakyat Kabupaten Buol Toli-Toli.

Hasil Karya: "Riwayat Singkat dari Peristiwa Pemberontakan Rakyat Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol Toli-Toli, Propinsi Sulawesi Tengah melawan Imperialisme Jepang tgl.18—7—1945.

20. N a m a : Muhammad Mahmud, Haji.

U m u r : 58 tahun.

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.8 Toli-Toli.

Pekerjaan : Pensiunan Kepala Dinas P dan K Dati II Buol Toli-Toli.

Kegiatan :

— Anggota PSII sampai tahun 1960.

— Membantu Nani Wartabone waktu di Gorontalo menyebarkan pamflet dari Ujung Pandang mendukung Pemerintah RI di Yogyakarta.

— Oktober 1945 tiba di Buol dari Gorontalo dan menaikkan bendera Merah Putih di atas tiang di Leok selama 3 minggu.

— Nopember 1945 ketika NICA datang di Buol dipimpin oleh sersan Lumoa, beliau bersama pamannya Ahmad ditangkap dan dibawa ke Manado dipenjarakan di sana. Dibeaskan tahun 1949 setelah penyerahan Kedaulatan.

21. N a m a : Mohammad Salim Haji Mallu, Haji (almarhum).

U m u r : 68 tahun.

Alamat : Kampung Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten

Toli-Toli.

Pekerjaan : Pengusaha Penginapan Selamat.

Kegiatan :

- Bersama-sama dengan I.D.Awuy, H.L.Waani dan Malingga membentuk organisasi di bawah tanah ingin merobohkan pemerintah Hindia Belanda di Toli-Toli awal tahun 1942.
- Menangkap/menahan kontroliur Toli-Toli, De Hoof dan kontroliur Buol De Vries serta Inspektur Polisi Boertje, kemudian menahannya di penjara.
- Klimaks pemberontakan mereka menaikkan bendera Merah Putih di depan kantor PSII di Kampung Lonti tgl. 1—2—1942.
- Ketika pasukan KNIL datang memadamkan pemberontakan dari Donggala Salim Haji Mallu melarikan diri ke Gorontalo dan bergabung dengan pasukan Nani Wartabone. Kembali ke Toli-Toli setelah Jepang datang.
- Nopember 1945 s/d Juni 1946 dipenjarakan NICA di Samarinda karena pemberontakan bulan Pebruari 1942 di Toli-Toli.
- 1950 aktif dalam gerakan pemuda Merah Putih merebut kekuasaan dari tangan polisi NICA di Toli-Toli.
- Aktif sebagai anggota Gerakan Pembela Pemerintah Pusat (GP3) di Toli-Toli merebut kekuasaan dari pasukan Permesta tgl. 28—4—1978.

22. N a m a : Mohammad Sanusi Patimbang, Haji.
U m u r : 66 tahun.
Alamat : Kampung Baru, Palu.
Pekerjaan : Usaha swasta disamping sebagai anggota Veteran RI.

Kegiatan :

- Aktif dalam gerakan Merah Putih Luwuk tahun 1942 se-

bagai guru Alkhairat di Luwuk waktu itu.

- Selama Revolusi fisik aktif mengadakan gerakan di bawah tanah menentang penjajah Belanda.
- Anggota Laskar Resimen Tanjumbulu bersama Abdul Latief Mangitung sejak dari Poso sampai di Palu sekarang.
- Aktif memberikan penerangan di desa-desa tentang pentingnya arti kemerdekaan bangsa dan negara selama revolusi fisik.

23. N a m a : Rusdi Toana, Drs.

U m u r : 52 tahun.

Alamat : Palu.

Pekerjaan : Dekan Fakultas Sospol Universitas Tadulako
Palu.

Kegiatan :

- Anggota tentara Pelajar ketika masih belajar di SMA Yogyakarta.
- Aktif menulis dalam majalah/surat kabar pada waktu di Yogyakarta antara lain majalah HMI Media, Hikmah, Panji Masyarakat, Suara Umat dan lain-lain.
- Disamping sebagai dosen juga sebagai wartawan.
- Pernah memimpin majalah mingguan "Mercu Suar" suara Muhammadiyah di Palu.

24. N a m a : Rajagunu Datupamusu (almarhum).

U m u r : 68 tahun.

Alamat : Kampung Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala.

Pekerjaan : Pensiunan Kepala Distrik Dolo.

Kegiatan :

- Anggota SI (PSII) di Dolo pada waktu ayahnya Datupamusu Ketua SI di kerajaan Dolo.
- Mewakili raja Tojo Tanjumbulu pada waktu pengambil alihan kekuasaan dari tangan Belanda di Ampana tgl. 20—2—1942.

- Menjadi utusan Gerakan Merah Putih Poso menyampaikan instruksi Gubernur Sam Ratulangi kepada raja-raja di Donggala-Palu dan sekitarnya supaya mempertahankan kemerdekaan 17—8—1945.
25. N a m a : S. Amir, Haji.
 U m u r : 74 tahun.
 Alamat : Luwuk.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pamongpraja Luwuk.
- Mewakili raja melaksanakan pemerintahan sebagai Kapitan Laut meliputi daerah Balantak sampai Batui.
 - 1950 — 1956 anggota PNI.
 - Menjadi Asisten Wedana tahun 1954.
 - Menjadi Wedana Banggai tahun 1960.
 - Anggota Komite 12 dalam Peristiwa Merah Putih di Luwuk.
 - Anggota BPH di Luwuk tahun 1961.
26. N a m a : S. Tobogu.
 U m u r : 67 tahun.
 Alamat : Jln.Tanjumbulu No.94 Poso.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Kebudayaan Dati II Poso.
- Kegiatan :
- Ketua Dewan Hadat Kabupaten Poso.
 - Anggota Legium Veteran RI di Poso.
 - Anggota Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah menentang Permesta dipimpin oleh Asa Bungkundapu.
 - Aktif membantu para mahasiswa dan petugas-petugas negara lainnya dalam memberikan data-data mengenai kebudayaan, kesenian, adat istiadat dan sebagainya.
27. N a m a : S. Kabo.
 U m u r : 65 tahun.
 Alamat : Palu.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Kantor GKDH Propinsi Su-

lawesi Tengah.

Kegiatan : —

28. N a m a : Wongko Lembah Talasa.
U m u r : 67 tahun.
Alamat : Jln. Merdeka No.56 Poso.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Inspektorat Umum Kantor
BKDH Dati II Poso.

Kegiatan :

- Sejak zaman Belanda, zaman Jepang sampai zaman kemerdekaan berkali-kali menjadi pejabat dalam pemerintahan negeri.
- Pernah menjadi Ketua PNI 2x di Poso.
- Zaman Jepang menjadi polisi Jepang (Jumbo) dan menjadi anggota Sukaigin di Manado mewakili Sulawesi Tengah.
- Pelopor Gerakan Merah Putih di Poso atas penunjukkan Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi masa Revolusi fisik.
- Sekarang Ketua Dewan Pleno Legium Veteran RI Dati II Poso.

29. N a m a : Yusuf Monoarfa.
U m u r : 70 tahun.
Alamat : Kampung Jolek, Simpong, Luwuk.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Daerah Dati II Luwuk.

Kegiatan :

- Karena aktivitasnya dalam partai PSII zaman Belanda berulang kali dipenjarakan.
- Sekretaris dan Penghubung pada Komite 12 Peristiwa Merah Putih di Luwuk pada tgl. 12-2-1942.
- Zaman Jepang dipenjarakan di Manado selama 2 tahun, yang sebelumnya telah dipenjarakan di Luwuk selama 3 bulan, dibebaskan tahun 1943.
- Zaman NICA dipenjarakan di Kamp Militer Layang Ujung Pandang bersama A.R. Lanasir, dibebaskan tahun 1949 se-

telah Penyerahan Kedaulatan.

- Akibat penyiksaan di dalam tahanan sekarang menjadi tuli dan tidak mendengar dengan baik.
- Menjadi anggota Perintis Kemerdekaan RI dengan Menteri Sosial RI No.Pol. 645/67/PK— tgl. 15—8—1967.

30. N a m a : Yoto Larini.
U m u r : 82 tahun.
Alamat : Kampung Binangga, Kecamatan Maravola, Kab. Donggala.
Pekerjaan : Tani.
Kegiatan : Dari zaman Belanda, zaman Jepang sampai kemerdekaan menjadi Kepala Kampung di Nunu, Palu.
31. N a m a : Zakaria Udaa. (almarhum).
U m u r : 88 tahun.
Alamat : Kampung Lompio. Banggai.
Pekerjaan : Pensiunan Camat Banggai sejak tahun 1961.
Kegiatan :
— Opas Boom tahun 1914.
— Juru tulis Kepala Distrik Banggai tahun 1916.
— Hukum Tua di Tinangkung tahun 1922.
— Jogugu di Banggai dari tahun 1925 — 1960.
— Pernah menjadi anggota pengadilan negeri (landraad) di Poso.
32. N a m a : H. Ngenta Djiloi.
U m u r : 75 tahun.
Alamat : Kampung Lemo-Kulawi.
Pekerjaan : Pensiunan Asisten Wedana Kulawi.
Aktivitas yang pernah dilakukan :
33. N a m a : M. Rais Amiruddin.
U m u r : 73 tahun.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Urusan Perpajakan.

Alamat : Kampung Kalangkangan Toli-Toli.

Aktivitas yang pernah dilakukan:

34. Nama : Mpongisi Podo.

Umur : 48 tahun.

Alamat : Kampung Baliara, Parigi, Kabupaten Donggala.

Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Kantor Departemen P dan
K Kecamatan Parigi.

Aktivitas yang pernah dilakukan:

35. Nama : S. Walenta.

Umur : 64 tahun.

Alamat : Poso Kota.

Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sub Direktorat Kesra Kantor
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso.

Aktivitas yang pernah dilakukan:

Perpustakaan
Jenderal